

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Penelitian ini menggunakan Kompas.com sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu media daring nasional yang memiliki jangkauan pembaca luas, tingkat kepercayaan publik tinggi, serta posisi strategis dalam pemberitaan isu-isu nasional. Kompas.com berada di bawah Kompas Gramedia Group, kelompok media yang berdiri sejak tahun 1963 dan berkembang menjadi salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia. Grup ini mengelola berbagai platform media, meliputi surat kabar Kompas, Kompas TV, Sonora FM, Gramedia, dan berbagai unit bisnis lain yang bergerak di bidang media, penerbitan, pendidikan, serta perhotelan.

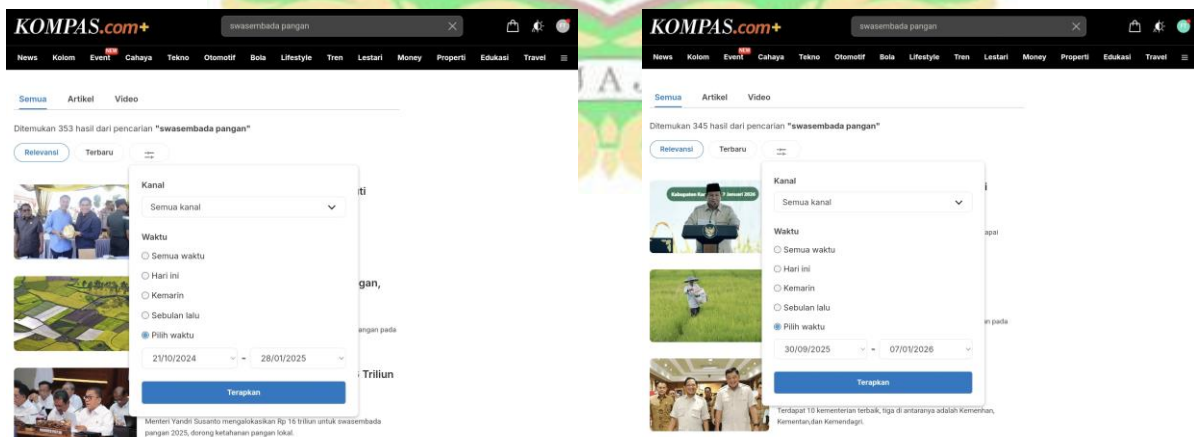
Pada kepercayaan publik, Kompas menempati posisi sebagai salah satu media yang memiliki tingkat kredibilitas tertinggi di Indonesia. Laporan Reuters Institute Digital News Report 2025 menunjukkan bahwa Kompas memperoleh tingkat kepercayaan publik sebesar 62 persen. Posisi tersebut melanjutkan capaian pada Digital News Report 2023, ketika Kompas menjadi media dengan tingkat kepercayaan tertinggi sebesar 69 persen. Dari sisi jangkauan pembaca, survei Iping Wahid Strategik (IPWS) 2023 menempatkan Kompas.com sebagai media daring yang paling banyak diakses masyarakat Indonesia. Kompas.com memiliki posisi penting dalam membentuk informasi dan opini publik terhadap berbagai isu nasional. Kepercayaan publik tersebut tercermin pada identitas visual Kompas.com yang digunakan secara konsisten dalam seluruh produk jurnalistik sebagai representasi institusi media. Logo resmi Kompas.com disajikan pada Gambar 2.



Gambar 1. Logo Kompas

Dari aspek kepemilikan, Kompas Gramedia tidak termasuk kelompok media yang memiliki afiliasi langsung dengan partai politik ataupun politisi aktif. Penelitian PR2Media (2023) menunjukkan bahwa Kompas Gramedia tidak termasuk dalam kategori konglomerasi media yang memiliki hubungan kepemilikan dengan kekuatan politik. Struktur kepemilikan tersebut menunjukkan independensi kelembagaan dibandingkan sejumlah perusahaan media nasional yang dimiliki atau dikendalikan oleh aktor politik.

Independensi kelembagaan tidak selalu diikuti oleh netralitas dalam praktik pemberitaan. Wijayanto (2018) menemukan bahwa Kompas menerapkan posisi editorial yang bersifat ambigu. Pada tingkat kebijakan, Kompas menyatakan menjalankan prinsip netralitas. Pada tingkat praktik pemberitaan, orientasi editorial cenderung memberikan ruang yang lebih positif kepada Joko Widodo dibandingkan Prabowo Subianto dalam pemberitaan Pemilihan Presiden 2014. Kecenderungan tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan politik untuk menjaga hubungan dengan seluruh aktor politik serta pertimbangan ekonomi dalam mempertahankan pembaca dan pendapatan iklan. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik jurnalistik Kompas dipengaruhi oleh proses seleksi isu dan penonjolan fakta tertentu sesuai dengan kepentingan editorial media. Gambar 3 menunjukkan kumpulan pemberitaan Kompas.com yang menjadi objek penelitian.



Gambar 2. Berita 100 Hari Kerja Pemerintahan Presiden dan Berita 100 Hari Swasembada Pangan

Gambar ini menunjukkan berita yang digunakan sebagai objek penelitian dalam menganalisis framing pemberitaan pada media Kompas.com. Penelitian ini dilakukan pada dua periode pengamatan, yaitu periode 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan periode 100 hari swasembada pangan. Periode 100 hari kerja pemerintahan berlangsung sejak 21 Oktober 2024 sampai 28 Januari 2025, sedangkan periode 100 hari swasembada pangan berlangsung sejak 30 September 2025 sampai 07 Januari 2026.

B. Framing Isu Swasembada Pangan

1. 100 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

Hasil framing pemberitaan 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada media Kompas.com dianalisis berdasarkan lima topik utama pemberitaan, yaitu kebijakan pemerintah, produksi pertanian, harga pangan, infrastruktur pertanian, dan kelembagaan pertanian. Analisis framing dilakukan menggunakan perangkat framing untuk melihat cara media mendefinisikan masalah, menjelaskan penyebab, memberikan penilaian moral, serta menawarkan solusi dalam pemberitaan swasembada pangan. Adapun pembahasan hasil framing pada setiap topik dijelaskan sebagai berikut.

a. Kebijakan Pemerintahan

Topik kebijakan pemerintah membahas framing media terhadap program dan langkah pemerintah dalam mendukung swasembada pangan pada periode 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Analisis framing dilakukan berdasarkan unsur framing, aktor dominan, diksi kunci, dan kecenderungan pemberitaan. Hasil analisis disajikan pada tabel 6 berikut.

Tabel 1. Hasil Framing 100 Hari Kerja Pemerintahan pada Topik Kebijakan Pemerintah

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi Kunci	Kecenderungan Framing
<i>Arahan Prabowo di Rapat Kabinet Perdana, dari Program Makan Gratis hingga Swasembada Pangan</i>	Ketergantungan impor pangan dan lemahnya disiplin birokrasi	Pejabat tidak bekerja optimal, proyek mercusuar, pemborosan anggaran	Pejabat wajib loyal dan bekerja untuk rakyat	Evaluasi proyek, pengetatan APBN, copot pejabat tidak patuh	Presiden Prabowo	“copot”, “tidak kebal hukum”, “mercusuar”, “tidak ragu-ragu”	Pemerintah sebagai reformator tegas
<i>Menko Zulhas: Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Kita Punya Waktu 2 Tahun Lagi</i>	Lambatnya pencapaian target swasembada pangan	Regulasi pangan belum optimal dan koordinasi antarlembaga masih lemah	Pemerintah harus bekerja cepat dan responif	Reformasi regulasi pangan dan percepatan target 2027	Zulkifli Hasan	“dipercepat”, “dua tahun”, “bekerja keras”	Urgensi percepatan program pangan
<i>Pemerintah Tanam 1 Juta Pohon untuk Program Ketahanan Pangan</i>	Kerusakan hutan dan lahan mengancam ketahanan pangan	Pemanfaatan hutan belum optimal dan degradasi lingkungan	Pembangunan tidak boleh merusak lingkungan	Agroforestry dan rehabilitasi hutan	Raja Juli Antoni	“rehabilitasi”, “agroforestry”, “keberlanjutan”	Ketahanan pangan berbasis lingkungan
<i>Prabowo: Kita Akan Kaget, Sebelum 4 Tahun Sudah Swasembada Pangan</i>	Keraguan publik terhadap target swasembada	Pesimisme terhadap kemampuan pemerintah	Indonesia harus percaya diri dan optimistis	Investasi besar-besaran dan pelibatan swasta	Presiden Prabowo	“kita akan kaget”, “jauh sebelum”, “investasi besar-besaran”	Optimisme pembangunan nasional

Judul Berita	Define problems	Diagnose causes	Make moral judgement	Treatment recommendation	Aktor Dominan	Diksi Kunci	Kecenderungan Framing
<i>Guru Besar IPB: Indonesia Berpotensi Swasembada Beras Tahun Ini</i>	Risiko ketidakstabilan stok dan harga gabah	Kelebihan stok beras dan ancaman perubahan iklim	Kebijakan pangan tidak boleh merugikan petani	Pengendalian stok dan stabilisasi harga gabah	Dwi Andreas Santosa	“berpotensi”, “rentan”, “anjloknya harga gabah”	Validasi akademik dengan catatan kritis
<i>Badan Bank Tanah Sudah Siapkan Lahan Demi Swasembada Pangan Prabowo</i>	Keterbatasan lahan pertanian nasional	Belum optimalnya pemanfaatan lahan potensial	Negara wajib menjamin ketersediaan lahan pangan	Penyediaan bank tanah dan ekspansi lahan	Parman Nataatmadja	“siap semuanya”, “sesegera mungkin”, “lumbung pangan dunia”	Dukungan infrastruktur terhadap swasembada
<i>Zulhas Sebut Prabowo Mau Setop Impor Beras mulai 2025, Sudah Swasembada 2027</i>	Ketergantungan Indonesia terhadap impor beras	Distribusi pupuk belum efektif dan produksi pangan belum optimal	Bangsa Indonesia harus mandiri pangan dan mengurangi ketergantungan impor	Perbaikan distribusi pupuk, percepatan swasembada, penguatan stok Bulog	Zulkifli Hasan	“setop impor”, “bekerja keras”, “stok aman”, “dua tahun”	Nasionalisme pangan dan percepatan program
<i>Alasan TNI Terjun Dampingi Program Swasembada Pangan Menurut Mentan</i>	Kekurangan tenaga penyuluh pertanian dan ancaman ketahanan pangan	Jumlah PPL tidak mencukupi dan pangan dianggap sektor vital	Semua institusi negara wajib membantu ketahanan pangan	Pelibatan TNI dalam Brigade Swasembada Pangan	Andi Amran Sulaiman	“vital”, “konflik sosial”, “motivator kedisiplinan”	Legitimasi keterlibatan militer dalam pangan

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi Kunci	Kecenderungan Framing
<i>Disaksikan Presiden Prabowo, PLN Perkuat Kolaborasi Swasembada Energi dengan China</i>	Ketergantungan energi dan kebutuhan transisi energi hijau	Keterbatasan teknologi dan investasi energi berkelanjutan	Kerja sama internasional penting demi masa depan energi	Kolaborasi PLN dengan Huawei dan SDIC Power	PLN dan Presiden Prabowo	“fondasi kuat”, “masa depan bumi”, “energi hijau”	Modernisasi energi nasional
<i>Swasembada Pangan, Setiap Polsek di Sumenep Terima 2 Ekor Kambing</i>	Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam program pangan	Ketahanan pangan belum berbasis partisipasi masyarakat	Swasembada membutuhkan gotong royong dan keterlibatan bersama	Program peternakan kambing berbasis komunitas	AKBP Henri Noveri Santoso	“sinergi aktif”, “kerja bersama-sama”, “stimulus”	Ketahanan pangan berbasis komunitas
<i>Swasembada Energi Bukan Mimpi (3)</i>	Ketahanan energi Indonesia masih bersifat semu dan rentan krisis	Ketergantungan energi fosil, lemahnya investasi EBT, infrastruktur terbatas, dan kebijakan energi tidak efektif	Negara harus serius membangun kemandirian energi demi menghadapi ancaman global	Optimalisasi bauran energi, pembangunan infrastruktur, investasi EBT, dan reformasi tata kelola energi	Penulis artikel dan Presiden Prabowo	“ketahanan energi semu”, “krisis energi senyap”, “swasembada energi”	Kritik terhadap tata kelola energi nasional
<i>Pemkot Semarang Gelar SAE 2024, Strategi Dorong Ketahanan Pangan dan</i>	Rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian dan tantangan ketahanan pangan lokal	Kurangnya edukasi pertanian modern dan minimnya integrasi sektor pangan	Ketahanan pangan membutuhkan edukasi, inovasi, dan keterlibatan masyarakat	Pameran pertanian terpadu, smart farming, dan promosi pangan lokal	Hevearita Gunaryanti Rahayu	“smart farming”, “edukasi”, “embrio swasembada pangan”	Modernisasi pertanian berbasis edukasi

Judul Berita	Define problems	Diagnose causes	Make moral judgement	Treatment recommendation	Aktor Dominan	Diksi Kunci	Kecenderungan Framing
Edukasi Pertanian							
Dukung Swasembada Pangan, Polda Riau Inisiasi Program Tanam Jagung dan Budidaya Patin	Ketahanan pangan nasional membutuhkan dukungan lintas sektor	Kondisi geografis dan kebutuhan peningkatan produksi pangan	Ketahanan pangan merupakan fondasi masyarakat sehat dan produktif	Penanaman jagung, budidaya ikan, dan kolaborasi Polri-TNI-masyarakat	Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal	“ketahanan pangan”, “Indonesia Emas 2045”, “sinergi”	Mobilisasi aparat negara untuk pangan
Pemerintah Anggarkan Rp 139,4 Triliun untuk Pangan pada 2025, Termasuk Makan Bergizi Gratis dan Cetak Sawah	Target swasembada pangan memerlukan dukungan anggaran besar dan terintegrasi	Anggaran pangan tersebar di banyak kementerian/ lembaga	Negara wajib hadir menjamin pangan masyarakat	Integrasi anggaran, cetak sawah, irigasi, pupuk, dan MBG	Menko Pangan Zulkifli Hasan	“terintegrasi”, “ketahanan pangan”, “swasembada pangan”	Negara kuat melalui dukungan fiskal
Menteri Desa PDT Minta Dana Desa Dialokasikan 20 Persen untuk Ketahanan Pangan	Desa belum optimal mendukung ketahanan pangan nasional	Dana desa belum maksimal dimanfaatkan untuk pangan	Dana desa harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat	Alokasi minimal 20 persen Dana Desa untuk pangan	Menteri Desa Yandri Susanto	“membangun dari desa”, “ketahanan pangan”, “Asta Cita”	Desa sebagai basis swasembada

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi Kunci	Kecenderungan Framing
Indonesia-Singapura Buat Kesepakatan di Bidang Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan memerlukan kerja sama internasional	Tantangan pangan membutuhkan teknologi dan praktik terbaik	Kolaborasi internasional penting bagi pembangunan pangan	Pertukaran teknologi dan praktik pertanian	Presiden Prabowo dan PM Lawrence Wong	“kolaborasi”, “praktik terbaik”, “food security”	Ketahanan pangan berbasis kerja sama global
Ungkap Peran TNI dalam Brigade Swasembada Pangan, Mentan: Sebagai Motivator Kedisiplinan	Produktivitas pangan perlu percepatan dan pendampingan	Kurangnya disiplin dan kebutuhan penguatan petani milenial	Swasembada pangan membutuhkan kerja keras dan kedisiplinan	Brigade pangan dengan pendampingan TNI	Mentan Andi Amran Sulaiman	“motivator kedisiplinan”, “petani milenial”, “brigade pangan”	Militarisasi pembangunan pangan
Jaga Ketahanan Pangan di Jakarta, Dharma Mau “Booking” Sawah di Indramayu	Jakarta memiliki keterbatasan produksi pangan	Ketergantungannya Jakarta pada pasokan luar daerah	Ketahanan pangan harus dijamin melalui kerja sama antarwilayah	Kerja sama penyediaan sawah dengan daerah penghasil pangan	Dharma Pongrekun	“booking sawah”, “kerja sama daerah”	Ketahanan pangan sebagai isu politik daerah

Judul Berita	Define problems	Diagnose causes	Make moral judgement	Treatment recommendation	Aktor Dominan	Diksi Kunci	Kecenderungan Framing
Erick Thohir Ketemu Amran Bahas Swasembada Pangan	Swasembada pangan dipandang sebagai target nasional yang membutuhkan koordinasi dan sinergi antarkementerian serta BUMN pangan	Hambatan utama berasal dari egoisme sektoral, regulasi yang rumit, distribusi pupuk yang belum optimal, serta lemahnya koordinasi antar lembaga pangan	Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama sehingga seluruh sektor harus bekerja dalam satu komando demi kepentingan nasional	Pemerintah mendorong kolaborasi lintas sektor, penyederhanaan regulasi, penguatan operasi pasar Bulog, pengawasan pupuk, dan optimalisasi lahan pangan melalui BUMN	Erick Thohir dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman	“kolaborasi”, “satu komando”, “tidak boleh egoisme sektoral”, “bergerak cepat”, “ketahanan pangan”	Kompas.com membingkai swasembada pangan sebagai proyek nasional yang membutuhkan kerja kolektif, koordinasi birokrasi, dan percepatan kebijakan pemerintah



Berdasarkan tabel tersebut, setiap berita menunjukkan cara Kompas.com membingkai isu swasembada pangan melalui penekanan pada masalah, penyebab, aktor yang terlibat, serta solusi yang ditawarkan pemerintah. Berikut pembahasan pada masing – masing berita yang dianalisis.

a) Arahan Prabowo di Rapat Kabinet Perdana, dari Program Makan Gratis hingga Swasembada Pangan”

Kompas.com membingkai swasembada pangan sebagai agenda prioritas nasional yang bergantung pada efektivitas tata kelola pemerintahan. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan ketergantungan impor pangan dan rendahnya disiplin birokrasi sebagai hambatan utama pencapaian swasembada. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada pemborosan anggaran, lemahnya kinerja aparatur, serta proyek pemerintah yang dinilai tidak berorientasi pada kepentingan publik. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa aparatur negara harus bekerja disiplin, loyal, dan bertanggung jawab dalam mendukung program pemerintah. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diwujudkan melalui reformasi birokrasi, evaluasi program kementerian, efisiensi anggaran, serta penegakan hukum. Framing tersebut menempatkan pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, sebagai aktor utama yang memiliki legitimasi untuk merealisasikan swasembada pangan.

b) “Menko Zulhas: Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Kita Punya Waktu 2 Tahun Lagi”

Kompas.com membingkai percepatan swasembada pangan sebagai respon pemerintah terhadap tantangan pangan nasional dan global. Pendefinisian masalah (*define problems*) menekankan lambatnya pencapaian target swasembada pangan. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan lemahnya regulasi, distribusi pupuk, dan koordinasi kelembagaan pangan. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa percepatan target membutuhkan komitmen dan kerja kolektif seluruh institusi pemerintah. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada reformasi kelembagaan, penyempurnaan regulasi,

serta penguatan koordinasi antarkementerian. Framing ini memperlihatkan pemerintah sebagai aktor yang proaktif dalam mengakselerasi pencapaian swasembada pangan.

c) “Pemerintah Tanam 1 Juta Pohon untuk Program Ketahanan Pangan”

Kompas.com membingkai ketahanan pangan sebagai isu yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Pendefinisian masalah menempatkan kerusakan hutan dan degradasi lahan sebagai ancaman terhadap ketahanan pangan. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan pemanfaatan lahan yang belum berkelanjutan. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa pembangunan pertanian harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada rehabilitasi hutan, penanaman pohon, dan penerapan sistem agroforestry. Framing tersebut menunjukkan bahwa pemerintah diposisikan sebagai aktor yang mengintegrasikan pembangunan pangan dengan konservasi lingkungan.

d) “Prabowo: Kita Akan Kaget, Sebelum 4 Tahun Sudah Swasembada Pangan”

Kompas.com membingkai swasembada pangan sebagai visi pembangunan nasional yang realistis dan dapat dicapai. Pendefinisian masalah (*define problems*) berfokus pada keraguan publik terhadap kemampuan pemerintah mewujudkan swasembada pangan. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan rendahnya optimisme terhadap potensi nasional. Penilaian moral (*make moral judgement*) menekankan pentingnya kepercayaan terhadap kapasitas bangsa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan pemanfaatan sumber daya nasional. Framing ini memperkuat citra Presiden sebagai pemimpin visioner yang mampu membawa Indonesia menuju kemandirian pangan.

e) “Guru Besar IPB: Indonesia Berpotensi Swasembada Beras Tahun Ini”

Kompas.com menghadirkan framing yang lebih berimbang melalui perspektif akademik. Pendefinisian masalah menempatkan keberlanjutan swasembada beras

sebagai tantangan yang berkaitan dengan stabilitas harga dan kesejahteraan petani. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan tingginya stok beras, lemahnya penyerapan gabah, dan ancaman perubahan iklim. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa keberhasilan swasembada harus tetap memperhatikan perlindungan terhadap petani. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada pengendalian stok, stabilisasi harga gabah, dan mitigasi risiko iklim. Framing ini menunjukkan bahwa pencapaian swasembada tidak hanya diukur dari produksi, tetapi juga dari keberlanjutan kesejahteraan petani.

f) “Badan Bank Tanah Sudah Siapkan Lahan Demi Swasembada Pangan Prabowo”

Kompas.com membingkai ketersediaan lahan sebagai prasyarat pencapaian swasembada pangan. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan keterbatasan lahan produktif sebagai kendala utama. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada belum optimalnya pemanfaatan lahan yang tersedia. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab menyediakan sumber daya untuk kepentingan pangan nasional. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diwujudkan melalui penyediaan bank tanah dan optimalisasi lahan pertanian. Framing tersebut memperlihatkan pemerintah sebagai aktor yang memiliki kapasitas mengelola sumber daya nasional untuk mendukung swasembada pangan.

g) “Zulhas Sebut Prabowo Mau Setop Impor Beras mulai 2025, Sudah Swasembada 2027”

Kompas.com membingkai penghentian impor beras sebagai indikator keberhasilan swasembada pangan. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan ketergantungan impor sebagai bentuk ketidakmandirian pangan nasional. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada belum optimalnya produksi dan distribusi pupuk. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa negara harus mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada penghentian impor, reformasi distribusi pupuk, serta penguatan cadangan beras nasional. Framing

ini memperkuat legitimasi pemerintah sebagai aktor yang mampu mewujudkan kemandirian pangan nasional.

h) “Alasan TNI Terjun Dampingi Program Swasembada Pangan Menurut Mentan”

Kompas.com membingkai keterlibatan TNI sebagai bagian dari strategi percepatan swasembada pangan. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan keterbatasan jumlah penyuluh pertanian sebagai hambatan peningkatan produksi pangan. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada kekurangan sumber daya manusia di sektor pertanian. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama seluruh institusi negara. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diwujudkan melalui kolaborasi Kementerian Pertanian, TNI, dan lembaga terkait dalam pendampingan petani. Framing tersebut memperluas makna ketahanan pangan sebagai bagian dari kepentingan strategis negara.

i) “Disaksikan Presiden Prabowo, PLN Perkuat Kolaborasi Swasembada Energi dengan China”

Kompas.com membingkai kerja sama internasional sebagai strategi mendukung kemandirian energi nasional. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan keterbatasan teknologi dan investasi sebagai hambatan transisi energi. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan kebutuhan penguatan kapasitas nasional di bidang energi terbarukan. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa kolaborasi internasional merupakan langkah yang sah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada pengembangan teknologi energi hijau melalui kemitraan strategis dengan pihak internasional. Framing ini menunjukkan bahwa kemandirian nasional dibangun melalui modernisasi dan kerja sama global.

j) “Swasembada Pangan, Setiap Polsek di Sumenep Terima 2 Ekor Kambing”

Kompas.com membingkai swasembada pangan sebagai tanggung jawab kolektif yang memerlukan partisipasi masyarakat. Pendefinisian masalah (*define*

problems) menempatkan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam program pangan sebagai kendala. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada belum optimalnya sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan bergantung pada kerja sama dan gotong royong. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diwujudkan melalui pemberian bantuan ternak kepada setiap polsek sebagai stimulus pengembangan peternakan berbasis komunitas. Framing tersebut menempatkan institusi kepolisian sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal.

k) “Swasembada Energi Bukan Mimpi (3)”

Artikel opini membingkai swasembada energi sebagai kebutuhan strategis yang masih menghadapi berbagai persoalan struktural. Pendefinisian masalah (*define problems*) menunjukkan bahwa ketahanan energi nasional masih rentan meskipun Indonesia memiliki sumber daya yang besar. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan ketergantungan pada energi fosil, lemahnya investasi, keterbatasan infrastruktur, dan tata kelola yang belum efektif. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa negara harus memiliki keberanian dan komitmen dalam membangun kemandirian energi. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada reformasi tata kelola, percepatan investasi energi terbarukan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan cadangan energi nasional. Framing ini bersifat kritis-konstruktif karena mendukung tujuan pemerintah mengkritisi kelemahan implementasi kebijakan.

l) “Pemkot Semarang Gelar SAE 2024, Strategi Dorong Ketahanan Pangan dan Edukasi Pertanian”

Kompas.com membingkai ketahanan pangan sebagai hasil modernisasi pertanian berbasis pendidikan dan inovasi. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian sebagai tantangan utama. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada terbatasnya edukasi pertanian modern dan rendahnya pemanfaatan teknologi. Penilaian

moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab membangun kesadaran masyarakat melalui inovasi pertanian. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diwujudkan melalui penyelenggaraan Semarang Agro Expo dan pengembangan konsep smart farming. Framing ini menempatkan pemerintah daerah sebagai penggerak modernisasi sektor pertanian.

m) “Dukung Swasembada Pangan, Polda Riau Inisiasi Program Tanam Jagung dan Budidaya Patin”

Kompas.com membingkai swasembada pangan sebagai agenda nasional yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pendefinisian masalah (*define problems*) menunjukkan bahwa penguatan produksi pangan masih menjadi kebutuhan untuk mencapai target nasional. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan kondisi geografis daerah dan perlunya peningkatan kapasitas produksi pangan. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi kesejahteraan masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada pengembangan budidaya jagung dan ikan patin melalui sinergi Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Framing tersebut memperkuat legitimasi keterlibatan aparat negara dalam pembangunan sektor pangan.

n) “Pemerintah Anggarkan Rp 139,4 Triliun untuk Pangan pada 2025, Termasuk Makan Bergizi Gratis dan Cetak Sawah”

Kompas.com membingkai anggaran negara sebagai instrumen utama pencapaian swasembada pangan. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan percepatan program pangan sebagai prioritas pembangunan nasional. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada belum optimalnya integrasi pelaksanaan program lintas sektor. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin ketersediaan pangan melalui dukungan fiskal. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diwujudkan melalui integrasi anggaran, pembangunan irigasi, distribusi pupuk, cetak sawah, dan

pelaksanaan program makan bergizi gratis. Framing ini memperlihatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam penyediaan sumber daya pembangunan pangan.

- o) “Menteri Desa PDT Minta Dana Desa Dialokasikan 20 Persen untuk Ketahanan Pangan”

Kompas.com membingkai desa sebagai basis pembangunan ketahanan pangan nasional. Pendefinisian masalah (*define problems*) menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa belum sepenuhnya mendukung sektor pangan. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada prioritas penggunaan anggaran desa yang belum berorientasi pada pemberdayaan pangan. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa Dana Desa harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada alokasi minimal 20 persen Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan program swasembada. Framing tersebut memperkuat posisi desa sebagai pelaksana kebijakan pangan nasional.

- p) “Indonesia-Singapura Buat Kesepakatan di Bidang Ketahanan Pangan”

Kompas.com membingkai kerja sama internasional sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan nasional. Pendefinisian masalah (*define problems*) menunjukkan bahwa tantangan pangan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan domestik. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan kebutuhan teknologi, inovasi, dan penguatan kapasitas produksi. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa kolaborasi antarnegara merupakan langkah yang saling menguntungkan dalam menghadapi tantangan pangan global. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada pertukaran teknologi, praktik pertanian modern, dan penguatan kerja sama bilateral. Framing ini menunjukkan bahwa kemandirian pangan dibangun melalui kolaborasi internasional.

- q) “Ungkap Peran TNI dalam Brigade Swasembada Pangan, Mentan: Sebagai Motivator Kedisiplinan”

Kompas.com membingkai keterlibatan TNI sebagai strategi peningkatan produktivitas pertanian. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan rendahnya produktivitas dan perlunya percepatan produksi pangan sebagai tantangan utama. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada rendahnya kedisiplinan dan kapasitas petani dalam mengembangkan usaha pertanian. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa disiplin dan pembinaan merupakan prasyarat keberhasilan swasembada pangan. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diwujudkan melalui pembentukan Brigade Swasembada Pangan dengan pendampingan TNI kepada petani milenial. Framing ini melegitimasi pelibatan institusi militer dalam pembangunan sektor pangan.

- r) “Jaga Ketahanan Pangan di Jakarta, Dharma Mau “Booking” Sawah di Indramayu”

Kompas.com membingkai ketahanan pangan sebagai persoalan ketersediaan pasokan bagi wilayah perkotaan. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan keterbatasan lahan pertanian di Jakarta sebagai hambatan pemenuhan kebutuhan pangan. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada tingginya ketergantungan Jakarta terhadap daerah produsen pangan. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa kerja sama antardaerah diperlukan untuk menjamin keamanan pasokan pangan. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada kemitraan dengan daerah penghasil pangan melalui skema "booking sawah". Framing pemberitaan bersifat netral karena lebih menampilkan gagasan politik tanpa memberikan legitimasi atau kritik yang kuat.

- s) “Erick Thohir Ketemu Amran Bahas Swasembada Pangan”

Kompas.com membingkai swasembada pangan sebagai agenda strategis yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Pendefinisian masalah (*define problems*) menunjukkan bahwa pencapaian swasembada masih menghadapi hambatan koordinasi antarkementerian dan BUMN. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada ego sektoral, regulasi yang kompleks, dan lemahnya tata kelola distribusi pangan. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa seluruh

institusi pemerintah harus bekerja secara terpadu untuk kepentingan nasional. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diwujudkan melalui penguatan kolaborasi kementerian dan BUMN, penyederhanaan regulasi, optimalisasi Bulog, serta pemanfaatan aset BUMN untuk produksi pangan. Framing ini menempatkan sinergi kelembagaan sebagai faktor utama keberhasilan program swasembada pangan.

Berdasarkan pandangan Hall dalam Eriyanto (2012), media tidak merefleksikan realitas secara netral, tetapi merepresentasikan realitas melalui proses seleksi dan penonjolan makna yang dipengaruhi oleh kepentingan ideologis. Dalam perspektif tersebut, analisis framing Kompas.com menunjukkan bahwa makna ideologis pemberitaan mengenai kebijakan pemerintah pada 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto dibangun melalui dominasi perspektif pemerintah pada seluruh elemen framing. Pada aspek (*define problems*), isu swasembada pangan didefinisikan sebagai persoalan ketahanan pangan nasional menurut sudut pandang pemerintah. Pada aspek penyebab masalah (*diagnose causes*) dijelaskan melalui narasi pemerintah mengenai hambatan birokrasi, distribusi pupuk, keterbatasan lahan, kelembagaan pangan, dan koordinasi antarlembaga. Pada aspek (*make moral judgement*), pemerintah diposisikan sebagai aktor yang memiliki komitmen, kapasitas, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan pangan, sedangkan pada aspek (*treatment recommendation*) solusi yang ditawarkan didominasi oleh kebijakan, program, dan strategi pemerintah. Konsistensi pola tersebut menunjukkan bahwa konstruksi realitas swasembada pangan lebih banyak dibangun melalui interpretasi pemerintah dibandingkan perspektif aktor lain.

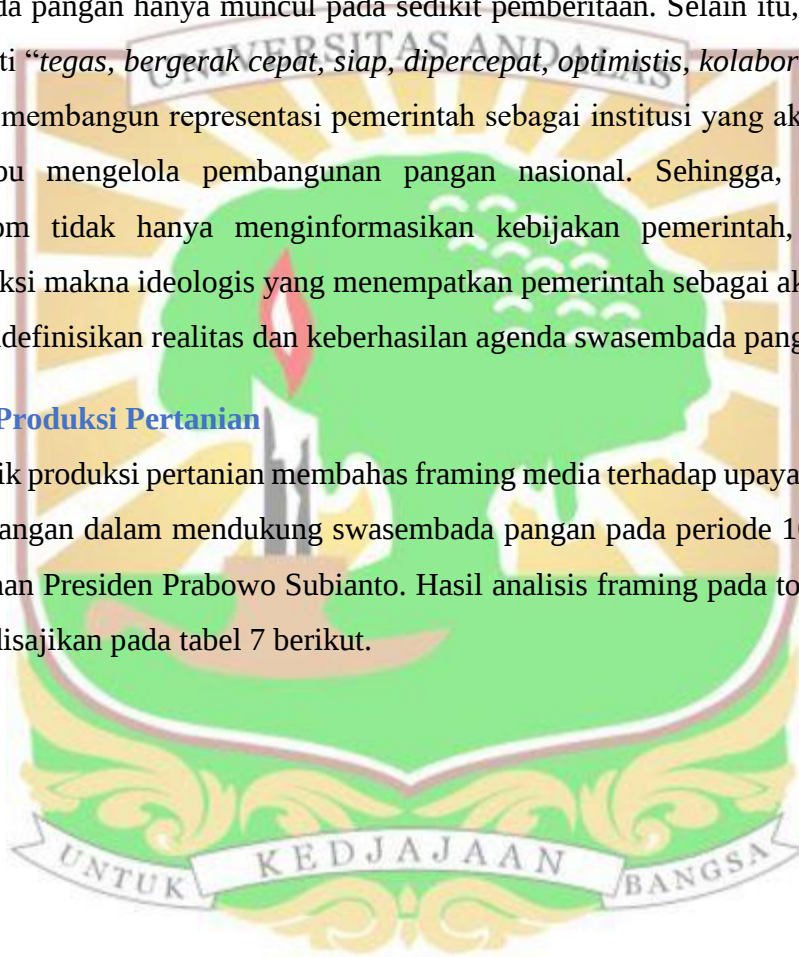
Dominasi framing tersebut menghasilkan makna ideologis berupa legitimasi terhadap kebijakan pemerintah, dominasi perspektif pemerintah dalam pembentukan realitas, serta penguatan citra pemerintah sebagai aktor utama pembangunan pangan nasional. Legitimasi dibentuk melalui penempatan kebijakan pemerintah sebagai solusi utama atas berbagai persoalan pangan, sementara alternatif kebijakan memperoleh ruang yang terbatas. Dominasi perspektif pemerintah terlihat dari penggunaan narasumber yang didominasi Presiden, menteri, kepala lembaga negara, dan pejabat

pemerintah, sedangkan akademisi, petani, masyarakat sipil, maupun pihak oposisi hanya muncul secara terbatas. Akibatnya, proses pendefinisian masalah, penjelasan penyebab, penilaian kebijakan, dan perumusan solusi lebih banyak merepresentasikan kepentingan pemerintah.

Keterbatasan representasi suara kritis semakin memperkuat konstruksi tersebut, karena evaluasi terhadap efektivitas kebijakan, potensi dampak negatif, maupun target swasembada pangan hanya muncul pada sedikit pemberitaan. Selain itu, penggunaan diksi seperti “*tegas, bergerak cepat, siap, dipercepat, optimistis, kolaborasi, dan satu komando*” membangun representasi pemerintah sebagai institusi yang aktif, responif, dan mampu mengelola pembangunan pangan nasional. Sehingga, pemberitaan Kompas.com tidak hanya menginformasikan kebijakan pemerintah, tetapi juga mereproduksi makna ideologis yang menempatkan pemerintah sebagai aktor dominan dalam mendefinisikan realitas dan keberhasilan agenda swasembada pangan.

b. Produksi Pertanian

Topik produksi pertanian membahas framing media terhadap upaya peningkatan produksi pangan dalam mendukung swasembada pangan pada periode 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil analisis framing pada topik produksi pertanian disajikan pada tabel 7 berikut.



Tabel 2. Hasil Framing 100 Hari Kerja Pemerintahan pada Topik Produksi Pertanian

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing
“Perusahaan Gas Negara PGN Dorong Swasembada Pangan lewat Budi Daya Padi Biosalin di Lahan Abrasif”	Permasalahan utama ditingkai sebagai lahan pesisir abrasif dan salinitas tinggi yang menyebabkan lahan pertanian tidak produktif serta menghambat ketahanan pangan.	Penyebab masalah dikaitkan dengan abrasi laut, tingginya kadar garam, dan kegagalan panen akibat intrusi air laut di wilayah pesisir Semarang.	Program biosalin dipandang sebagai langkah positif dan inovatif dalam mendukung swasembada pangan nasional dan kesejahteraan petani.	Solusi diarahkan pada penerapan riset padi biosalin, kolaborasi pemerintah, BRIN, PGN, TNI/Polri, serta pemanfaatan lahan tidur.	PGN, BRIN, Pemkot Semarang, Presiden Prabowo	“Ketahanan pangan”, “swasembada pangan”, “pemanfaatan lahan tidur”, “Indonesia Emas 2045”	Media membingkai pemerintah sebagai aktor progresif dan solutif dalam menghadapi krisis pangan.
“Serangan Rusia Rusak 321 Fasilitas Pelabuhan Ukraina, Berdampak pada Pangan Global”	Masalah ditingkai sebagai ancaman terhadap stabilitas pangan global akibat konflik geopolitik dan rusaknya infrastruktur pelabuhan Ukraina.	Penyebab utama adalah serangan militer Rusia terhadap pelabuhan dan jalur distribusi ekspor pangan Ukraina.	Konflik dipandang berdampak buruk terhadap negara berkembang yang bergantung pada gandum Ukraina.	Penyelesaian diarahkan pada solusi diplomatik, perlindungan jalur distribusi pangan, dan stabilitas perdagangan global.	Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Rusia, PBB	“Ketahanan pangan global”, “blokade”, “krisis pangan”, “harga pangan global”	Media membingkai pangan sebagai isu strategis global yang rentan terhadap konflik geopolitik.
“Kapal Dishub Mulai”	Permasalahan utama adalah	Penyebab masalah	Pemerintah daerah	Solusi diarahkan pada pengoperasian	Dishub DKI	“Pasokan pangan	Media membingkai

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing
<i>Distribusikan Pangan ke Kepulauan Seribu Hari Ini</i>	terganggunya distribusi pangan akibat cuaca ekstrem dan banjir rob di Kepulauan Seribu.	berasal dari gelombang tinggi dan cuaca buruk yang menghambat operasional kapal distribusi.	dipandang memiliki tanggung jawab menjaga kelancaran distribusi pangan masyarakat kepulauan.	kembali kapal distribusi dengan mempertimbangkan prakiraan cuaca BMKG.	Jakarta, BMKG, DPRD Jakarta	terganggu”, “cuaca ekstrem”, “gelombang tinggi”, “banjir rob”	pemerintah daerah sebagai pihak yang sigap menjaga stabilitas pangan masyarakat.
<i>“Loka POM Balikpapan Temukan Sejumlah Pangan Kalengan di IKN Rusak”</i>	Masalah dibingkai sebagai ancaman keamanan pangan di kawasan IKN akibat ditemukannya produk pangan rusak.	Penyebab masalah dikaitkan dengan lemahnya pengawasan distribusi dan meningkatnya permintaan pangan menjelang Nataru.	Pengawasan pangan dianggap penting untuk melindungi masyarakat dan menjaga kualitas konsumsi publik di IKN.	Solusi diarahkan pada inspeksi pangan rutin, pengawasan BPOM, dan edukasi masyarakat melalui Cek KLIK.	Loka POM Balikpapan, Otorita IKN	“Keamanan pangan”, “pengawasan”, “konsumen cerdas”, “Cek KLIK”	Media membingkai negara sebagai pengawas keamanan pangan dan pelindung masyarakat.
<i>“20 Juta Hektare Hutan Diidentifikasi Bisa Dimanfaatkan untuk Pangan hingga Energi”</i>	Permasalahan dibingkai sebagai kebutuhan perluasan sumber daya lahan untuk mendukung ketahanan pangan,	Penyebab masalah dikaitkan dengan kebutuhan peningkatan produksi pangan dan energi nasional serta ketergantungan	Pemanfaatan kawasan hutan dipandang sebagai langkah strategis pemerintah untuk mendukung swasembada pangan dan energi nasional.	Solusi diarahkan pada optimalisasi lahan hutan cadangan untuk padi gogo, bioetanol, dan pengembangan lumbung pangan hingga tingkat desa.	Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Presiden Prabowo Subianto, Kementan	“Ketahanan pangan”, “food estate”, “cadangan pangan”, “swasembada energi”	Media membingkai pemerintah sebagai aktor visioner dalam penguatan pangan dan energi nasional.

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing
“Apa Itu Brigade Pangan dan Bagaimana Cara Daftarnya?”	Masalah dibingkai sebagai rendahnya produktivitas pertanian dan perlunya percepatan swasembada pangan nasional.	Penyebab masalah dikaitkan dengan keterbatasan lahan produktif, rendahnya indeks pertanaman, dan kurangnya regenerasi petani muda.	Brigade Pangan dipandang sebagai langkah inovatif pemerintah untuk memberdayakan petani milenial dan mempercepat produksi pangan.	Solusi diarahkan pada pembentukan Brigade Pangan, cetak sawah, optimasi lahan, modernisasi pertanian, dan pendampingan TNI.	Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, TNI, petani milenial	“Swasembada pangan”, “petani milenial”, “optimasi lahan”, “modernisasi pertanian”	Media membingkai swasembada pangan sebagai proyek nasional berbasis kolaborasi negara dan generasi muda.
“Banjir Kabupaten Bandung, 1.900 Jiwa Terdampak Butuh Bantuan Pangan”	Permasalahan dibingkai sebagai gangguan terhadap kehidupan masyarakat akibat banjir yang berdampak pada kebutuhan pangan dan tempat tinggal warga.	Penyebab masalah dikaitkan dengan luapan Sungai Citalugtung dan lemahnya infrastruktur pengendalian banjir.	Pemerintah dipandang memiliki tanggung jawab memberikan bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi pascabencana.	Solusi diarahkan pada distribusi bantuan pangan, pembangunan tanggul sungai, rehabilitasi rumah, dan penanganan tanggap darurat.	BPBD Kabupaten Bandung, Pemerintah Kecamatan Banjaran, Pemprov Jawa Barat	“Bantuan pangan”, “tanggap darurat”, “rehabilitasi”, “banjir”	Media membingkai negara sebagai pelindung masyarakat dalam situasi krisis pangan akibat bencana.

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing
“Narasi dan Komodifikasi Pangan Lokal”	Permasalahan dibingkai sebagai rendahnya konsumsi pangan lokal dan dominasi budaya konsumsi beras dalam masyarakat Indonesia.	Penyebab masalah dikaitkan dengan lemahnya narasi budaya pangan lokal serta anggapan bahwa pangan lokal berada di bawah beras.	Pangan lokal dipandang sebagai identitas budaya dan sumber kemandirian pangan nasional yang harus dihargai dan dikembangkan.	Solusi diarahkan pada pembangunan narasi pangan lokal, edukasi masyarakat, penguatan UMKM pangan lokal, dan implementasi Perpres 81 Tahun 2024.	Pemerintah, komunitas pangan lokal, Maria Loretha (Mama Tata), Gita Wirjawan	“Pangan lokal”, “komodifikasi”, “kemandirian pangan”, “diversifikasi pangan”, “narasi budaya”	Media membingkai pangan lokal sebagai instrumen strategis ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
“Zulhas Targetkan Gula, Beras, dan Jagung Bisa Swasembada Sebelum 2028”	Masalah dibingkai sebagai belum tercapainya swasembada pangan nasional, khususnya pada komoditas gula, beras, dan jagung.	Penyebab masalah dikaitkan dengan defisit produksi gula dan belum optimalnya produktivitas lahan pertanian nasional.	Pemerintah dipandang serius dan optimistis dalam mempercepat swasembada pangan melalui modernisasi pertanian.	Solusi diarahkan pada optimalisasi lahan, pembukaan sawah baru, penggunaan bibit unggul, alsintan, dan peningkatan indeks pertanaman.	Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman	“Swasembada pangan”, “optimalisasi lahan”, “bibit unggul”, “produktivitas”	Media membingkai pemerintah sebagai aktor progresif dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
“BRIN Kembangkan Teknologi Nuklir Guna Deteksi Pemalsuan Pangan”	Permasalahan dibingkai sebagai maraknya pemalsuan pangan yang mengancam	Penyebab masalah dikaitkan dengan lemahnya sistem deteksi pangan dan	Teknologi nuklir dipandang sebagai inovasi ilmiah penting untuk melindungi	Solusi diarahkan pada pengembangan teknologi isotop nuklir untuk deteksi pangan serta penguatan	BRIN, BPOM	“Ketahanan pangan”, “pemalsuan pangan”, “teknologi nuklir”,	Media membingkai riset dan teknologi sebagai instrumen penting

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing
	kesehatan, ekonomi, dan ketahanan pangan.	maraknya produk pangan palsu di pasar.	konsumen dan menjaga kualitas pangan nasional.	infrastruktur laboratorium.		“keaslian pangan”	penguatan ketahanan pangan nasional.
“Menko Zulhas: Semua Produk Pangan Dalam Negeri Tidak Kena PPN 12 Persen”	Permasalahan dibingkai sebagai kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga pangan akibat penerapan PPN 12 persen.	Penyebab masalah dikaitkan dengan kebijakan kenaikan tarif PPN nasional sesuai amanat UU HPP.	Pemerintah dipandang berupaya melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas harga pangan domestik.	Solusi diarahkan pada pengecualian seluruh produk pangan dalam negeri dari kebijakan PPN 12 persen.	Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati	“Tidak ada kenaikan”, “pangan dalam negeri”, “stabilitas harga”, “PPN 12 persen”	Media membingkai pemerintah sebagai pelindung stabilitas ekonomi dan pangan masyarakat.



Berdasarkan tabel tersebut, pemberitaan produksi pertanian menunjukkan framing Kompas.com terhadap upaya peningkatan produksi pangan melalui penonjolan masalah, aktor, dan solusi pemerintah. Pembahasan framing pada masing – masing berita dijelaskan sebagai berikut.

a) “Perusahaan Gas Negara (PGN) Dorong Swasembada Pangan lewat Budi Daya Padi Biosalin di Lahan Abrasif”

Kompas.com membingkai inovasi teknologi pertanian sebagai solusi atas keterbatasan lahan produktif. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan abrasi pantai dan tingginya salinitas sebagai penyebab menurunnya produktivitas pertanian di wilayah pesisir. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada faktor lingkungan yang mengakibatkan lahan tidak lagi layak diusahakan. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa optimalisasi lahan marginal melalui inovasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, lembaga riset, dan BUMN dalam mendukung swasembada pangan. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diwujudkan melalui pengembangan padi biosalin, pemanfaatan hasil riset, serta kolaborasi lintas lembaga. Framing ini menempatkan pemerintah sebagai aktor yang adaptif terhadap tantangan produksi pangan melalui pendekatan berbasis teknologi.

b) “Serangan Rusia Rusak 321 Fasilitas Pelabuhan Ukraina, Berdampak pada Pangan Global”

Kompas.com membingkai ketahanan pangan sebagai isu yang dipengaruhi dinamika geopolitik internasional. Pendefinisian masalah (*define problems*) menunjukkan terganggunya distribusi pangan dunia akibat kerusakan infrastruktur ekspor gandum Ukraina. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada agresi militer Rusia yang menghambat rantai pasok pangan global. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa konflik bersenjata tidak hanya mengancam keamanan politik, tetapi juga memperburuk krisis pangan dunia, terutama bagi negara yang bergantung pada impor. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada penguatan diplomasi internasional dan perlindungan

jalur distribusi pangan. Framing ini memperluas makna ketahanan pangan sebagai persoalan global yang dipengaruhi stabilitas politik internasional.

c) “Kapal Dishub Mulai Distribusikan Pangan ke Kepulauan Seribu Hari Ini”

Kompas.com membingkai distribusi pangan sebagai bagian dari pelayanan publik pada situasi bencana. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan terhambatnya pasokan pangan akibat cuaca ekstrem sebagai persoalan utama. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan gelombang tinggi dan banjir rob yang mengganggu transportasi laut. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin akses pangan masyarakat meskipun menghadapi kondisi cuaca yang tidak mendukung. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada pemulihan distribusi berdasarkan rekomendasi BMKG dan penyediaan armada pendukung. Framing ini menampilkan pemerintah daerah sebagai aktor yang responif dalam menjaga stabilitas pasokan pangan.

d) “Loka POM Balikpapan Temukan Sejumlah Pangan Kalengan di IKN Rusak”

Kompas.com membingkai keamanan pangan sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Pendefinisian masalah (*define problems*) menunjukkan ditemukannya pangan rusak yang berpotensi membahayakan masyarakat. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan meningkatnya distribusi pangan menjelang hari besar keagamaan serta lemahnya pengawasan terhadap produk yang beredar. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menjamin keamanan pangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih produk yang layak konsumsi. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada pengawasan rutin, inspeksi distribusi, dan edukasi konsumen. Framing ini menempatkan negara sebagai pelindung masyarakat melalui sistem pengawasan pangan.

e) “20 Juta Hektare Hutan Diidentifikasi Bisa Dimanfaatkan untuk Pangan hingga Energi”

Kompas.com membingkai perluasan pemanfaatan lahan sebagai strategi mewujudkan swasembada pangan dan energi. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan kebutuhan lahan produktif sebagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan meningkatnya kebutuhan produksi pangan dan energi serta keterbatasan lahan yang telah dimanfaatkan. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa optimalisasi kawasan hutan harus dilakukan tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada pemanfaatan kawasan hutan untuk pengembangan pangan dan energi melalui pendekatan berbasis konservasi. Framing ini memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah dalam mengintegrasikan sektor kehutanan, pertanian, dan energi.

f) “Apa Itu Brigade Pangan dan Bagaimana Cara Daftarnya?”

Kompas.com membingkai peningkatan produksi pangan sebagai persoalan regenerasi dan modernisasi pertanian. Pendefinisian masalah (*define problems*) menunjukkan bahwa pencapaian swasembada pangan memerlukan peningkatan produktivitas pertanian secara cepat. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada rendahnya optimalisasi lahan, terbatasnya jumlah petani muda, dan masih rendahnya produktivitas pertanian. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa regenerasi petani dan modernisasi pertanian merupakan prasyarat keberhasilan swasembada pangan. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diwujudkan melalui pembentukan Brigade Pangan, optimalisasi lahan, mekanisasi pertanian, dan pendampingan petani milenial. Framing ini menempatkan negara sebagai penggerak transformasi sektor pertanian melalui inovasi, pemberdayaan generasi muda, dan kolaborasi antarlembaga.

g) “Banjir Kabupaten Bandung, 1.900 Jiwa Terdampak Butuh Bantuan Pangan”

Kompas.com membingkai ketahanan pangan dalam konteks penanggulangan bencana. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat akibat banjir sebagai persoalan utama. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada meluapnya Sungai

Citalugtug serta terbatasnya infrastruktur pengendali banjir. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada distribusi bantuan pangan, rehabilitasi permukiman, pembangunan tanggul, serta penguatan fasilitas tanggap darurat. Framing ini menempatkan negara sebagai pelindung masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan pada situasi krisis.

h) “Narasi dan Komodifikasi Pangan Lokal”

Kompas.com membingkai diversifikasi pangan sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan berbasis budaya lokal. Pendefinisian masalah (*define problems*) menunjukkan rendahnya konsumsi pangan lokal akibat dominasi beras dalam pola konsumsi masyarakat. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan lemahnya konstruksi budaya dan minimnya penguatan narasi mengenai nilai pangan lokal. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa pangan lokal merupakan bagian dari identitas budaya sebagai sumber kemandirian pangan nasional. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada edukasi masyarakat, penguatan UMKM pangan lokal, dukungan kebijakan pemerintah, serta pengembangan distribusi dan pemasaran komoditas lokal. Framing ini memperluas makna ketahanan pangan dari aspek produksi menuju aspek sosial, budaya, dan identitas nasional.

i) “Zulhas Targetkan Gula, Beras, dan Jagung Bisa Swasembada Sebelum 2028”

Kompas.com membingkai peningkatan produksi komoditas strategis sebagai prioritas pembangunan pangan nasional. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan belum tercapainya swasembada gula, beras, dan jagung sebagai tantangan utama. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada rendahnya produktivitas pertanian, keterbatasan lahan, dan belum optimalnya penggunaan teknologi budidaya. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban mempercepat pencapaian swasembada melalui modernisasi sektor pertanian. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*)

diwujudkan melalui perluasan lahan, penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, dan peningkatan intensitas tanam. Framing ini menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam percepatan produksi pangan nasional.

j) “BRIN Kembangkan Teknologi Nuklir Guna Deteksi Pemalsuan Pangan”

Kompas.com membingkai keamanan pangan sebagai persoalan yang memerlukan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendefinisian masalah (*define problems*) menunjukkan maraknya pemalsuan pangan yang mengancam kesehatan masyarakat dan kepercayaan konsumen. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan lemahnya sistem deteksi serta pengawasan terhadap keaslian produk pangan. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus didukung oleh inovasi ilmiah yang dapat menjamin keamanan pangan. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada pengembangan teknologi isotop nuklir, penguatan laboratorium pengujian, dan integrasi sistem pengawasan pangan. Framing ini menempatkan riset dan inovasi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat keamanan pangan nasional..

k) “Menko Zulhas: Semua Produk Pangan Dalam Negeri Tidak Kena PPN 12 Persen”

Kompas.com membingkai kebijakan fiskal sebagai instrumen perlindungan terhadap ketahanan pangan masyarakat. Pendefinisian masalah (*define problems*) menunjukkan kekhawatiran terhadap potensi kenaikan harga pangan akibat penerapan PPN 12 persen. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada perubahan kebijakan perpajakan nasional yang berpotensi mempengaruhi harga kebutuhan pokok. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjaga keterjangkauan harga pangan dan daya beli masyarakat. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diwujudkan melalui pengecualian produk pangan dalam negeri dari kebijakan PPN 12 persen. Framing ini memperlihatkan pemerintah sebagai aktor yang melindungi stabilitas harga pangan dan kepentingan masyarakat melalui kebijakan fiskal.

Menurut Hall dalam Eriyanto (2012), media membentuk representasi realitas melalui proses seleksi dan penonjolan makna yang mengandung kepentingan ideologis.

Berdasarkan perspektif tersebut, hasil analisis framing terhadap pemberitaan produksi pertanian pada 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan makna ideologis berupa legitimasi terhadap kebijakan pemerintah dan dominasi perspektif pemerintah.

Pada seluruh elemen framing, pemerintah menjadi aktor utama dalam mendefinisikan persoalan, menjelaskan penyebab, memberikan penilaian, serta menawarkan solusi melalui program Brigade Pangan, optimalisasi lahan, food estate, modernisasi pertanian, dan pemanfaatan teknologi. Dominasi narasumber dari kementerian, pemerintah daerah, BRIN, BPOM, dan lembaga negara memperlihatkan bahwa realitas produksi pertanian lebih banyak dikonstruksi berdasarkan perspektif pemerintah. Makna ideologis tersebut diperkuat oleh terbatasnya representasi perspektif alternatif. Pemberitaan lebih banyak menonjolkan capaian program, target produksi, dan inovasi pemerintah, sedangkan kritik terhadap implementasi kebijakan maupun pandangan akademisi, organisasi petani, pelaku usaha, dan masyarakat sipil muncul secara terbatas. Pola framing ini membangun citra pemerintah sebagai aktor yang aktif, responif, dan berkapasitas dalam mewujudkan swasembada pangan, serta menempatkan pemerintah sebagai aktor dominan dalam pembentukan realitas pemberitaan.

c. Harga Pangan

Topik harga pangan membahas framing media terhadap kondisi dan stabilitas harga pangan dalam mendukung program swasembada pangan. Hasil analisis framing pada topik harga pangan disajikan pada tabel 8 berikut.

Tabel 3. Hasil Framing 100 Hari Kerja Pemerintahan pada Topik Harga Pangan

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing Media
<i>“Gini Ratio di Jakarta Tinggi, Rano Karno: Harga Pangan Harus Murah”</i>	Masalah utama dibingkai sebagai tingginya ketimpangan sosial di Jakarta yang berdampak pada sulitnya akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan. Harga pangan diposisikan sebagai bagian dari biaya hidup yang harus ditekan pemerintah.	Penyebab masalah dikaitkan dengan tingginya gini ratio di Jakarta serta rantai distribusi pangan yang panjang sehingga harga pangan menjadi mahal bagi masyarakat bawah.	Pemerintah daerah dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rendah.	Melanjutkan program contract farming, memperpendek rantai pasok, dan melakukan operasi pasar melalui BUMD pangan secara profesional.	Rano Karno	“harga pangan harus murah”, “menurunkan biaya hidup”, “ketimpangan sosial”, “rantai pasok”	Kompas.com membingkai harga pangan sebagai persoalan kesejahteraan sosial yang memerlukan kebijakan distribusi dan intervensi negara.
<i>“Bicara soal 100 Hari Kerjanya, Prabowo: Alhamdulillah Harga Pangan dan</i>	Masalah dibingkai sebagai tantangan menjaga stabilitas ekonomi	Stabilitas harga dipandang tercapai karena kerja keras kabinet,	Pemerintah diposisikan sebagai pihak yang bekerja serius dan berpihak kepada rakyat	Melanjutkan efisiensi di berbagai sektor, pengawasan harga, koordinasi kabinet, dan	Prabowo Subianto	“harga pangan terkendali”, “efisiensi”, “kerja keras”, “kemakmuran rakyat”,	Kompas.com membingkai stabilitas harga pangan sebagai indikator keberhasilan dan legitimasi

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing Media
BBM Terkendali	nasional pada awal pemerintahan, terutama terkait harga pangan dan BBM.	pengawasan langsung pemerintah, dan efisiensi kebijakan ekonomi.	melalui upaya menjaga stabilitas harga dan menekan biaya hidup masyarakat.	peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian inflasi pangan dan energi.		“hilangkan kemiskinan”	Kecenderungan Framing Media kinerja 100 hari pemerintahan.



Berdasarkan hasil framing pada tabel tersebut, pemberitaan harga pangan menunjukkan penekanan media terhadap stabilitas harga dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pembahasan framing pada berita yang dianalisis dijelaskan sebagai berikut.

a) “Gini Ratio di Jakarta Tinggi, Rano Karno: Harga Pangan Harus Murah”

Kompas.com membingkai keterjangkauan harga pangan sebagai instrumen pengurangan kesenjangan sosial di perkotaan. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan tingginya ketimpangan ekonomi sebagai penyebab terbatasnya akses masyarakat terhadap pangan. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada distribusi pangan yang belum efisien dan tingginya biaya rantai pasok sehingga harga pangan sulit dijangkau kelompok berpendapatan rendah. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin keterjangkauan harga pangan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada perbaikan rantai distribusi, penguatan contract farming, serta operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga. Framing ini menempatkan pengendalian harga pangan sebagai instrumen kebijakan publik untuk mengurangi ketimpangan sosial.

b) “Bicara soal 100 Hari Kerjanya, Prabowo: Alhamdulillah Harga Pangan dan BBM Terkendali”

Kompas.com membingkai stabilitas harga pangan sebagai indikator keberhasilan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan stabilitas harga pangan dan BBM sebagai ukuran utama keberhasilan pengelolaan ekonomi nasional. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada efektivitas koordinasi kabinet, pengawasan pemerintah, dan kebijakan efisiensi yang mendukung pengendalian harga. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada

keberlanjutan kebijakan efisiensi, pengawasan harga, dan penguatan koordinasi antarkementerian. Framing ini membangun legitimasi terhadap pemerintah dengan menempatkan stabilitas harga pangan sebagai bukti keberhasilan tata kelola pemerintahan pada awal masa kepemimpinan.

Menurut Hall *dalam* Eriyanto (2012), media membangun representasi realitas melalui proses seleksi dan penonjolan makna yang sarat kepentingan ideologis. Berdasarkan perspektif tersebut, hasil analisis framing menunjukkan bahwa makna ideologis pemberitaan Kompas.com mengenai harga pangan pada 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto berupa legitimasi terhadap kebijakan pemerintah dan dominasi perspektif pemerintah. Pada seluruh elemen framing, pemerintah ditempatkan sebagai aktor utama dalam mendefinisikan persoalan, menjelaskan penyebab, memberikan penilaian, dan menawarkan solusi. Stabilitas harga pangan direpresentasikan sebagai indikator keberhasilan pemerintah, sedangkan kebijakan pengawasan harga, operasi pasar, efisiensi, dan perbaikan distribusi dikonstruksi sebagai solusi yang tepat. Dominasi perspektif pemerintah diperkuat oleh penggunaan narasumber yang didominasi pejabat pemerintah, sementara pandangan akademisi, pelaku pasar, organisasi masyarakat, dan kelompok konsumen hadir secara terbatas. Akibatnya, pemberitaan lebih banyak menonjolkan klaim keberhasilan dibandingkan evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Pola framing tersebut membangun citra pemerintah sebagai aktor yang mampu menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan perekonomian, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta menempatkan pemerintah sebagai aktor dominan dalam pembentukan realitas pemberitaan.

d. Infrastruktur Pertanian

Topik infrastruktur pertanian membahas framing media terhadap pembangunan sarana dan prasarana pertanian dalam mendukung swasembada pangan. Hasil analisis framing pada topik infrastruktur pertanian disajikan pada tabel 9 berikut.

Tabel 4. Hasil Framing 100 Hari Kerja Pemerintahan pada Topik Infrastruktur Pertanian

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing Media
“Wamendagri Tegaskan Pentingnya Perbaikan Irigasi untuk Wujudkan Swasembada Pangan”	Permasalahan utama pertanian diposisikan pada buruknya infrastruktur irigasi yang menghambat peningkatan hasil panen dan pencapaian swasembada pangan.	Penyebab masalah dikaitkan dengan sedimentasi yang berlangsung lama, kurangnya pemeliharaan irigasi, dan lemahnya distribusi penyerapan hasil panen petani oleh Bulog.	Pemerintah daerah dan pusat dinilai memiliki tanggung jawab besar dalam memperbaiki infrastruktur pertanian demi kesejahteraan petani dan keberhasilan program nasional.	Perbaikan irigasi secara konkret, penguatan jaringan Bulog di lapangan, koordinasi antarlembaga, dan dukungan kepala daerah terhadap swasembada pangan.	Bima Arya Sugiarto	“perbaikan irigasi”, “meningkatkan panen”, “sedimentasi”, “swasembada pangan”, “Bulog perlu diperkuat”	Kompas.com membingkai pemerintah sebagai aktor aktif yang responif terhadap persoalan pertanian melalui pendekatan teknis dan koordinatif.
“Menteri PU Tegaskan IKN Tetap Jalan, tapi Prioritas Sekarang Swasembada Pangan”	Masalah utama diposisikan pada kebutuhan mendesak Indonesia untuk mencapai swasembada pangan di tengah kondisi kekurangan	Penyebab masalah dikaitkan dengan belum optimalnya infrastruktur pertanian dan irigasi yang mendukung produksi pangan nasional.	Swasembada pangan dipandang sebagai prioritas nasional yang lebih penting dan mendesak dibanding proyek pembangunan lainnya.	Pembangunan irigasi, dukungan penuh Kementerian PU kepada Kementerian Pertanian, dan penguatan swasembada air untuk mendukung produksi pangan.	Dody Hanggodo dan Prabowo Subianto	“prioritas”, “kekurangan beras”, “support Kementan”, “swasembada air”, “arahannya swasembada pangan”	Kompas.com membingkai swasembada pangan sebagai agenda strategis nasional yang harus didukung seluruh kementerian melalui pembangunan infrastruktur pertanian.

Judul Berita	<i>Define problems</i> beras nasional.	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing Media
--------------	--	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	------------------	------------------------	--------------------------------



Berdasarkan tabel tersebut, pemberitaan infrastruktur pertanian menunjukkan framing Kompas.com terhadap pentingnya pembangunan irigasi dan sarana pertanian dalam mendukung swasembada pangan. Pembahasan framing pada masing-masing berita dijelaskan sebagai berikut.

a) “Wamendagri Tegaskan Pentingnya Perbaikan Irigasi untuk Wujudkan Swasembada Pangan”

Kompas.com membingkai infrastruktur irigasi sebagai faktor strategis dalam pencapaian swasembada pangan. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan kerusakan dan sedimentasi jaringan irigasi sebagai hambatan utama peningkatan produktivitas pertanian. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada lemahnya pemeliharaan infrastruktur irigasi serta belum optimalnya tata kelola penyerapan hasil panen oleh Bulog. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab bersama dalam menyediakan infrastruktur pertanian yang memadai untuk mendukung kesejahteraan petani. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada rehabilitasi jaringan irigasi, penguatan sistem pemeliharaan, peningkatan kapasitas Bulog dalam menyerap gabah, serta penguatan koordinasi antarlembaga. Framing ini menempatkan negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab membangun infrastruktur pertanian sebagai prasyarat keberhasilan swasembada pangan.

b) “Menteri PU Tegaskan IKN Tetap Jalan, tapi Prioritas Sekarang Swasembada Pangan”

Kompas.com membingkai pembangunan infrastruktur pertanian sebagai prioritas kebijakan nasional dalam mendukung swasembada pangan. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan belum terpenuhinya kebutuhan beras nasional sebagai tantangan utama pembangunan. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada belum optimalnya dukungan infrastruktur irigasi dan pengelolaan sumber daya air terhadap sektor pertanian. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat harus

didahulukan sebagai tanggung jawab negara tanpa menghentikan agenda pembangunan nasional lainnya. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diwujudkan melalui percepatan pembangunan irigasi, penguatan pengelolaan sumber daya air, dan sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Pertanian. Framing ini memperkuat legitimasi pemerintah dengan menempatkan pembangunan infrastruktur pertanian sebagai instrumen utama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Menurut Hall *dalam* Eriyanto (2012), media membentuk representasi realitas melalui proses seleksi dan penonjolan makna yang mengandung kepentingan ideologis. Berdasarkan perspektif tersebut, hasil analisis framing menunjukkan bahwa makna ideologis pemberitaan Kompas.com mengenai infrastruktur pertanian pada 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto berupa legitimasi terhadap kebijakan pemerintah dan dominasi perspektif pemerintah. Infrastruktur pertanian, terutama irigasi, dikonstruksi sebagai persoalan utama pencapaian swasembada pangan, sedangkan pemerintah ditempatkan sebagai aktor yang memahami penyebab masalah dan menyediakan solusi melalui pembangunan irigasi, penguatan kelembagaan, serta koordinasi antarkementerian. Dominasi perspektif pemerintah diperkuat oleh penggunaan narasumber yang hampir seluruhnya berasal dari institusi pemerintah, sementara pandangan petani, akademisi, dan masyarakat sipil memperoleh ruang yang terbatas. Akibatnya, pemberitaan lebih banyak menonjolkan komitmen dan keberhasilan pembangunan dibandingkan evaluasi terhadap efektivitas maupun tantangan implementasi kebijakan. Pola framing tersebut membangun citra pemerintah sebagai aktor yang responif, terkoordinasi, dan menjadi penggerak utama pembangunan infrastruktur pertanian dalam mendukung swasembada pangan.

e. Kelembagaan

Topik kelembagaan pertanian membahas framing media terhadap peran lembaga dan koordinasi antarinstansi dalam mendukung swasembada pangan. Hasil analisis framing pada topik kelembagaan pertanian disajikan pada tabel 10 berikut.

Tabel 5. Hasil Framing 100 Hari Kerja Pemerintahan pada Topik Kelembagaan

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing Media
“Wujudkan Swasembada Pangan Nasional, Menteri Rini Dukung Transformasi Kelembagaan Bulog”	Permasalahan utama diposisikan pada belum optimalnya kelembagaan Bulog dalam mendukung percepatan swasembada pangan nasional.	Penyebab masalah dikaitkan dengan posisi Bulog yang masih berbentuk BUMN korporasi sehingga orientasinya masih mempertimbangkan aspek profit dan belum sepenuhnya fokus pada fungsi pelayanan pangan nasional.	Negara dinilai harus memiliki lembaga pangan yang kuat, mandiri, dan berorientasi pada kepentingan nasional demi menjaga kedaulatan pangan.	Transformasi kelembagaan Bulog menjadi badan otonom di bawah Presiden, penguatan fungsi regulator dan produsen, serta pengembalian fungsi Bulog sebagai lembaga non-komersial.	Rini Widyantini, Zulkifli Hasan, dan Prabowo Subianto	“transformasi kelembagaan”, “percepatan swasembada pangan”, “berdaulat di bidang pangan”, “non-komersial”, “ketahanan pangan”	Kompas.com membingkai transformasi Bulog sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola pangan nasional demi mendukung swasembada pangan.

Berdasarkan tabel tersebut, pemberitaan kelembagaan pertanian menunjukkan framing Kompas.com terhadap pentingnya penguatan lembaga pangan dalam mendukung swasembada pangan nasional. Pembahasan framing pada berita yang dianalisis dijelaskan sebagai berikut.

a) “Wujudkan Swasembada Pangan Nasional, Menteri Rini Dukung Transformasi Kelembagaan Bulog”

Kompas.com membingkai penguatan kelembagaan Bulog sebagai prasyarat keberhasilan swasembada pangan nasional. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan belum optimalnya peran Bulog dalam menjalankan fungsi pelayanan pangan karena masih berorientasi sebagai badan usaha. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) diarahkan pada struktur kelembagaan Bulog yang dinilai belum memberikan keleluasaan dalam mengelola cadangan pangan dan menyerap hasil panen petani secara efektif. Penilaian moral (*make moral judgement*) menegaskan bahwa negara harus memiliki lembaga pangan yang kuat, berorientasi pada pelayanan publik, dan mampu menjamin kedaulatan pangan nasional. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada transformasi Bulog menjadi badan otonom di bawah Presiden guna memperkuat fungsi pengelolaan cadangan pangan, penyerapan hasil panen, dan stabilisasi pangan. Framing ini menempatkan reformasi kelembagaan Bulog sebagai instrumen strategis negara dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat peran pemerintah dalam tata kelola pangan nasional.

Menurut Hall *dalam* Eriyanto (2012), media membentuk representasi realitas melalui proses seleksi dan penonjolan makna yang mengandung kepentingan ideologis. Berdasarkan perspektif tersebut, hasil analisis framing menunjukkan bahwa makna ideologis pemberitaan Kompas.com mengenai kelembagaan pangan berupa legitimasi terhadap kebijakan pemerintah dan dominasi perspektif pemerintah. Transformasi kelembagaan pangan dikonstruksi sebagai solusi utama bagi pencapaian swasembada pangan, sementara pemerintah ditempatkan sebagai aktor yang paling berwenang menentukan arah pembenahan tata kelola pangan. Dominasi narasumber pemerintah,

dengan minimnya representasi akademisi, petani, pengamat kebijakan, dan masyarakat sipil, membatasi munculnya perspektif alternatif maupun evaluasi kritis terhadap kebijakan. Pola framing tersebut membangun citra pemerintah sebagai aktor yang memiliki kapasitas dan legitimasi dalam memperkuat kelembagaan pangan serta mewujudkan swasembada pangan nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan Kompas.com pada periode 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membingkai swasembada pangan sebagai agenda strategis nasional yang berorientasi pada percepatan kebijakan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah diposisikan sebagai aktor utama yang memiliki kapasitas menyelesaikan persoalan pangan melalui reformasi kelembagaan, perluasan lahan pertanian, penguatan anggaran, dan sinergi antarlembaga. Pemberitaan didominasi narasi optimisme terhadap program pemerintah, sehingga swasembada pangan dikonstruksikan sebagai indikator keberhasilan awal pemerintahan. Sebaliknya, persoalan implementasi di tingkat lapangan memperoleh perhatian yang lebih terbatas.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Wijaya *et al.* (2025) yang menilai pemberitaan Kompas.com berdasarkan prinsip objektivitas jurnalistik. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemberitaan memiliki faktualitas dan relevansi yang tinggi karena didukung informasi yang akurat serta sumber yang kredibel. Namun, aspek keseimbangan belum optimal karena sebagian besar berita hanya menampilkan satu sudut pandang. Fokus penelitian Wijaya *et al.* (2025) berada pada kualitas pemberitaan, sedangkan penelitian ini mengkaji konstruksi realitas melalui analisis framing.

Perbedaan fokus analisis menghasilkan temuan yang berbeda. Penelitian Wijaya *et al.* (2025) menekankan pemenuhan unsur objektivitas, sedangkan penelitian ini menunjukkan kecenderungan penonjolan pemerintah sebagai pusat penyelesaian masalah. Dominasi aktor pemerintah disertai terbatasnya representasi petani dan kelompok terdampak lainnya memperkuat konstruksi swasembada pangan sebagai keberhasilan program pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa media dapat

memenuhi standar objektivitas jurnalistik, tetapi tetap melakukan seleksi dan penonjolan aspek tertentu dalam membentuk realitas yang diterima publik.

2. 100 Hari Swasembada Pangan

a. Kebijakan Pemerintah

Topik kebijakan pemerintah mengkaji bagaimana Kompas.com mengonstruksi dan merepresentasikan berbagai kebijakan, program, serta langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Pembahasan mencakup kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan produksi pangan, penguatan dukungan terhadap petani, pengelolaan dan stabilisasi pangan, pengembangan sarana dan prasarana pertanian, serta berbagai bentuk intervensi pemerintah yang diarahkan untuk mencapai target swasembada pangan. Dalam framing, pemberitaan tidak hanya dipahami sebagai penyampaian informasi mengenai kebijakan, tetapi juga sebagai proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu sehingga membentuk cara tertentu dalam memahami kebijakan pemerintah.

Analisis pada topik ini diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan pemerintah didefinisikan sebagai bagian dari persoalan swasembada pangan, faktor yang diposisikan sebagai penyebab atau latar belakang kebijakan, bentuk penilaian terhadap kebijakan yang diberitakan, serta alternatif atau langkah penyelesaian yang ditawarkan. Oleh karena itu, pengamatan terhadap topik kebijakan pemerintah dapat menunjukkan kecenderungan media dalam membingkai peran dan respons pemerintah terhadap agenda swasembada pangan. Hasil analisis framing pada topik kebijakan pemerintah disajikan pada Tabel 11 berikut.

Tabel 6. Hasil Framing 100 Hari Swasembada Pangan pada Topik Kebijakan Pemerintah

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing
“Prabowo Umumkan Indonesia Sudah Capai Swasembada Pangan”	Swasembada pangan diposisikan sebagai keberhasilan nasional dan pencapaian strategis pemerintah	Keberhasilan dipandang berasal dari kepemimpinan Presiden Prabowo, peningkatan produksi beras, dan penghentian impor	Swasembada dinilai sebagai simbol kemandirian bangsa dan pengelolaan sumber daya nasional	Pemerintah perlu mempertahankan produksi tinggi dan menjaga stok pangan nasional	Presiden Prabowo Subianto	“mandiri”, “swasembada”, “tertinggi sepanjang sejarah”, “tidak impor”	Media membingkai pemerintah sebagai aktor sukses dalam merealisasikan janji politik pangan
“Prabowo Ingin Buktikan RI Bisa Swasembada Pangan Tiap Tahun”	Tantangan pemerintah bukan lagi mencapai swasembada, tetapi menjaga keberlanjutan setiap tahun	Penyebab optimisme berasal dari keberhasilan produksi nasional dan keyakinan pemerintah terhadap kapasitas domestik	Swasembada dipandang sebagai bukti kemampuan bangsa menghadapi kritik dan pesimisme publik	Perlu ekspansi swasembada ke komoditas lain seperti jagung, singkong, dan bawang putih	Presiden Prabowo Subianto	“kita buktikan”, “swasembada tiap tahun”, “penuh keyakinan”	Media menampilkan pemerintah sebagai aktor visioner dan percaya diri
“Mentan Yakin Papua akan Swasembada Pangan dalam 2 Tahun”	Papua diposisikan sebagai wilayah yang belum mandiri pangan dan perlu	Ketergantungan pasokan akibat rendahnya produksi lokal dan keterbatasan lahan sawah	Pemerintah dipandang memiliki tanggung jawab menghadirkan pemerataan pangan hingga	Solusi berupa pencetakan sawah baru, revitalisasi sagu, dan pembangunan pertanian regional	Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman	“mimpi”, “solusi permanen”, “swasembada Papua”	Media membingkai swasembada sebagai proyek pembangunan nasional yang inklusif

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing
	percepatan pembangunan		wilayah timur Indonesia				
“Setahun Prabowo-Gibran, Bagaimana Kondisi Program Swasembada Pangan di Kalteng?”	Program ketahanan pangan di Kalteng diposisikan sebagai proyek strategis nasional yang masih dalam tahap progres	Penyebab keberhasilan dihubungkan dengan sinergi pusat-daerah dan program cetak sawah	Dukungan daerah dianggap penting demi keberhasilan swasembada nasional	Optimalisasi lahan, diversifikasi komoditas, dan percepatan realisasi proyek pertanian	Pemprov Kalteng, Kementan RI	“komitmen penuh”, “fokus utama”, “ketahanan pangan”	Media membingkai pembangunan pangan sebagai kerja kolektif pusat dan daerah
“73 Persen Proyek Inpres Jalan Daerah untuk Dukung Swasembada Pangan”	Infrastruktur jalan diposisikan sebagai faktor penting dalam mendukung swasembada pangan	Hambatan distribusi dan konektivitas dianggap menghambat pengembangan pangan daerah	Pembangunan infrastruktur dinilai sebagai kewajiban negara untuk mendukung ekonomi masyarakat	Pembangunan jalan, konektivitas logistik, dan dukungan distribusi pangan nasional	Kementerian PU	“tulang punggung ekonomi”, “transformasi ekonomi”, “manfaat langsung”	Media membingkai swasembada pangan sebagai agenda pembangunan lintas sector
“Nazhir Sudah Terapkan Swasembada Pangan di Atas	Tanah wakaf belum optimal dimanfaatkan untuk mendukung	Keterbatasan modal, regulasi wakaf, dan minimnya optimalisasi	Pemanfaatan wakaf dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial	Optimalisasi tanah wakaf melalui pengelolaan produktif sesuai prinsip	Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan nazhir	“produktif”, “swasembada pangan”, “manfaat”, “wakaf produktif”	Media membingkai swasembada pangan sebagai tanggung jawab kolektif

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing
<i>Tanah Wakaf</i>	swasembada pangan nasional	aset wakaf produktif	dan ekonomi umat	syariah dan regulasi			berbasis keagamaan dan sosial
<i>“Mentan Amran: Getarkan Dunia, Indonesia Capai Swasembada Pangan dalam Setahun”</i>	Swasembada pangan diposisikan sebagai keberhasilan besar pemerintah Prabowo	Keberhasilan disebabkan peningkatan produksi, stok beras tinggi, dan penghentian impor	Swasembada dipandang sebagai simbol kedaulatan dan kebanggaan nasional	Pemerintah perlu mempertahankan produksi dan kesejahteraan petani	Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman	“getarkan dunia”, “berdaulat pangan”, “tertinggi sepanjang sejarah”	Media membingkai pemerintah sebagai aktor sukses yang membawa pengaruh global
<i>“Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Golkar Ungkit Swasembada Pangan”</i>	Swasembada pangan masa Orde Baru dijadikan legitimasi jasa kepemimpinan Soeharto	Keberhasilan swasembada dikaitkan dengan kepemimpinan dan kebijakan pembangunan pangan Orde Baru	Kepemimpinan yang berhasil mencapai swasembada dianggap layak dikenang sebagai jasa bangsa	Penghargaan terhadap tokoh nasional melalui gelar pahlawan nasional	Soeharto dan Partai Golkar	“berjasa besar”, “membanggakan”, “mengubah arah sejarah”	Media membingkai swasembada pangan sebagai simbol keberhasilan kepemimpinan nasional
<i>“Bicara Swasembada, Menko Zulhas: Urusan Pangan Harus Kita Perkuat...”</i>	Ketahanan pangan diposisikan sebagai kebutuhan strategis nasional untuk	Ancaman kenaikan harga dan kekurangan pasokan pangan jika produksi	Penguatan pangan dianggap sebagai kewajiban negara dalam menjamin	Pengembangan hortikultura, protein hewani, perikanan, dan food estate	Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan	“harus kita perkuat”, “surplus”, “ketahanan pangan”	Media membingkai swasembada sebagai strategi pembangunan ekonomi dan sosial

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing
	memenuhi kebutuhan masyarakat	tidak diperkuat	kesejahteraan masyarakat				
“Zulhas Soroti Peran Uni Eropa dalam Kerja Sama Swasembada Pangan”	Swasembada pangan membutuhkan dukungan teknologi dan kerja sama internasional	Keterbatasan teknologi, mekanisasi, dan kebutuhan modernisasi pertanian	Kerja sama global dipandang penting demi pembangunan pangan berkelanjutan	Kolaborasi internasional, mekanisasi pertanian, dan proyek sawah baru	Zulkifli Hasan dan Uni Eropa	“berkelanjutan”, “mekanisasi”, “kerja sama”, “teknologi”	Media membingkai swasembada pangan sebagai agenda global dan berkelanjutan
“MBG hingga Swasembada Pangan Bakal Jadi Pembahasan di Retreat Hambalang”	Program strategis pemerintah perlu dievaluasi untuk memastikan keberlanjutan swasembada pangan dan MBG	Kendala pelaksanaan program serta kebutuhan percepatan target swasembada	Evaluasi program dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat	Evaluasi lintas kementerian, percepatan target pangan dan energi, serta penguatan hilirisasi	Presiden Prabowo dan Mensesneg Prasetyo Hadi	“evaluasi”, “percepatan”, “peningkatan”, “swasembada”	Media membingkai pemerintah sebagai aktor yang adaptif dan terorganisasi
“Genjot Swasembada Pangan, 100 Kampung Nelayan Disiapkan di Jateng”	Ketahanan pangan nasional tidak hanya bergantung pada pertanian, tetapi juga	Kebutuhan protein nasional dan kesejahteraan nelayan yang perlu ditingkatkan	Penguatan sektor perikanan dipandang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan	Pembangunan kampung nelayan terpadu, tambak, dan fasilitas perikanan modern	Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan	“kampung nelayan”, “protein”, “ketahanan pangan”, “kesejahteraan”	Media membingkai swasembada sebagai agenda multidimensi lintas sektor

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing
	sektor perikanan		masyarakat pesisir				
“3 Menteri Prabowo Dinilai Sukses Kawal Swasembada Pangan”	Swasembada pangan diposisikan sebagai indikator keberhasilan pemerintahan Prabowo	Keberhasilan disebabkan sinergi antar kementerian dan penurunan impor pangan	Pemerintah dinilai berhasil menjamin ketersediaan pangan masyarakat	Penguatan koordinasi pusat-daerah, distribusi pangan, dan dukungan infrastruktur	Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan	“sukses”, “sinergi”, “ketersediaan pangan”, “terjangkau”	Media membingkai swasembada pangan sebagai keberhasilan kolektif pemerintahan
“Pekerjaan Rumah untuk Swasembada Pangan, 62 Kampung di Jawa Tengah Siap Jadi Penopang Pangan Biru”	Ketahanan pangan nasional masih membutuhkan penguatan sektor perikanan dan pangan biru	Rendahnya kualitas pengelolaan perikanan tradisional, tambak mangkrak, dan minimnya hilirisasi	Pembangunan kampung nelayan dipandang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan ekonomi daerah	Pembangunan KNMP, kampung budidaya, revitalisasi tambak, dan modernisasi perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah	“pangan biru”, “ekosistem”, “hilirisasi”, “berkelanjutan”	Media membingkai swasembada pangan sebagai agenda ekonomi biru dan pembangunan berkelanjutan
“Prabowo Ingin Ada Swasembada Pangan Tiap Daerah: Harus Ada	Ketergantungan antarwilayah dan ancaman krisis pangan daerah menjadi	Faktor geografis, bencana alam, dan tingginya biaya logistik pangan	Swasembada daerah dipandang sebagai kunci ketahanan dan keberlangsungan bangsa	Pembangunan lumbung pangan desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi	Presiden Prabowo Subianto	“lumbung desa”, “survival bangsa”, “aman pangan”, “nenek moyang”	Media membingkai swasembada pangan sebagai strategi survival nasional berbasis lokal

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing
<i>Lambung Desa</i>	tantangan nasional						
<i>“Mentan Klaim Swasembada Beras Tercapai pada Akhir Tahun 2025”</i>	Indonesia sebelumnya menghadapi ketergantungan impor dan tantangan produksi pangan	Dukungan regulasi, pembiayaan, dan arahan Presiden mempercepat swasembada	Keberhasilan swasembada dipandang sebagai lompatan besar pemerintahan	Peningkatan produksi pangan dan pembangunan ekosistem peternakan rakyat	Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman	“lompatan besar”, “dukungan penuh”, “swasembada”, “gagasan besar”	Media membingkai pemerintah sebagai aktor efektif dalam percepatan kebijakan pangan
<i>“Prabowo Ungkap Target Swasembada Beras 4 Tahun, Tercapai dalam Setahun”</i>	Indonesia menghadapi ancaman ketergantungan impor beras di tengah konflik global	Ketidakstabilan geopolitik negara pemasok beras dan kebutuhan memperkuat cadangan pangan nasional	Swasembada pangan dipandang sebagai syarat kemerdekaan dan kedaulatan bangsa	Penguatan produksi nasional dan perluasan swasembada ke komoditas lain	Prabowo Subianto	“swasembada”, “kedaulatan pangan”, “tertinggi sepanjang sejarah”, “bangga”	Media membingkai pemerintah sebagai aktor sukses dalam menjaga kedaulatan pangan nasional
<i>“Zulhas: RI Sudah Swasembada Beras, Tahun Lalu Impor 4,5 Juta Ton, Sekarang Nol”</i>	Ketergantungan impor pangan sebelumnya dianggap mengancam ketahanan pangan nasional	Perbaikan irigasi, pupuk, kebijakan harga, dan kerja lintas sektor meningkatkan produksi pangan	Keberhasilan swasembada dipandang sebagai hasil kerja keras pemerintah yang berpihak pada petani	Penguatan produksi, peningkatan kesejahteraan petani, dan stabilisasi harga pangan	Zulkifli Hasan	“nol impor”, “kerja keras”, “stok aman”, “peningkatan signifikan”	Media membingkai keberhasilan swasembada sebagai hasil kebijakan pemerintah yang efektif

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing
“Setahun Prabowo-Gibran: Janji Swasembada Pangan Diuji Realita, Fondasi Mulai Mengakar”	Swasembada pangan belum sepenuhnya tercapai karena masih ada persoalan harga, distribusi, dan konsumsi	Perubahan iklim, tingginya harga pangan, dan ketergantungan pada beras	Keberhasilan produksi diapresiasi, tetapi ketahanan pangan harus dilihat secara menyeluruh	Diversifikasi pangan, penguatan jagung dan protein, serta keterlibatan pemerintah daerah	Andi Amran Sulaiman dan Hermanto Siregar	“fondasi mulai mengakar”, “tantangan”, “diversifikasi”, “ketahanan pangan”	Media membingkai swasembada pangan secara lebih kritis dan realistis
“Bapanas: Indonesia Swasembada Beras, Stok Awal Tahun 12,5 Juta Ton”	Pemerintah perlu menjamin ketersediaan stok pangan nasional tanpa impor	Dukungan produksi nasional dan kebijakan penghentian impor meningkatkan stok beras	Tingginya stok beras dipandang sebagai keberhasilan nasional yang patut disyukuri	Menjaga produksi nasional, memperkuat stok cadangan, dan melanjutkan kebijakan tanpa impor	Badan Pangan Nasional dan Andi Amran Sulaiman	“stok sangat aman”, “swasembada”, “tanpa impor”, “tertinggi sepanjang sejarah”	Media membingkai keberhasilan stok pangan sebagai legitimasi keberhasilan kebijakan pemerintah
“50 Jalan Tol Masuk Daftar PSN Demi Swasembada Pangan, Energi, dan Air”	Permasalahan utama dibingkai sebagai belum optimalnya konektivitas nasional yang menghambat	Hambatan logistik, ketimpangan konektivitas wilayah, dan lambannya distribusi hasil produksi pangan	Pembangunan infrastruktur dipandang sebagai langkah strategis dan penting demi pemerataan ekonomi nasional serta	Pemerintah menetapkan 50 jalan tol sebagai PSN untuk mempercepat distribusi pangan dan menekan biaya	Pemerintah pusat, Presiden Prabowo, Menko Perekonomian, Menko Pangan	“Akselerasi”, “visi besar”, “konektivitas efisien”, “prioritas tertinggi”, “tulang punggung”	Media membingkai swasembada pangan sebagai agenda nasional yang harus ditopang pembangunan infrastruktur besar-besaran.

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing
	distribusi pangan, energi, dan air.	dianggap sebagai penyebab belum tercapainya swasembada secara merata.	penguatan ketahanan pangan.	logistik nasional.			
“Ekonom UI Sebut Rangkap Jabatan Amran Sulaiman Dapat Percepat Swasembada Pangan Nasional”	Permasalahan dibingkai pada lambannya koordinasi birokrasi pangan antara sektor hulu dan hilir.	Tumpang tindih kewenangan, lemahnya integrasi data pangan, dan birokrasi panjang dianggap menghambat pencapaian swasembada pangan.	Rangkap jabatan Amran dinilai sebagai langkah rasional dan efektif untuk mempercepat koordinasi kebijakan pangan nasional.	Integrasi Kementan dan Bapanas serta digitalisasi data pangan dinilai menjadi solusi percepatan swasembada.	Andi Amran Sulaiman, Presiden Prabowo, ekonom UI Ninasapti Triaswati	“Mempercepat”, “selaras”, “integrasi”, “efektif”, “berkelanjutan”	Media membingkai kebijakan pemerintah sebagai bentuk reformasi kelembagaan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
“Umumkan Swasembada, Prabowo: Tak Masuk Akal, RI Kaya tapi Impor Pangan Terus”	Permasalahan utama dibingkai sebagai ironi bangsa agraris yang selama ini masih bergantung	Ketergantungan impor dan ketidakmampuan memanfaatkan kekayaan alam dianggap sebagai akar persoalan	Swasembada pangan diposisikan sebagai bentuk kedaulatan bangsa dan keadilan bagi rakyat Indonesia.	Pemerintah menegaskan pentingnya peningkatan produksi nasional dan penghentian impor pangan.	Presiden Prabowo, Bapanas, petani Indonesia	“Tidak masuk akal”, “negara kaya”, “impor terus”, “kedaulatan”, “kerja keras”	Media membingkai keberhasilan swasembada sebagai simbol keberhasilan kepemimpinan dan kemandirian nasional.

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing
	pada impor pangan.	pangan nasional.					



Berdasarkan tabel tersebut, pemberitaan kebijakan pemerintah menunjukkan framing Kompas.com terhadap upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan melalui penonjolan kebijakan, aktor, dan capaian pemerintah. Pembahasan framing pada masing – masing berita dijelaskan sebagai berikut.

a) “Prabowo Umumkan Indonesia Sudah Capai Swasembada Pangan”

Kompas.com membingkai swasembada pangan sebagai keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan persoalan pangan sebagai isu yang berhasil diatasi melalui tercapainya swasembada beras tahun 2025. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan peningkatan produksi beras, penghentian impor beras konsumsi, serta kepemimpinan Presiden Prabowo. Penilaian moral (*make moral judgement*) menempatkan swasembada sebagai simbol kemandirian dan keberhasilan pemerintah memenuhi kebutuhan pangan nasional. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada upaya mempertahankan produksi dan menjaga stok pangan agar swasembada berkelanjutan. Framing ini membangun legitimasi terhadap keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo.

b) “Prabowo Ingin Buktikan RI Bisa Swasembada Pangan Tiap Tahun”

Kompas.com membingkai swasembada pangan sebagai agenda pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan tantangan utama pada kemampuan mempertahankan swasembada setiap tahun. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan keberhasilan produksi pangan sebelumnya dan optimisme Presiden Prabowo terhadap kapasitas nasional. Penilaian moral (*make moral judgement*) menampilkan swasembada sebagai bukti kemampuan bangsa menghadapi pesimisme dan kritik. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada perluasan swasembada ke berbagai komoditas pangan. Framing ini membangun citra pemerintah sebagai pemimpin yang visioner dan berorientasi jangka panjang.

c) “Mentan Yakin Papua akan Swasembada Pangan dalam 2 Tahun”

Kompas.com membingkai Papua sebagai wilayah yang perlu ditransformasikan menuju kemandirian pangan. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan rendahnya produksi pangan lokal sebagai penyebab ketergantungan pasokan dari luar daerah. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan keterbatasan lahan sawah dan belum optimalnya pemanfaatan potensi pangan lokal. Penilaian moral (*make moral judgement*) menempatkan pemerataan ketahanan pangan sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh wilayah Indonesia. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada pencetakan sawah baru, revitalisasi sagu, dan penguatan pangan lokal. Framing ini menampilkan swasembada sebagai bagian dari pemerataan pembangunan nasional.

d) “Setahun Prabowo-Gibran, Bagaimana Kondisi Program Swasembada Pangan di Kalteng?”

Kompas.com membingkai Kalimantan Tengah sebagai kawasan strategis dalam mendukung swasembada pangan nasional. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan peningkatan produksi pangan sebagai kebutuhan utama melalui pengembangan lahan pertanian. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program. Penilaian moral (*make moral judgement*) memandang dukungan pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen terhadap agenda ketahanan pangan nasional. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada percepatan cetak sawah, optimalisasi lahan, dan diversifikasi komoditas. Framing ini memperkuat pandangan bahwa swasembada merupakan agenda pembangunan bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

e) “73 Persen Proyek Inpres Jalan Daerah untuk Dukung Swasembada Pangan”

Kompas.com membingkai pembangunan infrastruktur sebagai prasyarat keberhasilan swasembada pangan. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan lemahnya konektivitas sebagai hambatan distribusi pangan dan pengembangan ekonomi daerah. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan keterbatasan kualitas jalan dan akses transportasi. Penilaian moral

(*make moral judgement*) memposisikan pembangunan infrastruktur sebagai tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada pembangunan jalan daerah, penguatan konektivitas logistik, dan kolaborasi antarpemerintah. Framing ini memperluas makna swasembada pangan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur nasional.

f) “Nazhir Sudah Terapkan Swasembada Pangan di Atas Tanah Wakaf”

Kompas.com membingkai swasembada pangan sebagai tanggung jawab bersama yang melibatkan lembaga keagamaan dan masyarakat. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan belum optimalnya pemanfaatan tanah wakaf sebagai kendala dalam mendukung produksi pangan. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan keterbatasan modal, kapasitas nazhir, dan regulasi pengelolaan wakaf. Penilaian moral (*make moral judgement*) menempatkan wakaf produktif sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada optimalisasi pengelolaan tanah wakaf melalui kolaborasi berbagai pihak. Framing ini memperlihatkan bahwa swasembada pangan dapat didukung melalui pendekatan sosial keagamaan.

g) “Mentan Amran: Getarkan Dunia, Indonesia Capai Swasembada Pangan dalam Setahun”

Kompas.com membingkai swasembada pangan sebagai pencapaian nasional yang menunjukkan keberhasilan pemerintah. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan ketergantungan impor dan rendahnya produksi sebagai persoalan yang berhasil diatasi. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan peningkatan produksi beras, tingginya stok nasional, penghentian impor, dan kebijakan pemerintah. Penilaian moral (*make moral judgement*) menempatkan swasembada sebagai simbol kedaulatan pangan, kebanggaan nasional, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan petani. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada keberlanjutan produksi dan perlindungan

kesejahteraan petani. Framing ini membangun citra pemerintah sebagai aktor utama keberhasilan swasembada pangan.

h) “Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Golkar Ungkit Swasembada Pangan”

Kompas.com membingkai swasembada pangan sebagai dasar legitimasi sejarah kepemimpinan Soeharto. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan keberhasilan pembangunan pangan masa Orde Baru sebagai capaian yang perlu memperoleh pengakuan negara. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan kepemimpinan Soeharto dalam pembangunan sektor pangan. Penilaian moral (*make moral judgement*) menempatkan keberhasilan swasembada sebagai alasan normatif pemberian gelar pahlawan nasional. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada pemberian penghargaan negara atas jasa pembangunan pangan. Framing ini menggunakan swasembada pangan sebagai instrumen legitimasi historis terhadap kepemimpinan masa lalu.

i) “Bicara Swasembada, Menko Zulhas: Urusan Pangan Harus Kita Perkuat...”

Kompas.com membingkai swasembada pangan sebagai strategi pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan ancaman kekurangan pangan akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat sebagai persoalan utama. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan kapasitas produksi nasional yang belum mampu mengimbangi permintaan pangan. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada pengembangan hortikultura, peternakan, perikanan, food estate, serta diversifikasi pangan. Framing ini memperlihatkan bahwa swasembada pangan diposisikan sebagai strategi pembangunan lintas sektor.

j) “Zulhas Soroti Peran Uni Eropa dalam Kerja Sama Swasembada Pangan”

Kompas.com membingkai swasembada pangan sebagai agenda nasional yang memerlukan dukungan kerja sama internasional. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan keterbatasan teknologi dan modernisasi pertanian sebagai kendala pencapaian swasembada berkelanjutan. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan rendahnya kapasitas mekanisasi, inovasi, dan teknologi pertanian domestik. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan kerja sama internasional sebagai langkah rasional untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada kolaborasi dengan Uni Eropa dalam pengembangan teknologi, mekanisasi, varietas unggul, dan pencetakan sawah baru. Framing ini memperlihatkan bahwa swasembada pangan diposisikan sebagai agenda pembangunan yang terintegrasi dengan kerja sama global.

k) “MBG hingga Swasembada Pangan Bakal Jadi Pembahasan di Retreat Hambalang”

Kompas.com membingkai swasembada pangan sebagai program strategis yang memerlukan evaluasi dan koordinasi berkelanjutan. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan perlunya evaluasi program prioritas untuk memastikan pencapaian target pemerintah. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan berbagai kendala implementasi yang memerlukan koordinasi lintas kementerian. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan evaluasi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada penguatan koordinasi kabinet, percepatan program strategis, dan keberlanjutan kebijakan swasembada pangan. Framing ini membangun citra pemerintah sebagai aktor yang adaptif dan terorganisasi dalam mengelola program nasional.

l) “Genjot Swasembada Pangan, 100 Kampung Nelayan Disiapkan di Jateng”

Kompas.com membingkai swasembada pangan sebagai agenda lintas sektor yang mencakup pertanian, perikanan, dan pemenuhan kebutuhan protein masyarakat. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan peningkatan kebutuhan pangan

dan protein sebagai tantangan ketahanan pangan nasional. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan perlunya peningkatan produksi perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan pembangunan kampung nelayan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pesisir. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada pembangunan kampung nelayan terpadu, pengembangan tambak, dan penyediaan infrastruktur perikanan modern. Framing ini memperluas makna swasembada pangan hingga mencakup sektor perikanan dan pembangunan ekonomi pesisir.

m) “3 Menteri Prabowo Dinilai Sukses Kawal Swasembada Pangan”

Kompas.com membingkai swasembada pangan sebagai hasil sinergi lintas kementerian dalam pemerintahan. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan penyediaan pangan dan pengurangan ketergantungan impor sebagai tantangan utama pemerintah. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan dalam produksi, distribusi, dan stabilitas pangan. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan keberhasilan tersebut sebagai bukti efektivitas kinerja pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada penguatan koordinasi pusat dan daerah, perbaikan distribusi, serta dukungan infrastruktur logistik. Framing ini membangun legitimasi terhadap keberhasilan kolektif pemerintahan dalam sektor pangan.

n) “Pekerjaan Rumah untuk Swasembada Pangan, 62 Kampung di Jawa Tengah Siap Jadi Penopang Pangan Biru”

Kompas.com membingkai swasembada pangan sebagai agenda pembangunan yang mencakup sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan rendahnya produktivitas dan pengelolaan sektor perikanan sebagai hambatan ketahanan pangan. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan keterbatasan fasilitas, rendahnya hilirisasi, dan

kerusakan kawasan budidaya. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan pembangunan kampung nelayan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pesisir dan pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada revitalisasi tambak, pembangunan fasilitas perikanan, serta penerapan teknologi budidaya. Framing ini memperlihatkan bahwa swasembada pangan diposisikan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.

- o) “Prabowo Ingin Ada Swasembada Pangan Tiap Daerah: Harus Ada Lumbung Desa”

Kompas.com membingkai swasembada pangan sebagai strategi pertahanan nasional yang dimulai dari kemandirian pangan daerah. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan ketergantungan distribusi antardaerah sebagai ancaman terhadap ketahanan pangan nasional. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia, tingginya biaya distribusi, dan potensi gangguan akibat bencana. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan swasembada pangan sebagai syarat keberlangsungan bangsa dan bagian dari nilai kearifan lokal. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada pembangunan lumbung pangan di setiap daerah serta pengembangan komoditas sesuai potensi wilayah. Framing ini menegaskan bahwa kemandirian pangan lokal merupakan fondasi ketahanan pangan nasional.

- p) “Mentan Klaim Swasembada Beras Tercapai pada Akhir Tahun 2025”

Kompas.com membingkai swasembada beras sebagai keberhasilan percepatan kebijakan pemerintah. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan ketergantungan impor dan rendahnya produksi sebagai persoalan yang berhasil diatasi. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan dukungan regulasi, pembiayaan, serta arahan Presiden Prabowo dalam mempercepat pencapaian target. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan keberhasilan swasembada sebagai bukti efektivitas kebijakan pemerintah di sektor pangan. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada penguatan produksi beras

dan pengembangan ekosistem peternakan rakyat melalui dukungan sarana produksi dan kebijakan harga. Framing ini membangun citra pemerintah sebagai aktor yang mampu mempercepat pencapaian kemandirian pangan nasional.

q) “Prabowo Ungkap Target Swasembada Beras 4 Tahun, Tercapai dalam Setahun”

Kompas.com membingkai swasembada beras sebagai pencapaian strategis yang memperkuat kedaulatan pangan nasional. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan ketergantungan impor dan ketidakpastian kondisi global sebagai ancaman terhadap keamanan pangan. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan peningkatan produksi nasional serta kebijakan pemerintah dalam mempercepat target swasembada. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan swasembada sebagai simbol keberhasilan negara dalam menjaga kedaulatan pangan. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada penguatan produksi nasional, diversifikasi komoditas, dan peningkatan cadangan pangan. Framing ini memperkuat legitimasi pemerintah melalui narasi keberhasilan pembangunan pangan.

r) “Zulhas: RI Sudah Swasembada Beras, Tahun Lalu Impor 4,5 Juta Ton, Sekarang Nol”

Kompas.com membingkai swasembada beras sebagai hasil keberhasilan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan ketergantungan impor sebagai persoalan utama yang berhasil diatasi. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan pembenahan irigasi, distribusi pupuk, kebijakan harga gabah, dan dukungan pemerintah terhadap petani. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan penghentian impor sebagai indikator keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada keberlanjutan produksi, penguatan kesejahteraan petani, dan stabilisasi harga pangan. Framing ini membangun legitimasi terhadap kinerja pemerintah melalui narasi keberhasilan swasembada beras.

- s) “Setahun Prabowo-Gibran: Janji Swasembada Pangan Diuji Realita, Fondasi Mulai Mengakar”

Kompas.com membingkai swasembada pangan sebagai agenda strategis yang telah menunjukkan kemajuan, tetapi masih menghadapi tantangan struktural. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan ketahanan pangan sebagai isu yang belum sepenuhnya tercapai akibat persoalan harga, distribusi, konsumsi pangan, dan perubahan iklim. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan tingginya harga beras, ketergantungan pada satu komoditas, serta belum optimalnya diversifikasi pangan. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan keberhasilan produksi beras sebagai capaian yang perlu diapresiasi, namun swasembada dinilai harus diukur melalui keberlanjutan dan diversifikasi pangan. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada pengembangan pangan lokal, peningkatan produksi jagung, dan penguatan peran pemerintah daerah dalam ketahanan pangan. Framing ini menunjukkan pendekatan yang lebih evaluatif dan kritis dibandingkan pemberitaan lainnya.

- t) “Bapanas: Indonesia Swasembada Beras, Stok Awal Tahun 12,5 Juta Ton”

Kompas.com membingkai tingginya stok beras nasional sebagai indikator utama keberhasilan swasembada pangan. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan kebutuhan menjaga ketersediaan stok pangan sebagai prasyarat ketahanan pangan nasional. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan peningkatan produksi beras, penghentian impor, dan kebijakan pemerintah yang mendukung petani. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan stok beras yang tinggi sebagai bukti keberhasilan pemerintah dalam menjamin keamanan pangan nasional. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada penguatan cadangan pangan, keberlanjutan kebijakan tanpa impor, dan peningkatan kesejahteraan petani. Framing ini membangun legitimasi terhadap keberhasilan pemerintah melalui narasi keamanan stok pangan nasional.

- u) “50 Jalan Tol Masuk Daftar PSN Demi Swasembada Pangan, Energi, dan Air”

Kompas.com membingkai pembangunan infrastruktur sebagai faktor strategis dalam mewujudkan swasembada pangan. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan distribusi pangan dan konektivitas nasional sebagai hambatan utama ketahanan pangan. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan tingginya biaya logistik dan belum meratanya konektivitas antardaerah. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan pembangunan jalan tol sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemerataan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada percepatan pembangunan jalan tol, penyederhanaan perizinan, percepatan pembebasan lahan, dan integrasi kebijakan infrastruktur dengan sistem pangan nasional. Framing ini menempatkan infrastruktur sebagai instrumen utama dalam mendukung swasembada pangan.

v) “Ekonom UI Sebut Rangkap Jabatan Amran Sulaiman Dapat Percepat Swasembada Pangan Nasional”

Kompas.com membingkai reformasi kelembagaan sebagai strategi mempercepat pencapaian swasembada pangan. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan lemahnya koordinasi kebijakan pangan sebagai hambatan utama pengelolaan sektor pangan nasional. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan terpisahnya kewenangan produksi dan distribusi pangan, lemahnya integrasi data, serta birokrasi yang panjang. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan rangkap jabatan Menteri Pertanian dan Kepala Bapanas sebagai langkah yang efektif untuk meningkatkan koordinasi kebijakan. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada integrasi kelembagaan, pemanfaatan sistem digital pangan, dan penggunaan data terintegrasi dalam pengambilan kebijakan. Framing ini membangun legitimasi terhadap reformasi birokrasi sebagai solusi percepatan swasembada pangan.

w) “Umumkan Swasembada, Prabowo: Tak Masuk Akal, RI Kaya tapi Impor Pangan Terus”

Kompas.com membingkai swasembada pangan sebagai simbol kedaulatan nasional dan keberhasilan pemerintah mengurangi ketergantungan impor. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan ketergantungan impor sebagai persoalan yang bertentangan dengan potensi sumber daya Indonesia. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan belum optimalnya pengelolaan sumber daya pangan domestik pada periode sebelumnya. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan penghentian impor sebagai wujud kedaulatan pangan dan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan nasional. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada peningkatan produksi domestik, penguatan cadangan beras, dan keberlanjutan kebijakan swasembada pangan. Framing ini membangun legitimasi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo melalui narasi keberhasilan penghentian impor dan penguatan kemandirian pangan nasional.

Menurut Hall dalam Eriyanto (2012), media merepresentasikan realitas melalui proses seleksi dan penonjolan makna yang dipengaruhi oleh kepentingan ideologis. Berdasarkan perspektif tersebut, hasil analisis framing Kompas.com 100 hari swasembada pangan pada topik kebijakan pemerintah menunjukkan makna ideologis berupa legitimasi terhadap keberhasilan pemerintah dan dominasi perspektif pemerintah. Presiden, menteri, dan lembaga negara menjadi aktor utama dalam mendefinisikan persoalan, menjelaskan penyebab, memberikan penilaian, serta menawarkan solusi. Keberhasilan swasembada beras, penghentian impor, peningkatan produksi, pembangunan infrastruktur, modernisasi pertanian, dan penguatan koordinasi antarkementerian dikonstruksi sebagai bukti efektivitas kebijakan pemerintah.

Dominasi perspektif pemerintah diperkuat oleh terbatasnya representasi akademisi, petani, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok kritis. Akibatnya, pemberitaan lebih banyak menonjolkan capaian dan optimisme pemerintah dibandingkan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Pola framing tersebut membangun citra pemerintah sebagai aktor yang kompeten, responif, dan berkapasitas mewujudkan swasembada pangan, serta mereproduksi wacana yang memperkuat legitimasi pemerintah melalui dominasi narasi resmi.

b. Harga Pangan

Topik harga pangan membahas framing media terhadap stabilitas dan keterjangkauan harga pangan dalam mendukung swasembada pangan nasional. Hasil analisis framing pada topik harga pangan disajikan pada tabel 12 berikut.



Tabel 7. Hasil Framing 100 Hari Swasembada Pangan pada Topik Harga Pangan

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing
<i>“Masyarakat Padati Gerakan Pangan Murah di Pelalawan yang Diinisiasi Anggota DPD Sewitri”</i>	Tingginya harga kebutuhan pokok membebani masyarakat menengah ke bawah.	Kenaikan harga pangan dan keterbatasan akses masyarakat terhadap bahan pokok murah.	Program pangan murah dipandang sebagai bentuk kepedulian sosial dan solusi nyata bagi masyarakat.	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin melalui sinergi pemerintah dan lembaga masyarakat.	Sewitri, Bapanas, Pemprov Riau, masyarakat	“membantu”, “solusi nyata”, “partisipasi tinggi”, “stabilitas harga”	Media membingkai pemerintah dan tokoh politik sebagai aktor responif terhadap persoalan harga pangan.
<i>“Harga Pangan di Balikpapan Mahal, Sekda Anggap MBG Rp 12.000 per Porsi Tak Realistis”</i>	Harga pangan di Balikpapan dinilai terlalu mahal sehingga menghambat program MBG.	Ketergantungan pasokan dari luar daerah dan biaya logistik tinggi.	Kebijakan harga nasional dianggap belum memperhatikan kondisi daerah.	Penyesuaian harga MBG berdasarkan karakteristik wilayah dan perbaikan distribusi pangan.	Sekda Balikpapan, Satgas MBG, pemerintah pusat	“tidak realistis”, “mahal”, “ketergantungan”, “gejolak”	Media membingkai kebijakan pangan nasional belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi lokal.
<i>“Harga Pangan Jakarta Hari Ini Turun, dari Cabai hingga Beras Premium”</i>	Harga bahan pangan mengalami penurunan dan menunjukkan stabilisasi pasar.	Distribusi pangan mulai membaik setelah gangguan sebelumnya.	Penurunan harga dipandang positif karena membantu menekan inflasi pangan.	Penguatan distribusi dan stabilisasi pasokan pangan.	Pemerintah daerah, pasar pangan Jakarta	“turun”, “stabil”, “menekan inflasi”, “melandai”	Media membingkai pengendalian harga pangan sebagai indikator keberhasilan stabilisasi pemerintah.

Judul Berita	Define problems	Diagnose causes	Make moral judgement	Treatment recommendation	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing
“Satgas Pangan Temukan Beras Medium Berkutu Dijual Harga Premium di Batang”	Adanya pelanggaran distribusi beras berupa penjualan beras medium berkualitas buruk dengan harga premium.	Pengawasan distribusi dan perdagangan pangan yang belum optimal.	Praktik perdagangan tersebut dianggap merugikan masyarakat dan melanggar aturan HET.	Penindakan Satgas Pangan, teguran, sanksi administratif, hingga pencabutan usaha.	Satgas Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, pedagang	“berkutu”, “penindakan”, “sanksi tegas”, “melanggar HET”	Media membingkai negara sebagai pengawas aktif dalam menjaga stabilitas dan kualitas pangan.
“Harga Pangan di DIY Melonjak karena MBG, Sri Sultan: Otomatis Berpengaruh”	Program MBG menyebabkan peningkatan permintaan dan kenaikan harga pangan.	Tingginya kebutuhan bahan pangan akibat program MBG.	Program gizi dipandang baik, tetapi harus diimbangi dengan penguatan pasokan lokal.	Penguatan Lumbung Mataram, koperasi desa, dan produksi pangan lokal.	Sri Sultan HB X, BGN, petani desa	“melonjak”, “otomatis berpengaruh”, “rantai pasok”, “tambahan penghasilan”	Media membingkai perlunya keseimbangan antara program sosial dan kesiapan produksi pangan daerah.



Berdasarkan tabel tersebut, pemberitaan harga pangan menunjukkan framing Kompas.com terhadap hubungan antara stabilitas harga pangan dan pelaksanaan program pemerintah. Pembahasan framing pada masing – masing berita dijelaskan sebagai berikut.

a) “Masyarakat Padati Gerakan Pangan Murah di Pelalawan yang Diinisiasi Anggota DPD Sewitri”

Kompas.com membingkai harga pangan sebagai persoalan ekonomi masyarakat yang memerlukan intervensi pemerintah. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan tingginya harga kebutuhan pokok sebagai beban bagi masyarakat. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan kenaikan harga pangan dan belum stabilnya kondisi pasar. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan Gerakan Pangan Murah sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menjamin akses masyarakat terhadap bahan pangan. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Framing ini membangun legitimasi terhadap intervensi pemerintah dalam pengendalian harga pangan.

b) “Harga Pangan di Balikpapan Mahal, Sekda Anggap MBG Rp 12.000 per Porsi Tak Realistis”

Kompas.com membingkai tingginya harga pangan sebagai hambatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di daerah. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan tingginya biaya pangan sebagai penyebab anggaran program tidak sesuai dengan kondisi lokal. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan ketergantungan pasokan dari luar daerah dan tingginya biaya distribusi. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan kebijakan nasional sebagai kebijakan yang perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah agar lebih efektif. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada

penyesuaian anggaran berdasarkan kondisi daerah serta perbaikan sistem distribusi pangan. Framing ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pangan bergantung pada kemampuan pemerintah mengakomodasi perbedaan kondisi regional.

c) “Harga Pangan Jakarta Hari Ini Turun, dari Cabai hingga Beras Premium”

Kompas.com membingkai stabilisasi harga pangan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan pasar. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan kenaikan harga pangan sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan inflasi. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan membaiknya distribusi dan pasokan pangan dari daerah pemasok. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan penurunan harga sebagai perkembangan positif yang mendukung daya beli masyarakat. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada penguatan distribusi dan pemeliharaan stabilitas pasokan agar harga tetap terkendali. Framing ini membangun persepsi bahwa stabilisasi harga mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengendalikan pasar pangan.

d) “Satgas Pangan Temukan Beras Medium Berkutu Dijual Harga Premium di Batang”

Kompas.com membingkai harga pangan sebagai persoalan tata niaga dan perlindungan konsumen. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan praktik penjualan beras berkualitas rendah dengan harga premium sebagai bentuk penyimpangan pasar. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan lemahnya pengawasan distribusi dan pelanggaran terhadap ketentuan harga eceran tertinggi. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan praktik tersebut sebagai tindakan yang merugikan masyarakat dan memerlukan penegakan hukum. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada penguatan pengawasan pasar, pemberian sanksi kepada pelaku usaha, dan peningkatan transparansi harga pangan. Framing ini menempatkan negara sebagai aktor utama dalam melindungi konsumen dan menjaga tata niaga pangan.

e) “Harga Pangan di DIY Melonjak karena MBG, Sri Sultan: Otomatis Berpengaruh”

Kompas.com membingkai kenaikan harga pangan sebagai konsekuensi dari meningkatnya kebutuhan bahan pangan akibat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan lonjakan harga pangan sebagai dampak meningkatnya permintaan komoditas pangan. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan peningkatan kebutuhan bahan pangan yang tidak diimbangi oleh kapasitas produksi dan pasokan lokal. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan pelaksanaan program pemerintah perlu didukung oleh kesiapan sistem produksi agar tidak menimbulkan tekanan terhadap harga pangan. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada penguatan produksi pangan lokal melalui pengembangan Lumbung Mataram dan Koperasi Merah Putih untuk menjaga keseimbangan pasokan. Framing ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sosial pemerintah bergantung pada kesiapan rantai pasok dan produksi pangan daerah.

Menurut Hall dalam Eriyanto (2012), media merepresentasikan realitas melalui proses seleksi dan penonjolan makna yang dipengaruhi oleh kepentingan ideologis. Berdasarkan perspektif tersebut, hasil analisis framing Kompas.com pada topik harga pangan selama 100 hari swasembada pangan menunjukkan makna ideologis berupa legitimasi terhadap peran pemerintah dan dominasi perspektif pemerintah. Pemerintah menjadi aktor utama dalam menjelaskan penyebab perubahan harga pangan dalam menawarkan solusi melalui Gerakan Pangan Murah, stabilisasi harga, pengawasan distribusi, penegakan Harga Eceran Tertinggi (HET), dan penguatan produksi lokal. Kebijakan tersebut dikonstruksi sebagai bukti kehadiran negara dalam menjaga stabilitas pangan dan melindungi masyarakat.

Dominasi perspektif pemerintah diperkuat oleh terbatasnya representasi pedagang, petani, konsumen, dan pengamat independen. Kritik yang muncul lebih banyak diarahkan pada aspek teknis pelaksanaan daripada substansi kebijakan pemerintah. Pola framing tersebut membangun citra pemerintah sebagai aktor yang responif dan berkapasitas mengendalikan stabilitas harga pangan, serta mereproduksi

wacana yang memperkuat legitimasi pemerintah melalui dominasi narasi resmi dan terbatasnya perspektif alternatif.

c. Produksi Pertanian

Topik produksi pertanian membahas framing media terhadap upaya peningkatan produksi pangan dalam mendukung tercapainya swasembada pangan nasional. Hasil analisis framing pada topik produksi pertanian disajikan pada tabel 13 berikut.



Tabel 8. Hasil Framing 100 Hari Swasembada Pangan pada Topik Produksi Pertanian

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing
<i>“Di Depan Menko Zulhas, Bupati Aceh Utara Minta Perbaikan Sawah dan Ketersediaan Pangan Pengungsi Korban Banjir”</i>	Produksi pertanian terganggu akibat kerusakan sawah dan irigasi pascabanjir di Aceh Utara.	Banjir menyebabkan kerusakan bendungan, irigasi, dan ribuan hektare sawah tertutup lumpur.	Negara dipandang harus hadir membantu petani dan pengungsi korban bencana.	Perbaikan irigasi, penyediaan pangan pengungsi, dan pembangunan hunian sementara.	Bupati Aceh Utara, Menko Pangan Zulkifli Hasan, petani, pengungsi	“rusak”, “jebol”, “tidak bisa digunakan”, “tindaklanjut”	Media membingkai ketahanan pangan sebagai isu yang rentan terhadap bencana dan membutuhkan intervensi pemerintah.
<i>“Produksi Beras Diproyeksi Tembus 34 Juta Ton, Mentan Yakin RI Swasembada Tahun Ini”</i>	Pemerintah berupaya mencapai swasembada beras nasional dalam waktu singkat.	Peningkatan produksi beras nasional dan dukungan kebijakan pemerintah.	Kenaikan produksi dipandang sebagai keberhasilan besar pemerintah dalam sektor pangan.	Peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan, dan pengendalian impor beras.	Mentan Andi Amran Sulaiman, Presiden Prabowo, BPS, FAO	“optimistis”, “melonjak”, “swasembada”, “tidak impor lagi”	Media membingkai swasembada beras sebagai capaian strategis pemerintahan Prabowo.
<i>“1 Tahun Prabowo–Gibran, Produksi Pangan RI Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah”</i>	Produksi pangan nasional menjadi indikator utama keberhasilan pemerintah	Reformasi pupuk, pencetakan sawah baru, dan pompanisasi meningkatkan produksi pangan.	Pemerintah dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan	Reformasi distribusi pupuk, pembangunan gudang Bulog, dan perluasan sawah baru.	Presiden Prabowo, Mentan Amran, Bulog, petani	“rekor tertinggi”, “prestasi besar”, “pro petani”, “tidak akan ditoleransi”	Media membingkai pemerintah sebagai aktor utama keberhasilan swasembada pangan.

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Menonjol	Kecenderungan Framing
	n dalam satu tahun.		pangan nasional.				
“Kemenperin Bantah Produksi Gula RI Stagnan, Klaim Bisa Capai Swasembada”	Produksi gula nasional masih menghadapi tantangan produktivitas dan tata niaga meskipun meningkat.	Perubahan iklim, tata niaga tidak efisien, rendemen rendah, dan infrastruktur terbatas.	Swasembada gula dianggap mungkin tercapai, tetapi membutuhkan pembenahan struktural.	Perluasan lahan tebu, pembangunan infrastruktur, reformasi tata niaga, dan dukungan petani.	Kemenperin, P3GI, petani tebu, industri gula	“signifikan”, “fluktuatif”, “carut marut”, “potensi besar”	Media membingkai bahwa peningkatan produksi harus diimbangi pembenahan sistem produksi dan distribusi.



Berdasarkan tabel tersebut, pemberitaan produksi pertanian menunjukkan framing Kompas.com terhadap upaya peningkatan produksi pangan yang disertai berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Pembahasan framing pada masing – masing berita dijelaskan sebagai berikut.

a) “Di Depan Menko Zulhas, Bupati Aceh Utara Minta Perbaikan Sawah dan Ketersediaan Pangan Pengungsi Korban Banjir”

Kompas.com membingkai produksi pertanian sebagai sektor yang rentan terhadap dampak bencana alam. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan kerusakan sawah, irigasi, dan bendungan akibat banjir sebagai ancaman terhadap keberlanjutan produksi pangan. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan banjir yang merusak infrastruktur pertanian serta mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab memulihkan sektor pertanian dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada rehabilitasi sawah, perbaikan irigasi dan bendungan, penyediaan bantuan pangan, serta pembangunan hunian bagi korban banjir. Framing ini menempatkan pemulihan infrastruktur pertanian sebagai prasyarat menjaga ketahanan pangan daerah.

b) “Produksi Beras Diproyeksi Tembus 34 Juta Ton, Mentan Yakin RI Swasembada Tahun Ini”

Kompas.com membingkai peningkatan produksi beras sebagai indikator keberhasilan program swasembada pangan nasional. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan pencapaian swasembada beras sebagai target utama pembangunan pertanian. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang berhasil meningkatkan produktivitas pertanian dan mendorong kenaikan produksi nasional. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan peningkatan produksi sebagai bukti efektivitas kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan. Rekomendasi penyelesaian (*treatment*

recommendation) diarahkan pada keberlanjutan peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan, dan pengurangan ketergantungan impor. Framing ini membangun legitimasi terhadap keberhasilan pemerintah melalui capaian produksi beras nasional.

c) “1 Tahun Prabowo-Gibran, Produksi Pangan RI Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah”

Kompas.com membingkai peningkatan produksi pangan sebagai simbol keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan peningkatan produksi pangan sebagai syarat utama penguatan ketahanan pangan nasional. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan reformasi tata kelola pupuk, pencetakan sawah baru, pompanisasi, dan penguatan distribusi pangan. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan capaian produksi sebagai bukti keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada keberlanjutan reformasi pupuk, perluasan lahan sawah, pembangunan gudang Bulog, dan penguatan infrastruktur pascapanen. Framing ini memperkuat citra pemerintah sebagai aktor utama dalam keberhasilan produksi pangan nasional.

d) “Kemenperin Bantah Produksi Gula RI Stagnan, Klaim Bisa Capai Swasembada”

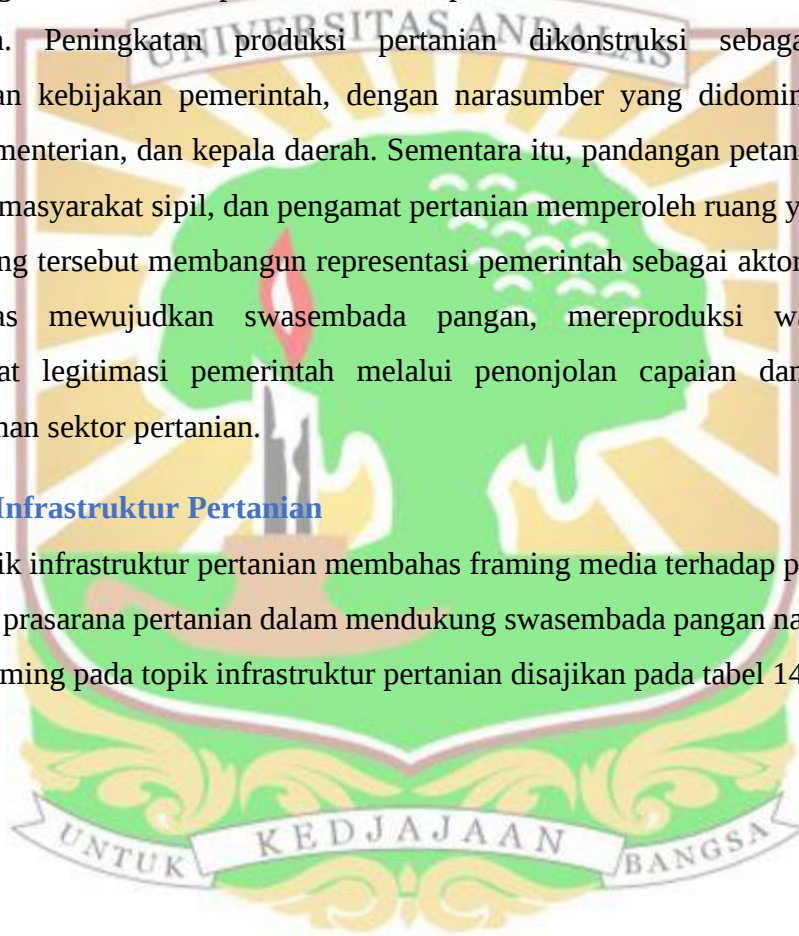
Kompas.com membingkai produksi gula sebagai sektor yang memiliki potensi mencapai swasembada, tetapi masih menghadapi hambatan struktural. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan perdebatan mengenai stagnasi produksi gula sebagai isu utama pembangunan pangan. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan perubahan iklim, rendahnya produktivitas, tata niaga yang belum efisien, serta keterbatasan infrastruktur dan dukungan terhadap petani tebu. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan peningkatan produksi sebagai langkah positif, namun menegaskan perlunya pembenahan sistem produksi dan distribusi. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada perluasan lahan tebu, perbaikan tata niaga, pembangunan infrastruktur, penerapan Good Agricultural Practices (GAP), dan penguatan dukungan kepada petani. Framing

ini menunjukkan bahwa pencapaian swasembada gula diposisikan bergantung pada reformasi menyeluruh di sektor produksi dan tata niaga.

Menurut Hall *dalam* Eriyanto (2012), media merepresentasikan realitas melalui proses seleksi dan penonjolan makna yang dipengaruhi oleh kepentingan ideologis. Berdasarkan perspektif tersebut, hasil analisis framing Kompas.com pada topik produksi pertanian selama 100 hari swasembada pangan menunjukkan makna ideologis berupa legitimasi terhadap keberhasilan pemerintah dan dominasi perspektif pemerintah. Peningkatan produksi pertanian dikonstruksi sebagai indikator keberhasilan kebijakan pemerintah, dengan narasumber yang didominasi menteri, pejabat kementerian, dan kepala daerah. Sementara itu, pandangan petani, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pengamat pertanian memperoleh ruang yang terbatas. Pola framing tersebut membangun representasi pemerintah sebagai aktor utama yang berkapasitas mewujudkan swasembada pangan, mereproduksi wacana yang memperkuat legitimasi pemerintah melalui penonjolan capaian dan optimisme pembangunan sektor pertanian.

d. Infrastruktur Pertanian

Topik infrastruktur pertanian membahas framing media terhadap pembangunan sarana dan prasarana pertanian dalam mendukung swasembada pangan nasional. Hasil analisis framing pada topik infrastruktur pertanian disajikan pada tabel 14 berikut.



Tabel 9. Hasil Framing 100 Hari Swasembada Pangan pada Topik Infrastruktur Pertanian

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Ditonjolkan	Kecenderungan Framing Media
“PSN Papua, Menteri ATR Nusron Wahid Singgung Swasembada Pangan Butuh Perluasan Lahan”	Permasalahan utama dibingkai sebagai keterbatasan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional di tengah pertumbuhan penduduk dan target swasembada pangan.	Penyebab masalah diarahkan pada berkurangnya lahan sawah akibat pembangunan perumahan dan industri serta meningkatnya jumlah penduduk yang membutuhkan pasokan pangan lebih besar.	Swasembada pangan diposisikan sebagai kepentingan nasional dan bentuk ketahanan bangsa. Penolakan terhadap proyek perluasan lahan digambarkan berpotensi mendukung ketergantungan impor pangan.	Pemerintah mendorong perluasan lahan pertanian melalui PSN, mempertahankan lahan sawah, serta pengembangan bioenergi berbasis pertanian. Dialog dengan pihak penolak juga menjadi solusi yang ditawarkan.	Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Presiden Prabowo Subianto, masyarakat adat Papua, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat	“swasembada”, “ketahanan pangan”, “ekstensifikasi lahan”, “impor”, “Asta Cita”, “sawah harus dipertahankan”	Kompas.com membingkai infrastruktur pertanian sebagai kebutuhan strategis nasional, tetapi tetap membuka ruang terhadap isu sosial dan konflik agraria.
“Zulhas Ajak Pemanfaatan Lahan untuk Pertanian: Bantuan Pangan Sehari Perlu 82,9 juta Porsi”	Persoalan utama dibingkai sebagai tingginya kebutuhan pangan nasional akibat program bantuan pangan dan makan bergizi gratis yang memerlukan	Penyebab utama berasal dari meningkatnya kebutuhan konsumsi pangan nasional serta masih adanya lahan yang belum dimanfaatkan	Pemanfaatan lahan dipandang sebagai tanggung jawab bersama masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.	Pemerintah mendorong optimalisasi lahan pekarangan, pengembangan pertanian dan peternakan rakyat, perbaikan irigasi, subsidi pupuk, serta	Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, petani, masyarakat	“optimalkan lahan”, “82,9 juta porsi”, “produktif”, “harga gabah naik”, “pupuk turun”	Kompas.com cenderung membangun framing positif terhadap kebijakan pemerintah dengan menekankan kolaborasi masyarakat dalam mendukung

Judul Berita

*Define
problems*
produksi besar
setiap hari.

*Diagnose
causes*
secara
produktif.

*Make moral
judgement*

*Treatment
recommendation*
stabilisasi harga
gabah.

Aktor
Dominan

Diksi yang
Ditonjolkan

Kecenderungan
Framing Media
swasembada
pangan.



Berdasarkan tabel tersebut, pemberitaan infrastruktur pertanian menunjukkan framing Kompas.com terhadap pentingnya pemanfaatan dan pengembangan lahan pertanian dalam mendukung swasembada pangan nasional. Pembahasan framing pada masing-masing berita dijelaskan sebagai berikut.

a) “PSN Papua, Menteri ATR Nusron Wahid Singgung Swasembada Pangan Butuh Perluasan Lahan”

Kompas.com membingkai keterbatasan lahan pertanian sebagai persoalan utama dalam pencapaian swasembada pangan. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan berkurangnya lahan sawah sebagai ancaman terhadap ketahanan pangan nasional. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri sehingga diperlukan perluasan lahan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan swasembada pangan sebagai kepentingan nasional yang perlu diprioritaskan, meskipun media tetap menghadirkan kritik mengenai potensi konflik agraria dan dampaknya terhadap masyarakat adat. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada perluasan lahan pertanian, perlindungan lahan produktif, pengembangan bioenergi, serta dialog dengan kelompok yang menolak proyek. Framing ini menunjukkan bahwa perluasan lahan diposisikan sebagai prasyarat utama untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.

b) “Zulhas Ajak Pemanfaatan Lahan untuk Pertanian: Bantuan Pangan Sehari Perlu 82,9 juta Porsi”

Kompas.com membingkai peningkatan kebutuhan pangan nasional sebagai tantangan utama dalam mendukung program swasembada pangan. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan tingginya kebutuhan pasokan pangan sebagai konsekuensi dari program bantuan pangan dan makan bergizi gratis. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan belum optimalnya pemanfaatan lahan masyarakat serta produktivitas pertanian yang dipengaruhi oleh irigasi, pupuk,

dan harga gabah. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan pemanfaatan lahan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, petani, dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada optimalisasi lahan pekarangan, pengembangan pertanian dan peternakan rakyat, perbaikan irigasi, subsidi pupuk, serta peningkatan harga gabah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Framing ini menunjukkan bahwa swasembada pangan diposisikan sebagai hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya lokal serta penguatan infrastruktur pertanian.

Menurut Hall *dalam* Eriyanto (2012), media merepresentasikan realitas melalui proses seleksi dan penonjolan makna yang dipengaruhi oleh kepentingan ideologis. Berdasarkan perspektif tersebut, hasil analisis framing Kompas.com pada topik infrastruktur pertanian selama 100 hari swasembada pangan menunjukkan makna ideologis berupa legitimasi terhadap kebijakan pemerintah dan dominasi perspektif pemerintah. Keterbatasan lahan, produktivitas, dan sarana pertanian dikonstruksi sebagai persoalan yang diselesaikan melalui perluasan lahan, pembangunan irigasi, optimalisasi lahan, dan dukungan kepada petani. Dominasi narasumber pemerintah, dengan terbatasnya representasi masyarakat sipil, menyebabkan perspektif pemerintah menjadi kerangka utama pemberitaan. Kritik mengenai konflik agraria dan dampak sosial hadir secara terbatas sehingga tidak menggeser narasi utama. Pola framing tersebut membangun citra pemerintah sebagai aktor yang berkapasitas memimpin pembangunan infrastruktur pertanian, mereproduksi wacana yang memperkuat legitimasi pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

e. Kelembagaan

Topik kelembagaan pertanian membahas framing media terhadap peran lembaga dan koordinasi antarinstansi dalam mendukung swasembada pangan nasional. Hasil analisis framing pada topik kelembagaan pertanian disajikan pada tabel 15 berikut.

Tabel 10. Hasil Framing 100 Hari Swasembada Pangan pada Topik Kelembagaan

Judul Berita	<i>Define problems</i>	<i>Diagnose causes</i>	<i>Make moral judgement</i>	<i>Treatment recommendation</i>	Aktor Dominan	Diksi yang Ditonjolkan	Kecenderungan Framing Media
“Dirut Bulog Pastikan Kecukupan Bantuan Pangan untuk Korban Bencana di Sumatera”	Permasalahan dibingkai sebagai ancaman terganggunya distribusi dan ketersediaan pangan akibat bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera.	Penyebab masalah diarahkan pada terputusnya akses distribusi darat dan kondisi wilayah terdampak bencana yang menyulitkan penyaluran bantuan pangan.	Perum Bulog diposisikan sebagai lembaga strategis negara yang bertanggung jawab menjaga ketahanan pangan dan memastikan bantuan cepat sampai kepada masyarakat terdampak.	Solusi yang ditawarkan berupa penempatan stok beras di bandara dan pelabuhan, optimalisasi distribusi udara dan laut, serta koordinasi lintas lembaga dengan TNI, Polri, BPBD, dan BNPB.	Ahmad Rizal Ramdhani, Perum Bulog, TNI, Polri, BNPB, BPBD	“kecukupan stok”, “distribusi cepat”, “ketahanan pangan”, “respon cepat”, “sinergi”	Kompas.com membingkai Bulog sebagai institusi strategis yang sigap, responif, dan memiliki kapasitas kelembagaan kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional saat bencana.

Berdasarkan tabel tersebut, pemberitaan kelembagaan pertanian menunjukkan framing Kompas.com terhadap peran lembaga pangan dalam menjaga distribusi dan ketersediaan pangan pada kondisi darurat. Pembahasan framing pada berita dijelaskan sebagai berikut.

a) “Dirut Bulog Pastikan Kecukupan Bantuan Pangan untuk Korban Bencana di Sumatera”

Kompas.com membingkai gangguan distribusi pangan akibat bencana alam sebagai persoalan utama dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Pendefinisian masalah (*define problems*) menempatkan terganggunya akses terhadap kebutuhan pokok sebagai dampak dari terhambatnya distribusi pangan di wilayah terdampak bencana. Penentuan penyebab masalah (*diagnose causes*) dikaitkan dengan terputusnya jalur distribusi darat serta kendala logistik yang menghambat penyaluran bantuan pangan. Penilaian moral (*make moral judgement*) memposisikan Perum Bulog sebagai lembaga strategis negara yang bertanggung jawab menjamin ketersediaan pangan melalui respon yang cepat dan koordinasi antarlembaga. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) diarahkan pada penempatan stok beras di bandara dan pelabuhan, optimalisasi distribusi melalui jalur udara dan laut, serta penguatan koordinasi dengan TNI, Polri, BPBD, dan BNPB. Framing ini menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan Bulog diposisikan sebagai faktor utama dalam menjamin ketahanan pangan masyarakat pada situasi bencana.

Menurut Hall dalam Eriyanto (2012), media merepresentasikan realitas melalui proses seleksi dan penonjolan makna yang dipengaruhi oleh kepentingan ideologis. Berdasarkan perspektif tersebut, hasil analisis framing Kompas.com pada topik kelembagaan pangan selama 100 hari swasembada pangan menunjukkan makna ideologis berupa legitimasi terhadap peran pemerintah dan dominasi perspektif pemerintah. Swasembada pangan dikonstruksi sebagai indikator keberhasilan pemerintahan Prabowo melalui penguatan kelembagaan negara, terutama Perum Bulog, dalam menjamin ketersediaan dan distribusi pangan. Dominasi narasumber pemerintah menyebabkan proses pendefinisian masalah, penjelasan penyebab, penilaian, dan perumusan solusi lebih banyak merepresentasikan perspektif pemerintah, sementara pandangan kritis mengenai

efektivitas kebijakan dan pelaksanaannya memperoleh ruang yang terbatas. Pola framing tersebut membangun citra pemerintah sebagai aktor yang responsif, terkoordinasi, dan berkapasitas menjaga ketahanan pangan, mereproduksi wacana yang memperkuat legitimasi pemerintah dalam pengelolaan kelembagaan pangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pranandana *et al.* (2025) yang menunjukkan bahwa Kompas.com cenderung membingkai program pemerintah secara positif dengan menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam penyelesaian persoalan publik. Kesamaan tersebut mengindikasikan adanya pola framing yang konsisten, yaitu penonjolan kapasitas negara dan legitimasi kebijakan melalui dominasi narasi pemerintah. Perbedaannya terletak pada objek dan orientasi isu yang dibingkai.

Pada penelitian ini, swasembada pangan dikonstruksikan sebagai indikator keberhasilan pemerintahan melalui capaian produksi, kemandirian pangan, dan penguatan ketahanan pangan nasional. Pranandana *et al.* (2025) menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis dibingkai berdasarkan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama pada aspek kesehatan, gizi, dan pembangunan sumber daya manusia. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pola framing Kompas.com tidak berubah pada tingkat aktor yang ditonjolkan, tetapi berubah pada tingkat substansi isu. Penonjolan disesuaikan dengan tujuan kebijakan yang diberitakan. Pada isu swasembada pangan, legitimasi dibangun melalui narasi keberhasilan negara. Pada isu MBG, legitimasi dibangun melalui narasi manfaat sosial bagi masyarakat.

3. Pola Framing

Pola framing menunjukkan kecenderungan Kompas.com dalam membangun cara pandang terhadap isu swasembada pangan. Kecenderungan tersebut dianalisis melalui keterkaitan empat perangkat framing Entman (1993), yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*. Pembahasan setiap elemen tidak hanya menjelaskan bagaimana isu swasembada pangan dibingkai, tetapi juga memperlihatkan hubungan antar elemen framing dalam membentuk arah pemberitaan serta kecenderungan makna yang dikonstruksi Kompas.com terhadap isu swasembada pangan. Sebagai berikut :

a) Pendefinisian Masalah (*Define Problems*)

Berdasarkan hasil penelitian, elemen pendefinisian masalah (*define problems*) menunjukkan bahwa Kompas.com mengonstruksi swasembada pangan sebagai persoalan strategis yang keberadaannya dikaitkan pada kapasitas negara dalam mengelola sektor pangan. Pada periode 100 Hari Kerja Pemerintahan, kelima topik pemberitaan kebijakan pemerintah, produksi pertanian, harga pangan, infrastruktur pertanian, dan kelembagaan difokuskan pada identifikasi berbagai kendala yang dipandang menghambat pencapaian target swasembada. Sedangkan, pada periode 100 Hari Swasembada Pangan, definisi masalah mengalami pergeseran menuju penguatan hasil yang telah dicapai melalui peningkatan produksi, pengendalian pasokan, penguatan distribusi, modernisasi pertanian, serta keberlanjutan pelaksanaan program. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa konstruksi masalah tidak bersifat tetap, melainkan mengikuti orientasi kebijakan pemerintah pada setiap fase implementasi.

Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa persoalan swasembada pangan direduksi ke dalam ranah administratif dan manajerial. Permasalahan dipahami sebagai konsekuensi dari belum optimalnya pelaksanaan kebijakan sehingga penyelesaiannya diarahkan pada peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan. Akibatnya, dimensi struktural yang mempengaruhi keberlanjutan swasembada pangan, seperti ketimpangan struktur agraria, akses terhadap pembiayaan, posisi tawar petani dalam rantai distribusi, regenerasi tenaga kerja pertanian, dan kerentanan sosial ekonomi rumah tangga petani, berada di luar fokus utama pemberitaan. Pola tersebut memperlihatkan bahwa kompleksitas persoalan pangan disederhanakan menjadi persoalan kapasitas institusional negara.

Secara konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa pendefinisian masalah berfungsi sebagai mekanisme awal dalam pembentukan realitas sebagaimana dikemukakan Entman (1993). Cara media merumuskan persoalan menentukan batas persoalan yang dianggap relevan sekaligus membatasi alternatif penafsiran yang tersedia bagi khalayak. Dalam hal ini, Kompas.com mengarahkan pemaknaan bahwa keberhasilan swasembada pangan terutama ditentukan oleh efektivitas kebijakan pemerintah. Konsekuensinya, legitimasi terhadap agenda swasembada pangan dibangun melalui penguatan citra negara sebagai aktor yang

memiliki kapasitas utama dalam mengendalikan sistem pangan nasional, sedangkan peran petani lebih banyak direpresentasikan sebagai pelaksana kebijakan daripada sebagai subjek yang turut menentukan arah pembangunan pangan.

b) Penentuan Penyebab Masalah (*Diagnose Causes*)

Berdasarkan hasil penelitian, elemen penyebab masalah (*diagnose causes*) menunjukkan bahwa Kompas.com lebih banyak menempatkan penyebab persoalan swasembada pangan pada faktor – faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pada periode 100 Hari Kerja Pemerintahan, penyebab persoalan dikaitkan dengan keterbatasan kapasitas produksi, belum memadainya infrastruktur pertanian, lemahnya koordinasi antarlembaga, ketergantungan terhadap impor, serta ketidakstabilan harga pangan. Sementara pada periode 100 Hari Swasembada Pangan, penyebab persoalan bergeser pada efektivitas pelaksanaan program, yang tercermin melalui peningkatan produksi, penguatan distribusi, stabilisasi pasokan, dan penguatan kelembagaan. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa penyebab persoalan dibingkai mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah, dari tahap persiapan menuju tahap pelaksanaan.

Pola tersebut menunjukkan bahwa Kompas.com lebih menekankan penyebab yang dapat diatasi melalui kebijakan pemerintah daripada penyebab yang bersifat struktural. Akibatnya, persoalan seperti ketimpangan penguasaan lahan, keterbatasan akses permodalan, rendahnya posisi tawar petani, regenerasi petani, serta mekanisme pasar memperoleh perhatian yang relatif terbatas. Konstruksi tersebut mengarahkan penyebab swasembada pangan untuk dipahami terutama sebagai persoalan tata kelola pemerintahan. Sehingga, keberhasilan penyelesaiannya lebih banyak dikaitkan dengan efektivitas kebijakan dibandingkan dengan perubahan pada struktur sektor pertanian secara menyeluruh.

Penelitian ini sesuai dengan Entman (1993) yang menjelaskan bahwa penyebab masalah (*diagnose causes*) berfungsi untuk menentukan penyebab yang dianggap paling relevan dalam suatu peristiwa. Dalam penelitian ini, Kompas.com secara konsisten menempatkan pemerintah sebagai aktor yang paling bertanggung jawab terhadap penyebab sekaligus penyelesaian persoalan swasembada pangan. Cara tersebut memperkuat pandangan bahwa keberhasilan maupun hambatan swasembada pangan bergantung pada kapasitas pemerintah dalam mengelola sektor

pangan, sedangkan faktor – faktor struktural di luar kebijakan pemerintah memperoleh ruang yang lebih terbatas dalam pemberitaan.

c) **Penilaian moral (*Make Moral Judgement*)**

Berdasarkan hasil penelitian, elemen penilaian moral (*make moral judgement*) menunjukkan bahwa Kompas.com menggunakan nilai kepentingan nasional, kemandirian pangan, dan tanggung jawab negara sebagai dasar moral dalam menilai isu swasembada pangan. Pada periode 100 Hari Kerja Pemerintahan, pembangunan infrastruktur, modernisasi pertanian, peningkatan produksi, dan penguatan kelembagaan diposisikan sebagai tindakan yang bernilai positif karena dipandang sebagai prasyarat untuk mewujudkan kemandirian pangan. Sementara itu, pada periode 100 Hari Swasembada Pangan, legitimasi moral bergeser pada pentingnya menjaga konsistensi pelaksanaan program, memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta mempertahankan capaian yang telah diperoleh. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa dasar moral pemberitaan berkembang dari pembenaran terhadap arah kebijakan menjadi pembenaran terhadap keberlanjutan pelaksanaannya.

Penilaian moral melegitimasi kebijakan pemerintah sebagai pilihan yang tepat untuk mencapai swasembada pangan. Nilai – nilai seperti tanggung jawab, kerja sama, keberlanjutan, dan efektivitas ditempatkan sebagai ukuran keberhasilan serta sebagai dasar pembenaran terhadap berbagai program pemerintah. Sedangkan, kritik terhadap kebijakan, persoalan ketimpangan agraria, kesejahteraan petani, maupun potensi dampak negatif kebijakan tidak memperoleh penekanan yang seimbang. Akibatnya, perspektif yang mempertanyakan efektivitas atau keadilan kebijakan cenderung kehilangan legitimasi dalam pemberitaan.

Penelitian ini sesuai dengan Entman (1993) yang menjelaskan bahwa penilaian moral (*make moral judgement*) berfungsi untuk memberikan penilaian normatif terhadap suatu peristiwa. Dalam penelitian ini, Kompas.com tidak hanya menyampaikan informasi mengenai swasembada pangan, tetapi juga membentuk batas mengenai tindakan yang dipandang benar dan layak didukung. Dengan cara tersebut, legitimasi terhadap agenda swasembada pangan dibangun melalui penegasan nilai – nilai yang mendukung kebijakan pemerintah, sedangkan perspektif yang berseberangan memperoleh ruang representasi yang lebih terbatas.

d) Rekomendasi Penyelesaian (*Treatment Recommendation*)

Berdasarkan hasil penelitian, elemen rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) menunjukkan bahwa Kompas.com secara konsisten menawarkan penyelesaian swasembada pangan melalui penguatan peran pemerintah. Pada periode 100 Hari Kerja Pemerintahan, solusi diarahkan pada pembentukan kapasitas dasar melalui pembangunan infrastruktur pertanian, modernisasi teknologi, optimalisasi lahan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi antar kementerian. Sementara itu, pada periode 100 Hari Swasembada Pangan, rekomendasi bergeser pada penguatan pelaksanaan program melalui peningkatan produksi, stabilisasi harga, pengamanan distribusi, perlindungan hasil panen, serta keberlanjutan kolaborasi antar lembaga. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi penyelesaian mengikuti perkembangan agenda kebijakan, dari membangun prasyarat menuju menjaga keberlanjutan hasil.

Arah penyelesaian yang ditawarkan menunjukkan bahwa keberhasilan swasembada pangan diposisikan bergantung pada efektivitas kebijakan publik. Solusi yang memperoleh penekanan didominasi oleh instrumen pemerintah, sedangkan alternatif yang bertumpu pada penguatan kapasitas petani, reformasi struktur agraria, penguatan kelembagaan lokal, dan perbaikan tata niaga pangan memperoleh ruang yang lebih terbatas. Sehingga, jalan penyelesaian yang dibangun media cenderung mengarahkan perhatian pada perbaikan tata kelola pemerintahan, bukan pada perubahan struktur yang melatarbelakangi persoalan pangan.

Pada perspektif Entman (1993), rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) berfungsi untuk mengarahkan khalayak pada solusi yang dipandang paling tepat untuk mengatasi suatu persoalan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kompas.com merekomendasikan intervensi pemerintah sebagai pilihan penyelesaian yang paling rasional dan layak ditempuh. Konsekuensinya, pemerintah direpresentasikan tidak hanya sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga sebagai aktor utama yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk menentukan arah penyelesaian swasembada pangan, sedangkan alternatif penyelesaian di luar kerangka kebijakan pemerintah memperoleh legitimasi yang lebih terbatas.

Berdasarkan uraian empat elemen, pola framing Kompas.com menunjukkan bahwa swasembada pangan secara konsisten dikonstruksi sebagai persoalan yang berada dalam ruang tanggung jawab pemerintah. Konstruksi tersebut tidak terbentuk melalui satu elemen framing saja, tetapi melalui hubungan yang saling menguatkan antara pendefinisian masalah, penentuan penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian. Keempat elemen membentuk alur berpikir yang mengarahkan pembaca pada satu pemahaman, yaitu bahwa keberhasilan swasembada pangan terutama ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola sektor pangan.

Pendefinisian masalah menjadi dasar bagi keseluruhan konstruksi, dengan swasembada pangan diposisikan sebagai persoalan strategis nasional yang harus diselesaikan melalui kebijakan pemerintah. Cara media mendefinisikan masalah ini tidak hanya menentukan isu yang dianggap penting, tetapi juga membatasi ruang pembahasan pada persoalan yang dapat dijelaskan melalui tindakan pemerintah. Akibatnya, isu seperti peningkatan produksi, distribusi pangan, kelembagaan, dan pelaksanaan program memperoleh perhatian yang lebih besar. Sebaliknya, masalah yang bersifat struktural, seperti ketimpangan penguasaan lahan, akses permodalan, tata niaga pangan, dan posisi tawar petani, tidak berkembang sebagai fokus utama. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa media lebih menekankan masalah yang dapat diselesaikan melalui kebijakan daripada masalah yang memerlukan perubahan struktur sektor pertanian.

Cara mendefinisikan masalah tersebut menentukan arah penjelasan mengenai penyebab masalah. Penyebab swasembada pangan lebih banyak dikaitkan dengan efektivitas kebijakan, kapasitas kelembagaan, produktivitas pertanian, distribusi pangan, dan pelaksanaan program. Penentuan penyebab tidak hanya menjelaskan asal persoalan, tetapi juga menetapkan aktor yang dianggap bertanggung jawab atas penyelesaiannya. Ketika penyebab persoalan ditempatkan pada aspek yang berada dalam kendali pemerintah, keberhasilan maupun kegagalan swasembada pangan juga dipahami sebagai konsekuensi dari kinerja pemerintah. Sehingga, hubungan sebab akibat dalam pemberitaan tidak bersifat netral, tetapi mengarahkan pembaca untuk melihat pemerintah sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab utama terhadap pencapaian swasembada pangan.

Penentuan penyebab tersebut diperkuat melalui penilaian moral. Nilai yang memperoleh penekanan adalah kemandirian pangan, kepentingan nasional, keberlanjutan program, disiplin pelaksanaan kebijakan, dan kerja sama antar lembaga. Nilai – nilai tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa dukungan terhadap kebijakan pemerintah merupakan tindakan yang tepat dalam mewujudkan swasembada pangan. Sedangkan, kritik terhadap kebijakan, ketimpangan agraria, lemahnya posisi tawar petani, dan masalah tata niaga pangan memperoleh ruang yang lebih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian moral tidak hanya membedakan tindakan yang dianggap benar atau kurang tepat, tetapi juga berfungsi memperkuat legitimasi terhadap arah kebijakan yang dipilih pemerintah.

Legitimasi menjadi dasar bagi rekomendasi penyelesaian yang ditawarkan dalam pemberitaan. Penyelesaian swasembada pangan lebih banyak diarahkan pada penguatan kebijakan pemerintah melalui pembangunan infrastruktur, modernisasi pertanian, peningkatan produksi, penguatan kelembagaan, perbaikan distribusi pangan, dan keberlanjutan program. Pilihan ini menunjukkan bahwa solusi dipahami sebagai penyempurnaan pelaksanaan kebijakan, bukan sebagai perubahan terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi persoalan pangan. Akibatnya, reformasi agraria, penguatan kelembagaan ekonomi petani, perbaikan tata niaga pangan, dan peningkatan posisi tawar petani tidak berkembang sebagai alternatif penyelesaian yang memperoleh penekanan yang sama.

Hubungan antar 4 elemen framing menunjukkan bahwa setiap elemen memiliki fungsi yang berbeda, tetapi menghasilkan arah pemaknaan yang sama. Pendefinisian masalah menentukan batas persoalan yang dianggap penting. Penentuan penyebab menetapkan letak tanggung jawab atas persoalan tersebut. Penilaian moral membangun dasar untuk menerima arah kebijakan yang dipilih, dan rekomendasi penyelesaian mengarahkan pembaca pada bentuk tindakan yang dianggap paling tepat. Rangkaian ini menghasilkan konstruksi yang konsisten bahwa swasembada pangan merupakan persoalan kebijakan publik yang penyelesaiannya bergantung pada kapasitas pemerintah. Dalam konstruksi isu ini, pemerintah tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang memperoleh legitimasi untuk mendefinisikan persoalan,

menjelaskan penyebab, menetapkan nilai yang dianggap benar, dan menentukan arah penyelesaian.

Penelitian ini menguatkan framing Entman (1993) bahwa framing membentuk cara khalayak memahami suatu isu melalui hubungan yang sistematis antara pendefinisian masalah, penentuan penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian. Dalam penelitian ini, hubungan 4 elemen menghasilkan konstruksi yang konsisten mengenai swasembada pangan sebagai persoalan kebijakan publik. Oleh karena itu, pemberitaan Kompas.com tidak hanya menyajikan informasi mengenai pembangunan pangan, tetapi juga mengonstruksi pemahaman bahwa keberhasilan swasembada pangan bergantung pada efektivitas penyelenggaraan kebijakan pemerintah. Konstruksi tersebut memberikan posisi yang dominan kepada pemerintah sebagai aktor yang berwenang mendefinisikan persoalan, menetapkan penyebab, membangun dasar legitimasi kebijakan, dan menentukan penyelesaian yang dipandang tepat. Akibatnya, peran aktor lain, seperti petani, pelaku usaha, dan masyarakat, lebih banyak direpresentasikan sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan daripada sebagai pihak yang turut menentukan arah pembangunan pangan nasional.

C. Respon Pembaca

Berdasarkan hasil penelitian pada respon pembaca, ditemukan dua periode pengamatan, yaitu 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan 100 hari swasembada pangan pada media Kompas.com. Kedua periode tersebut dianalisis secara rinci berdasarkan komentar pembaca untuk melihat bentuk keterlibatan publik pada isu yang diberitakan. Pembahasan hasil analisis pada masing – masing periode disajikan sebagai berikut :

1. 100 Hari Kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

Berdasarkan hasil analisis terhadap 180 komentar pembaca pada pemberitaan Kompas.com mengenai 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo terkait swasembada pangan, ditemukan bahwa dimensi afektif merupakan respon yang paling dominan, diikuti dimensi kognitif dan konatif. Perbedaan kecenderungan respon menunjukkan bahwa setiap isu dalam pemberitaan memperoleh perhatian pembaca yang berbeda. Oleh karena itu, pembahasan

disusun berdasarkan 5 topik pemberitaan, yaitu kebijakan pemerintah, produksi pertanian, harga pangan, infrastruktur pertanian, dan kelembagaan pertanian.

a. Kebijakan Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon pembaca terhadap pemberitaan bertopik kebijakan pemerintah didominasi oleh dimensi kognitif, kemudian dimensi afektif dan konatif. Dominasi tersebut menunjukkan bahwa pembaca lebih banyak mengevaluasi substansi kebijakan daripada menerima narasi yang dibangun media. Menurut McQuail (2010), respon kognitif mencerminkan proses pengolahan informasi melalui pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki khalayak. Dengan demikian, pemberitaan Kompas.com berhasil menarik perhatian pembaca terhadap isu swasembada pangan, tetapi belum sepenuhnya membentuk keyakinan pembaca terhadap keberhasilan kebijakan pemerintah.

Komentar pembaca menguatkan hasil analisis framing. Pada perangkat *define problems*, Kompas.com mengonstruksi swasembada pangan sebagai agenda prioritas nasional yang harus diwujudkan melalui kebijakan pemerintah. *Diagnose causes* menempatkan pemerintah sebagai aktor utama yang bertanggung jawab menyelesaikan persoalan pangan, sedangkan *treatment recommendation* menekankan percepatan program pemerintah sebagai solusi. Framing tersebut membangun persepsi bahwa keberhasilan swasembada bergantung pada efektivitas kebijakan pemerintah.

Respon pembaca menunjukkan bahwa konstruksi lebih banyak dinegosiasikan daripada diterima. Mayoritas komentar tidak menjadikan target swasembada sebagai indikator keberhasilan, tetapi menggunakan kondisi empiris, seperti keberlanjutan impor pangan, penyerapan gabah petani, dan rekam jejak pejabat sebagai dasar penilaian. Komentar "*sementara itu impor terus*", "*mau ngejar swasembada, impor pangan ditingkatkan*", dan "*coba lihat rekam jejak Zulhas*" menunjukkan bahwa pembaca menguji konsistensi antara klaim pemerintah dan implementasi kebijakan. Menurut McQuail (2010) khalayak bersifat aktif dalam menafsirkan pesan media. Makna pemberitaan tidak diterima secara utuh, tetapi dibandingkan dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki.

Respon afektif memperlihatkan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap optimisme yang dikonstruksi media. Komentar seperti "*ah omon-omon saja*", "*catat ya omongannya*", dan "*realistis saja, jangan cuma janji*" menunjukkan bahwa pembaca meragukan kemampuan pemerintah merealisasikan target swasembada. Sikap tersebut mengindikasikan bahwa legitimasi yang dibangun melalui framing media belum mampu mengubah persepsi pembaca terhadap kredibilitas aktor pemerintah. Dalam perspektif McQuail (2010), respon afektif terbentuk ketika informasi media memunculkan penilaian emosional berdasarkan pengalaman sebelumnya. Semakin besar kesenjangan antara narasi media dan realitas yang dirasakan, semakin kuat kecenderungan munculnya sikap skeptis.

Respon konatif memperlihatkan bahwa pembaca tidak berhenti pada tahap penilaian, tetapi mengarahkan tuntutan terhadap pemerintah. Komentar seperti "*koruptor ditangkap dulu*" dan "*buktikan dulu berani memenjarakan pejabat korup*" menunjukkan bahwa keberhasilan swasembada dipersepsikan bergantung pada perbaikan tata kelola pemerintahan, bukan hanya pada peningkatan produksi pangan. Menurut McQuail (2010), respon konatif merupakan kecenderungan individu untuk mendorong tindakan setelah menerima informasi media. Artinya, pemberitaan Kompas.com berhasil memicu keterlibatan pembaca dalam mengevaluasi dan mengawasi kebijakan publik.

Secara umum, respon pembaca lebih mempertanyakan daripada mengafirmasi framing Kompas.com. Framing berhasil menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam pencapaian swasembada pangan, tetapi gagal membangun legitimasi yang sama di mata pembaca. Mayoritas pembaca memaknai keberhasilan swasembada berdasarkan dampak nyata kebijakan, bukan berdasarkan klaim yang disampaikan pemerintah. Hal ini memperkuat teori McQuail (2010) bahwa media dapat menentukan isu yang menjadi perhatian publik, tetapi tidak sepenuhnya menentukan bagaimana isu tersebut dimaknai oleh khalayak. Beberapa komentar di sajikan pada tabel 16 berikut.

Tabel 11. Respon Pembaca pada Topik Kebijakan Pemerintah

No	Judul Berita	Isi Komentar	Dimensi
1	Arahan Prabowo di Rapat Kabinet Perdana, dari Program Makan Gratis hingga Swasembada Pangan	"Koruptor ditangkap dulu... rakyat tetap jadi korban... bagaimana mau swasembada."	Konatif

No	Judul Berita	Isi Komentar	Dimensi
2	Arahan Prabowo di Rapat Kabinet Perdana, dari Program Makan Gratis hingga Swasembada Pangan	"Buktikan dulu berani memenjarakan pejabat korup... baru rakyat percaya."	Konatif
3	Arahan Prabowo di Rapat Kabinet Perdana, dari Program Makan Gratis hingga Swasembada Pangan	"Semoga bisa berhasil."	Afektif
4	Menko Zulhas: Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Kita Punya Waktu 2 Tahun Lagi	"Mau ngejar swasembada pangan, impor pangan ditingkatkan."	Kognitif
5	Menko Zulhas: Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Kita Punya Waktu 2 Tahun Lagi	"Ah omon-omon aja Zulhas, buktikan."	Afektif
6	Menko Zulhas: Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Kita Punya Waktu 2 Tahun Lagi	"Coba lihat rekam jejak Zulhas... waktu jadi Mendag mengobral izin impor."	Kognitif
7	Menko Zulhas: Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Kita Punya Waktu 2 Tahun Lagi	"Sementara itu impor terus."	Kognitif
8	Zulhas Sebut Prabowo Mau Setop Impor Beras Mulai 2025, Sudah Swasembada 2027	"Catat ya omongannya."	Afektif
9	Zulhas Sebut Prabowo Mau Setop Impor Beras Mulai 2025, Sudah Swasembada 2027	"Realistis saja Pak, jangan cuma janji."	Afektif
10	Zulhas Sebut Prabowo Mau Setop Impor Beras Mulai 2025, Sudah Swasembada 2027	"Stok Bulog masih banyak, nanti saat panen raya bisa tidak menyerap gabah petani?"	Kognitif

b. Produksi Pertanian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon pembaca terhadap pemberitaan bertopik produksi pertanian didominasi oleh dimensi kognitif, kemudian diikuti dimensi afektif dan konatif. Dominasi respon kognitif menunjukkan bahwa pembaca lebih menitikberatkan penilaian pada rasionalitas kebijakan peningkatan produksi daripada menerima narasi yang dibangun media. Menurut McQuail (2010), respon kognitif merupakan proses ketika khalayak menginterpretasikan informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Dalam konteks penelitian ini, pembaca tidak hanya memahami tujuan peningkatan produksi pangan, tetapi juga mengevaluasi konsekuensi kebijakan tersebut terhadap keberlanjutan lingkungan dan efektivitas pencapaian swasembada.

Komentar tersebut mendukung hasil analisis framing Entman. Pada perangkat *define problems*, Kompas.com mengonstruksi rendahnya produksi

pangan sebagai hambatan utama dalam mewujudkan swasembada. *Diagnose causes* mengaitkan persoalan tersebut dengan keterbatasan lahan produktif sehingga perlu dilakukan perluasan kawasan pertanian. *Treatment recommendation* menempatkan pemanfaatan lahan hutan, optimalisasi lahan, dan peningkatan produksi sebagai solusi untuk mempercepat swasembada pangan. Framing tersebut membangun persepsi bahwa ekspansi lahan merupakan langkah yang rasional dan diperlukan untuk memenuhi target produksi nasional.

Respon pembaca menunjukkan pola yang berbeda, dengan mayoritas komentar tidak memperdebatkan pentingnya peningkatan produksi pangan, tetapi mempertanyakan cara yang ditempuh pemerintah untuk mencapainya. Komentar seperti "*jangan ngawur, sangat berpotensi merusak lingkungan*", "*hutan mana lagi yang akan diratakan?*", dan "*jangan mengorbankan hutan demi swasembada*" menunjukkan bahwa pembaca memaknai kebijakan perluasan lahan sebagai persoalan ekologis, bukan semata-mata persoalan produksi. Hasil analisis ini memperlihatkan bahwa pembaca menggeser fokus framing dari isu peningkatan produksi menuju isu keberlanjutan lingkungan. Dengan kata lain, pembaca menerima tujuan swasembada pangan, tetapi mempertanyakan strategi yang dipilih pemerintah untuk mencapainya.

Respon ini mencerminkan proses kognitif yang dijelaskan McQuail (2010), yaitu khalayak mengaitkan informasi media dengan pengetahuan yang telah dimiliki mengenai dampak deforestasi, kerusakan ekosistem, dan pengalaman program pembukaan lahan sebelumnya. Akibatnya, makna yang dibentuk pembaca tidak sepenuhnya sejalan dengan framing Kompas.com. Media membingkai perluasan lahan sebagai solusi, sedangkan pembaca memaknainya sebagai kebijakan yang berpotensi melahirkan persoalan baru.

Respon afektif memperlihatkan munculnya rasa khawatir terhadap dampak jangka panjang kebijakan produksi pangan. Kekhawatiran tersebut tidak diarahkan pada target swasembada, melainkan pada kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan, hilangnya kawasan hutan, dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Menurut McQuail (2010), respon afektif muncul ketika informasi media memengaruhi sikap dan evaluasi emosional individu. Dalam penelitian ini, sikap tersebut menunjukkan bahwa pembaca lebih menempatkan

keberlanjutan lingkungan sebagai nilai yang harus dipertimbangkan dalam setiap kebijakan produksi pangan.

Respon konatif terlihat melalui berbagai usulan alternatif yang disampaikan pembaca. Sejumlah komentar mendorong pemerintah memanfaatkan lahan terlantar, meningkatkan produktivitas lahan yang telah ada, memperbaiki teknologi budidaya, dan mengevaluasi program *food estate* sebelum membuka kawasan hutan baru. Respon tersebut menunjukkan bahwa pembaca tidak hanya mengkritik kebijakan, tetapi juga menawarkan solusi yang dianggap lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam perspektif McQuail (2010), respon konatif menunjukkan kecenderungan khalayak untuk mendorong perubahan setelah melakukan proses penilaian terhadap informasi media. Penelitian ini mengindikasikan bahwa pemberitaan Kompas.com tidak hanya membentuk perhatian terhadap isu swasembada pangan, tetapi juga mendorong partisipasi pembaca dalam memberikan alternatif kebijakan.

Ditinjau secara keseluruhan, respon pembaca pada topik produksi pertanian menegosiasikan framing Kompas.com dengan pembaca menerima bahwa peningkatan produksi merupakan syarat penting untuk mencapai swasembada pangan, tetapi menolak konstruksi media yang menempatkan perluasan lahan sebagai solusi utama. Bagi pembaca, keberhasilan swasembada tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara pembangunan pertanian dan kelestarian lingkungan. Penelitian ini memperkuat pandangan McQuail (2010) bahwa khalayak merupakan pihak yang aktif dalam membangun makna terhadap pesan media. Framing mampu menentukan isu yang menjadi perhatian publik, tetapi tidak sepenuhnya menentukan cara khalayak memaknai solusi yang ditawarkan media. Beberapa komentar di sajikan pada tabel 17 berikut.

Tabel 12. Respon Pembaca pada Topik Produksi Pertanian

No	Judul Berita	Isi Komentar	Dimensi
1	20 Juta Hektare Hutan Diidentifikasi Bisa Dimanfaatkan untuk Pangan hingga Energi	"Jangan ngawur, sangat berpotensi merusak lingkungan."	Kognitif
2	20 Juta Hektare Hutan Diidentifikasi Bisa Dimanfaatkan untuk Pangan hingga Energi	"Hutan mana lagi yang akan diratakan?"	Kognitif

No	Judul Berita	Isi Komentar	Dimensi
3	20 Juta Hektare Hutan Diidentifikasi Bisa Dimanfaatkan untuk Pangan hingga Energi	"Belajar dari food estate yang gagal dulu."	Kognitif
4	20 Juta Hektare Hutan Diidentifikasi Bisa Dimanfaatkan untuk Pangan hingga Energi	"Jangan mengorbankan hutan demi swasembada."	Afektif
5	20 Juta Hektare Hutan Diidentifikasi Bisa Dimanfaatkan untuk Pangan hingga Energi	"Semoga tidak diwarnai korupsi seperti proyek sebelumnya."	Afektif
6	20 Juta Hektare Hutan Diidentifikasi Bisa Dimanfaatkan untuk Pangan hingga Energi	"Masih banyak lahan terlantar, kenapa harus hutan?"	Konatif
7	20 Juta Hektare Hutan Diidentifikasi Bisa Dimanfaatkan untuk Pangan hingga Energi	"Optimalkan sawah yang sudah ada."	Konatif
8	20 Juta Hektare Hutan Diidentifikasi Bisa Dimanfaatkan untuk Pangan hingga Energi	"Perbaiki irigasi dan teknologi pertanian lebih penting."	Konatif
9	20 Juta Hektare Hutan Diidentifikasi Bisa Dimanfaatkan untuk Pangan hingga Energi	"Produktivitas petani harus ditingkatkan, bukan hanya buka lahan."	Konatif
10	20 Juta Hektare Hutan Diidentifikasi Bisa Dimanfaatkan untuk Pangan hingga Energi	"Evaluasi food estate sebelum membuka kawasan baru."	Konatif

c. Harga Pangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon pembaca terhadap pemberitaan bertopik harga pangan didominasi oleh dimensi konatif, sedangkan dimensi kognitif dan afektif muncul dalam jumlah yang lebih sedikit. Dominasi dimensi konatif menunjukkan bahwa pembaca tidak berhenti pada tahap memahami informasi, tetapi terdorong untuk memberikan usulan dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah. Menurut McQuail (2010), respon konatif merupakan kecenderungan individu untuk mendorong tindakan setelah menerima informasi media. Dalam penelitian ini, pemberitaan mengenai stabilitas harga pangan memicu pembaca untuk mengemukakan solusi yang dinilai lebih relevan dibandingkan narasi yang dibangun media.

Penelitian ini berkaitan dengan hasil analisis framing, pada perangkat *define problems*, Kompas.com mengonstruksi stabilitas harga pangan sebagai salah satu indikator keberhasilan 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. *Diagnose causes* mengaitkan keberhasilan tersebut dengan kebijakan pengendalian harga dan distribusi pangan yang dijalankan pemerintah. *Moral judgement*

membangun penilaian bahwa kemampuan menjaga stabilitas harga mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Pada *treatment recommendation*, keberlanjutan kebijakan pengendalian harga diposisikan sebagai langkah yang perlu dipertahankan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Respon pembaca menunjukkan bahwa framing tersebut tidak diterima secara utuh, melainkan dievaluasi berdasarkan kondisi ekonomi yang mereka rasakan. Komentar "*belum terlihat ada gebrakan yang signifikan*", disertai penjelasan mengenai dampak kenaikan pajak, kenaikan harga barang, dan lemahnya penegakan hukum, menunjukkan bahwa pembaca tidak menilai keberhasilan pengendalian harga hanya berdasarkan pernyataan pemerintah. Pembaca menggunakan pengalaman sehari-hari sebagai dasar untuk menguji klaim stabilitas harga pangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembaca melakukan proses interpretasi aktif sebagaimana dijelaskan McQuail (2010), yaitu menilai informasi media melalui pengalaman empiris, bukan sekadar menerima pesan yang disampaikan.

Respon konatif memperlihatkan pola yang lebih kuat. Komentar yang menyatakan "*harga pangan murah akibatnya bahan pangan murah... yang benar itu penghasilan warga dinaikkan, tingkatkan lapangan kerja*" menunjukkan bahwa pembaca memandang persoalan harga pangan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat dan biaya produksi pertanian. Pembaca menggeser fokus pembahasan dari pengendalian harga menuju peningkatan pendapatan, efisiensi biaya produksi, dan perluasan kesempatan kerja. Komentar lain yang menuntut pemerintah "*melenyapkan korupsi karena itu akar masalah negara ini*" menunjukkan bahwa stabilitas harga dipersepsikan sebagai persoalan tata kelola pemerintahan, bukan semata-mata persoalan distribusi pangan. Menurut McQuail (2010), respon konatif menunjukkan bahwa informasi media mampu mendorong pembaca memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan penilaian yang mereka bangun sendiri.

Respon afektif muncul dalam bentuk dukungan terhadap pemerintah melalui komentar "*Bismillah, Alhamdulillah*". Meski jumlahnya terbatas, komentar tersebut menunjukkan bahwa sebagian pembaca menerima framing Kompas.com yang menggambarkan stabilitas harga pangan sebagai capaian positif pemerintah.

Namun, dominasi respon konatif dan kognitif menunjukkan bahwa penerimaan tersebut bukan merupakan kecenderungan utama. Sebagian besar pembaca justru mengaitkan keberhasilan kebijakan dengan indikator yang lebih luas, seperti daya beli masyarakat, tingkat pendapatan, biaya produksi pertanian, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Framing Kompas.com menempatkan stabilitas harga pangan sebagai indikator keberhasilan pemerintah, sedangkan pembaca memperluas ruang evaluasi dengan memasukkan variabel kesejahteraan masyarakat, biaya produksi, korupsi, serta daya beli sebagai ukuran keberhasilan kebijakan. Respon pembaca tidak menolak tujuan pengendalian harga pangan, tetapi mempertanyakan indikator keberhasilan yang digunakan dalam pemberitaan. Pola ini menunjukkan bahwa khalayak membangun makna berdasarkan realitas yang mereka alami, sehingga framing media lebih berhasil mengarahkan perhatian pada isu harga pangan daripada membentuk kesepakatan mengenai keberhasilan kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini memperkuat konsep McQuail (2010) bahwa proses penerimaan media berlangsung secara aktif melalui interpretasi dan evaluasi, bukan melalui penerimaan pesan secara langsung. Beberapa komentar di sajikan pada tabel 18 berikut.

Tabel 13. Respon Pembaca pada Topik Harga Pangan

No	Judul Berita	Isi Komentar	Dimensi
1	"Gini Ratio" di Jakarta Tinggi, Rano Karno: Harga Pangan Harus Murah	"Harga pangan murah akibatnya bahan pangan murah. Bagaimana mau membuat bahan pangan murah kalau harga pupuk dan alat pertanian tinggi, harga pakan ternak dan ikan selangit. Yang benar itu penghasilan warga dinaikkan dan lapangan kerja ditingkatkan."	Konatif
2	Bicara soal 100 Hari Kerjanya, Prabowo: Alhamdulillah Harga Pangan dan BBM Terkendali	"Bismillah, Alhamdulillah."	Afektif
3	Bicara soal 100 Hari Kerjanya, Prabowo: Alhamdulillah Harga Pangan dan BBM Terkendali	"Harusnya ada gebrakan serius melenyapkan korupsi di negeri ini karena itu akar masalah negara ini. Korupsi bukan hanya uang, tetapi juga korupsi perundangan dan perencanaan."	Konatif
4	Bicara soal 100 Hari Kerjanya, Prabowo:	"Belum terlihat ada gebrakan yang signifikan. Efek kenaikan pajak sudah terasa, harga barang ikut naik, dan penegakan hukum masih lemah."	Kognitif

No	Judul Berita	Isi Komentar	Dimensi
	Alhamdulillah Harga Pangan dan BBM Terkendali		

d. Infrastruktur Pertanian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon pembaca terhadap pemberitaan bertopik infrastruktur pertanian didominasi oleh dimensi kognitif, sedangkan dimensi afektif dan konatif muncul dalam jumlah yang lebih sedikit. Dominasi dimensi kognitif menunjukkan bahwa pembaca lebih banyak mengevaluasi arah kebijakan pemerintah daripada memberikan respon emosional. Menurut McQuail (2010), respon kognitif merupakan proses ketika khalayak mengolah informasi melalui pengetahuan, pengalaman, dan penilaian rasional terhadap pesan media. Dalam penelitian ini, pembaca tidak hanya menilai pentingnya pembangunan infrastruktur pertanian, tetapi juga membandingkannya dengan kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai prioritas pembangunan nasional.

Penelitian ini mendukung hasil analisis framing, pada *define problems*, Kompas.com mengonstruksi keterbatasan infrastruktur pertanian sebagai salah satu hambatan dalam mewujudkan swasembada pangan. *Diagnose causes* mengaitkan persoalan tersebut dengan perlunya penyesuaian prioritas pembangunan agar infrastruktur pendukung pertanian, seperti bendungan, jaringan irigasi, dan perlindungan lahan sawah, memperoleh perhatian yang lebih besar. *Moral judgement* membangun legitimasi bahwa ketahanan pangan merupakan kebutuhan yang lebih mendesak dibandingkan proyek pembangunan jangka panjang. Pada *treatment recommendation*, pemberitaan menekankan penguatan infrastruktur pertanian sebagai langkah strategis untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan.

Respon pembaca menunjukkan bahwa framing tersebut cenderung diterima, tetapi disertai interpretasi yang lebih luas. Mayoritas komentar tidak lagi memperdebatkan pentingnya swasembada pangan, melainkan mendukung perubahan prioritas pembangunan dari IKN menuju sektor pertanian. Komentar seperti "*yang penting rakyat bisa makan dulu, IKN nanti saja*", "*beras lebih penting, manusia tidak makan pasti mati*", dan "*setuju, urusan makan dulu*" menunjukkan bahwa pembaca menempatkan ketahanan pangan sebagai kebutuhan

yang lebih mendesak daripada pembangunan ibu kota baru. Pola ini menunjukkan bahwa framing Kompas.com berhasil membangun persepsi bahwa infrastruktur pertanian memiliki urgensi yang lebih tinggi dibandingkan proyek infrastruktur lain. McQuail (2010) dominasi respon kognitif menunjukkan bahwa pembaca menerima isu yang dibangun media, kemudian mengevaluasinya berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat.

Pembaca juga mengembangkan makna framing dengan mengaitkannya pada persoalan struktural sektor pertanian. Komentar seperti "*banyak lahan sawah produktif berkurang jadi pabrik*", "*orang enggan menjadi petani karena tidak menguntungkan*", dan "*impor beras terus, sulit pangan terus*" menunjukkan bahwa pembaca memandang infrastruktur pertanian tidak dapat dipisahkan dari perlindungan lahan, regenerasi petani, dan keberlanjutan produksi pangan. Artinya, pembaca tidak hanya menerima solusi yang ditawarkan media, tetapi memperluas pembahasan ke persoalan mendasar yang dinilai menghambat tercapainya swasembada pangan. Penelitian ini memperkuat pandangan McQuail (2010) bahwa khalayak secara aktif mengembangkan makna pesan media sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki.

Respon afektif menunjukkan munculnya dukungan terhadap perubahan orientasi pembangunan pemerintah. Komentar seperti "*semoga swasembada pangan bisa cepat terealisasi*" dan "*baguslah Prabowo, harus konsisten dengan program sendiri*" menunjukkan adanya harapan agar pemerintah memprioritaskan pembangunan pertanian. Dukungan tersebut bukan sekadar ditujukan kepada program swasembada pangan, tetapi juga terhadap keputusan menjadikan sektor pangan sebagai prioritas pembangunan nasional. McQuail (2010), respon afektif menunjukkan terbentuknya sikap positif setelah pembaca menerima informasi yang sesuai dengan nilai dan harapan yang mereka miliki.

Dimensi konatif tampak melalui berbagai usulan konkret yang disampaikan pembaca. Komentar seperti "*manfaatkan bendungan yang telah dibangun dan tambah jumlah bendungan*" serta "*IKN lebih baik ditunda dulu*" menunjukkan bahwa pembaca tidak hanya menerima arah kebijakan pemerintah, tetapi juga memberikan rekomendasi mengenai langkah yang dianggap lebih efektif. Rekomendasi tersebut mengindikasikan bahwa pembaca memandang

pembangunan infrastruktur pertanian harus berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi pangan, bukan sekadar pembangunan fisik. Menurut McQuail (2010), respon konatif merupakan kecenderungan individu untuk mendorong tindakan setelah melakukan proses evaluasi terhadap informasi media. Dalam penelitian ini, tindakan yang diharapkan pembaca berupa pengalihan anggaran, optimalisasi infrastruktur yang telah tersedia, dan perlindungan lahan pertanian sebagai prasyarat tercapainya swasembada pangan.

Topik infrastruktur pertanian merupakan satu-satunya topik pada periode 100 Hari Kerja Pemerintahan yang menunjukkan kecenderungan mengafirmasi framing Kompas.com. Mayoritas pembaca menerima konstruksi media yang menempatkan pembangunan infrastruktur pertanian sebagai prioritas dibandingkan pembangunan IKN. Meskipun pembaca tidak menerima framing secara pasif, mereka memperluas makna yang dibangun media dengan mengaitkan pembangunan infrastruktur pada perlindungan lahan pertanian, kesejahteraan petani, dan efektivitas alokasi anggaran negara. Hal ini menunjukkan bahwa framing Kompas.com tidak hanya membentuk perhatian publik terhadap isu swasembada pangan, tetapi juga mendorong pembaca mengevaluasi arah pembangunan nasional berdasarkan kebutuhan yang dianggap paling mendesak. Beberapa komentar di sajikan pada tabel 19 berikut.

Tabel 14. Respon Pembaca pada Topik Infrastruktur Pertanian

No	Judul Berita	Isi Komentar	Dimensi
1	Menteri PU Tegaskan IKN Tetap Jalan, tapi Prioritas Sekarang Swasembada Pangan	"Semoga swasembada pangan bisa cepat terealisasi dengan membangun lebih banyak bendungan dan jaringan irigasi serta meminimalkan alih fungsi lahan sawah."	Afektif
2	Menteri PU Tegaskan IKN Tetap Jalan, tapi Prioritas Sekarang Swasembada Pangan	"Yang penting rakyat bisa makan dulu, IKN nanti saja."	Kognitif
3	Menteri PU Tegaskan IKN Tetap Jalan, tapi Prioritas Sekarang Swasembada Pangan	"Beras lebih penting. Manusia tidak makan pasti mati."	Kognitif
4	Menteri PU Tegaskan IKN Tetap Jalan, tapi Prioritas Sekarang Swasembada Pangan	"Banyak lahan sawah produktif berkurang jadi pabrik."	Kognitif
5	Menteri PU Tegaskan IKN Tetap Jalan, tapi	"Saya tidak yakin bisa swasembada beras karena sektor pertanian kurang menarik	Kognitif

No	Judul Berita	Isi Komentar	Dimensi
	Prioritas Sekarang Swasembada Pangan	dan banyak lahan pertanian menjadi perumahan."	
6	Menteri PU Tegaskan IKN Tetap Jalan, tapi Prioritas Sekarang Swasembada Pangan	"Kalau mau swasembada pangan, manfaatkan bendungan yang telah dibangun dan tambah jumlah bendungan."	Konatif
7	Menteri PU Tegaskan IKN Tetap Jalan, tapi Prioritas Sekarang Swasembada Pangan	"Dukung swasembada pangan, jika sektor pertanian serius dikerjakan maka peternakan juga berkembang."	Kognitif
8	Menteri PU Tegaskan IKN Tetap Jalan, tapi Prioritas Sekarang Swasembada Pangan	"Setuju, yang penting urusan makan dulu, proyek IKN bisa ditunda."	Kognitif
9	Menteri PU Tegaskan IKN Tetap Jalan, tapi Prioritas Sekarang Swasembada Pangan	"Baguslah Prabowo, harus konsisten dengan program sendiri."	Afektif
10	Menteri PU Tegaskan IKN Tetap Jalan, tapi Prioritas Sekarang Swasembada Pangan	"IKN lebih baik dijadikan taman hiburan saja, lebih baik fokus pada ketahanan pangan."	Konatif

e. Kelembagaan

Respon pembaca terhadap pemberitaan kelembagaan pertanian menunjukkan bahwa pembaca tidak menempatkan perubahan kelembagaan sebagai solusi utama swasembada pangan. Framing Kompas.com yang menekankan transformasi Bulog sebagai langkah strategis justru direspon dengan penekanan terhadap pentingnya peningkatan kesejahteraan petani dan implementasi kebijakan yang konkret. Menurut McQuail (2010), respon kognitif terlihat ketika pembaca menghubungkan efektivitas kelembagaan dengan kondisi nyata petani. Sementara respon konatif muncul melalui tuntutan agar pemerintah menghadirkan inovasi dan terobosan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani, bukan sekadar melakukan perubahan organisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi kelembagaan dalam pemberitaan media tidak otomatis membentuk kepercayaan publik. Pembaca lebih menilai keberhasilan kelembagaan berdasarkan dampak nyata terhadap kesejahteraan petani daripada perubahan struktural yang disampaikan media. Beberapa komentar di sajikan pada tabel 20 berikut.

Tabel 15. Respon Pembaca pada Topik Kelembagaan

No	Judul Berita	Isi Komentar	Dimensi
----	--------------	--------------	---------

1	Wujudkan Swasembada Pangan Nasional, Menteri Rini Dukung Transformasi Kelembagaan Bulog	"swasembada sulit terwujud tanpa kesejahteraan petani"	Kognitif
2	Wujudkan Swasembada Pangan Nasional, Menteri Rini Dukung Transformasi Kelembagaan Bulog	"cari solusi dan terobosan terbaik untuk rakyat"	Konatif

Berdasarkan hasil analisis terhadap 180 komentar pembaca, diperoleh tiga kategori respon, yaitu positif, netral, dan negatif. Distribusi masing-masing kategori tersebut menunjukkan kecenderungan sikap pembaca terhadap pemberitaan mengenai 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Adapun persentase dan jumlah komentar pada setiap kategori respons disajikan pada tabel 21 berikut.

Tabel 21. Persentase Jumlah Komentar 100 Hari Kerja Pemerintahan

Topik	Jumlah komentar	Persentase
Produksi pertanian	93	51,67%
Kebijakan pemerintah	50	27,78%
Infrastruktur	31	17,22%
Harga pangan	4	2,22%
Kelembagaan	2	1,11%
Total	180	100%

Berdasarkan analisis terhadap 180 komentar pembaca pada pemberitaan 100 hari kerja pemerintahan, respons khalayak paling dominan diarahkan pada topik produksi pertanian sebanyak 93 komentar (51,67%), diikuti kebijakan pemerintah sebanyak 50 komentar (27,78%), infrastruktur sebanyak 31 komentar (17,22%), harga pangan sebanyak 4 komentar (2,22%), dan kelembagaan sebanyak 2 komentar (1,11%). Dominasi topik produksi menunjukkan bahwa perhatian pembaca terutama tertuju pada persoalan substantif swasembada pangan, seperti perluasan lahan, pembukaan hutan, produktivitas pertanian, serta dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pembaca tidak hanya menerima swasembada pangan sebagai agenda peningkatan produksi, tetapi juga mempertanyakan konsekuensi dan efektivitas kebijakan yang dijalankan.

Penelitian tersebut sejalan dengan Laurenz dan Ratnawati (2025) yang menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan opini dan emosi terhadap isu politik dan kebijakan publik, sehingga komentar dapat digunakan untuk memahami respons publik secara sistematis. Dalam penelitian ini, komentar pada topik produksi dan kebijakan menunjukkan

bahwa pembaca melakukan interpretasi dan evaluasi terhadap pesan media, terutama dengan mempertanyakan konsistensi pemerintah, persoalan impor, target swasembada, hingga dampak lingkungan. Sehingga, khalayak tidak berada pada posisi pasif dalam menerima pemberitaan, tetapi menggunakan ruang komentar untuk menilai kebijakan dan menyampaikan pandangan mengenai pelaksanaannya.

Sementara itu, komentar mengenai infrastruktur menunjukkan bahwa keberhasilan swasembada pangan juga dipahami berkaitan dengan dukungan sarana produksi, seperti bendungan, irigasi, dan perlindungan lahan sawah. Rendahnya komentar mengenai harga pangan dan kelembagaan menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut relatif kurang menjadi perhatian utama. Secara keseluruhan, distribusi komentar memperlihatkan bahwa swasembada pangan dalam ruang diskusi pembaca lebih banyak dimaknai sebagai persoalan produksi, implementasi kebijakan, dan pengelolaan sumber daya. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pemetaan komentar dapat digunakan untuk memahami opini publik dan menjadi informasi bagi pengambil kebijakan dalam membaca respons masyarakat.

2. 100 Hari Swasembada Pangan

Berdasarkan hasil analisis terhadap 108 komentar pembaca pada pemberitaan mengenai 100 hari swasembada pangan di Kompas.com, ditemukan bahwa respon pembaca terbagi ke dalam lima kategori isu, yaitu kebijakan pemerintah sebanyak 94 komentar, harga pangan sebanyak 6 komentar, produksi pertanian sebanyak 4 komentar, infrastruktur sebanyak 4 komentar, dan kelembagaan sebanyak 0 komentar. Oleh karena itu, pembahasan disusun berdasarkan lima topik pemberitaan, yaitu kebijakan pemerintah, harga pangan, produksi pertanian, infrastruktur pertanian, dan kelembagaan pertanian.

a. Kebijakan Pemerintah

Hasil analisis komentar menunjukkan bahwa respon pembaca pada topik kebijakan pemerintah didominasi oleh dimensi kognitif, sedangkan dimensi afektif dan konatif muncul dalam jumlah yang lebih sedikit. Dominasi respon kognitif memperlihatkan bahwa pembaca tidak menerima begitu saja konstruksi berita mengenai keberhasilan swasembada pangan, melainkan membandingkannya dengan realitas yang mereka alami, terutama kondisi harga beras, ketersediaan pangan di pasar, dan keberlanjutan impor pangan. Penilaian tersebut menunjukkan

bahwa khalayak menggunakan pengalaman empiris sebagai dasar untuk mengevaluasi klaim pemerintah.

Komentar tersebut memperkuat hasil analisis framing bahwa Kompas.com mengonstruksi pemerintah sebagai aktor utama yang berhasil mendorong pencapaian swasembada pangan melalui berbagai kebijakan strategis. Akan tetapi, respon pembaca memperlihatkan adanya jarak antara konstruksi media dengan persepsi publik. Keberhasilan kebijakan tidak diukur berdasarkan penghentian impor atau peningkatan produksi, melainkan berdasarkan manfaat yang dirasakan secara langsung melalui stabilitas harga dan kemudahan memperoleh pangan.

Menurut McQuail (2010), respon kognitif muncul ketika khalayak mengolah informasi, menilai validitas pesan, serta menghubungkannya dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Pola tersebut tampak dalam komentar pembaca yang menjadikan kondisi pasar sebagai indikator utama keberhasilan swasembada pangan. Di sisi lain, munculnya respon kognitif berupa tuntutan evaluasi kebijakan, pembentukan satuan tugas, serta pemberantasan mafia impor menunjukkan bahwa proses kognitif berkembang menjadi kecenderungan untuk mendorong tindakan pemerintah. Framing positif Kompas.com tidak sepenuhnya menghasilkan penerimaan yang seragam, tetapi memunculkan proses evaluatif dari khalayak terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Beberapa komentar disajikan pada tabel 22 berikut.

Tabel 22. Respon Pembaca pada Topik Kebijakan Pemerintah

No	Judul Berita	Isi Komentar	Dimensi
1	<i>Mentan Amran: Getarkan Dunia, Indonesia Capai Swasembada Pangan dalam Setahun</i>	"Masak sih.... nyatanya dalam setahun harga beras naik 2x lipat lebih... swasembada darimana tong."	Kognitif
2	<i>Zulhas: RI Sudah Swasembada Beras, Tahun Lalu Impor 4,5 Juta Ton, Sekarang Nol</i>	"Bagi rakyat swasembada = harga beras murah. Silakan bapak ke pasar cek harga beras."	Kognitif
3	<i>Zulhas: RI Sudah Swasembada Beras, Tahun Lalu Impor 4,5 Juta Ton, Sekarang Nol</i>	"Sungguh heran... beras premium pada menghilang... ada apa dengan perberasan di negeri ini?"	Afektif
4	<i>MBG hingga Swasembada Pangan Bakal Jadi Pembahasan di Retreat Hambalang</i>	"Katanya swasembada pangan berhasil..., kok masih jadi pembahasan."	Kognitif
5	<i>Umumkan Swasembada, Prabowo: Tak Masuk Akal, RI Kaya tapi Impor Pangan Terus</i>	"Kalau harga pangan murah, baru bilang swasembada."	Kognitif

No	Judul Berita	Isi Komentar	Dimensi
6	<i>Umumkan Swasembada, Prabowo: Tak Masuk Akal, RI Kaya tapi Impor Pangan Terus</i>	"Pak Presiden Prabowo harus melakukan evaluasi, bentuk Satgas, kenapa impor pangan terus menerus."	Konatif
7	<i>Umumkan Swasembada, Prabowo: Tak Masuk Akal, RI Kaya tapi Impor Pangan Terus</i>	"Jangan paksakan kata-kata swasembada Pak. Kita masih jauh dari kata itu."	Konatif
8	<i>Umumkan Swasembada, Prabowo: Tak Masuk Akal, RI Kaya tapi Impor Pangan Terus</i>	"Faktanya memang begitu Pak Presiden... apa-apa impor padahal Indonesia negara agraris."	Kognitif
9	<i>Umumkan Swasembada, Prabowo: Tak Masuk Akal, RI Kaya tapi Impor Pangan Terus</i>	"Mantaff, Prabowo the best president of Indonesia."	Afektif
10	<i>Setahun Prabowo-Gibran, Bagaimana Kondisi Program Swasembada Pangan di Kalteng?</i>	"Dengan kerja sama yang kompak pasti sukses."	Kognitif

b. Harga Pangan

Respon pembaca pada topik harga pangan memperlihatkan kecenderungan dominan pada dimensi kognitif. Pembaca memusatkan perhatian pada kualitas beras, pengawasan distribusi, serta transparansi terhadap temuan pelanggaran di pasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian khalayak lebih diarahkan pada aspek implementasi kebijakan daripada pada narasi keberhasilan swasembada pangan. Temuan tersebut mendukung hasil framing Kompas.com yang menempatkan pemerintah melalui Satgas Pangan sebagai aktor pengawas yang berupaya menjaga kualitas dan stabilitas pangan.

Akan tetapi, komentar pembaca menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan masih dipertanyakan apabila praktik penyimpangan masih ditemukan di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa khalayak tidak hanya memperhatikan tindakan pemerintah, tetapi juga efektivitas hasil kebijakan. Dalam teori McQuail (2010), dominasi respon kognitif menunjukkan bahwa khalayak memanfaatkan informasi media sebagai dasar untuk mengevaluasi kondisi pasar. Respon konatif berupa dorongan agar pemerintah mengumumkan merek beras bermasalah dan memperketat pengawasan memperlihatkan bahwa khalayak mengharapkan tindakan nyata sebagai tindak lanjut atas informasi yang diberitakan. Framing media mengenai pengawasan pangan memperoleh respon berupa tuntutan

terhadap peningkatan efektivitas kebijakan. Beberapa komentar disajikan pada tabel 23 berikut.

Tabel 23. Respon Pembaca pada Topik Harga Pangan

No	Judul Berita	Isi Komentar	Dimensi
1	<i>Satgas Pangan Temukan Beras Medium Berkutu Dijual Harga Premium di Batang</i>	"Masyarakat silakan dilihat dulu kualitas beras yang dibeli, teliti sebelum membeli."	Afektif
2	<i>Satgas Pangan Temukan Beras Medium Berkutu Dijual Harga Premium di Batang</i>	"Seperti zaman Orde Baru, beras jatah PNS banyak kutu."	Kognitif
3	<i>Satgas Pangan Temukan Beras Medium Berkutu Dijual Harga Premium di Batang</i>	"Petani jangan menuntut harga gabah mahal terus, biar harga beras tidak naik."	Konatif
4	<i>Satgas Pangan Temukan Beras Medium Berkutu Dijual Harga Premium di Batang</i>	"Diumumkan hasil temuan agar masyarakat tidak membeli merek beras tersebut."	Kognitif
5	<i>Satgas Pangan Temukan Beras Medium Berkutu Dijual Harga Premium di Batang</i>	"Awasi penyimpangan dan beri efek jera kepada pelaku."	Konatif
6	<i>Satgas Pangan Temukan Beras Medium Berkutu Dijual Harga Premium di Batang</i>	"Kalau dilihat gambarnya malah beras SPHP?"	Kognitif

c. Produksi Pertanian

Respon pembaca pada topik produksi pertanian menunjukkan bahwa capaian peningkatan produksi belum secara otomatis dipersepsikan sebagai indikator keberhasilan swasembada pangan. Sebagian besar komentar menilai bahwa peningkatan produksi harus diikuti dengan dampak nyata terhadap harga pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pembaca tidak menjadikan data produksi sebagai satu – satunya ukuran keberhasilan pemerintah. Komentar tersebut memperkuat hasil framing Kompas.com yang mengonstruksi peningkatan produksi sebagai bukti keberhasilan program swasembada pangan.

Respon khalayak menunjukkan adanya proses reinterpretasi terhadap pesan media. Khalayak mengalihkan fokus dari indikator makro yang disampaikan dalam berita menuju manfaat ekonomi yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut McQuail (2010), respon kognitif berkembang melalui proses penafsiran informasi berdasarkan pengalaman individu. Hal ini terlihat ketika pembaca

membandingkan data produksi dengan kondisi harga beras di pasar. Munculnya respon afektif berupa apresiasi terhadap petani menunjukkan bahwa pembaca tetap memberikan penghargaan terhadap pelaku produksi, meskipun masih mempertanyakan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menghubungkan peningkatan produksi dengan kesejahteraan masyarakat. Beberapa komentar disajikan pada tabel 24 berikut.

Tabel 24. Respon Pembaca pada Topik Produksi Pertanian

No	Judul Berita	Isi Komentar	Dimensi
1	<i>Produksi Beras Diproyeksi Tembus 34 Juta Ton, Mentan Yakin RI Swasembada Tahun Ini</i>	"Kami sebagai rakyat jelata tidak peduli dengan swasembada, tetapi kami butuh beras murah, bensin murah, dan sembako murah. Itu ukuran keberhasilan yang kami pahami."	Kognitif
2	<i>Produksi Beras Diproyeksi Tembus 34 Juta Ton, Mentan Yakin RI Swasembada Tahun Ini</i>	"Jangan omon-omon Pak Menteri, coba cek di toko retail kenapa harga beras melambung dan stoknya sering kosong."	Konatif
3	<i>1 Tahun Prabowo–Gibran, Produksi Pangan RI Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah</i>	"Oh ya??"	Kognitif
4	<i>1 Tahun Prabowo–Gibran, Produksi Pangan RI Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah</i>	"Selamat untuk petani Indonesia. Kementan RI luar biasa."	Afektif

d. Infrastruktur Pertanian

Respon pembaca pada topik infrastruktur pertanian menunjukkan bahwa pembangunan sarana pendukung swasembada pangan tidak hanya dipandang sebagai persoalan peningkatan produksi, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan lahan pertanian. Pembaca menunjukkan perhatian terhadap potensi konversi hutan, keberadaan lahan pertanian abadi, serta konsistensi kebijakan dalam mengurangi impor komoditas pangan. Komentar tersebut sejalan dengan hasil framing Kompas.com yang menempatkan pembangunan infrastruktur dan perluasan lahan sebagai strategi percepatan swasembada pangan. Akan tetapi, respon pembaca menunjukkan bahwa legitimasi pembangunan tidak hanya ditentukan oleh tujuan ekonomi, melainkan juga oleh dampaknya terhadap lingkungan dan tata kelola sumber daya.

Berdasarkan McQuail (2010), dominasi respon kognitif memperlihatkan bahwa khalayak mengevaluasi informasi media melalui pertimbangan rasional

mengenai konsekuensi kebijakan. Sementara respon konatif berupa usulan pembentukan regulasi lahan sawah abadi menunjukkan bahwa khalayak tidak hanya memberikan penilaian, tetapi juga menawarkan alternatif penyelesaian terhadap persoalan yang diberitakan. Secara keseluruhan, respon pembaca pada topik infrastruktur pertanian lebih banyak menegosiasikan framing Kompas.com. Pembaca tidak menolak pentingnya pembangunan infrastruktur pertanian, tetapi menilai bahwa keberhasilan swasembada pangan lebih ditentukan oleh efektivitas pengelolaan lahan, perlindungan sawah produktif, dan konsistensi kebijakan dibandingkan sekadar perluasan kawasan pertanian. Penelitian ini menunjukkan bahwa khalayak mengevaluasi kebijakan pembangunan pertanian berdasarkan keberlanjutan dan dampak nyata terhadap sistem pangan nasional. Beberapa komentar disajikan pada tabel 25 berikut.

Tabel 25. Respon Pembaca pada Topik Infrastruktur Pertanian

No	Judul Berita	Isi Komentar	Dimensi
1	<i>PSN Papua, Menteri ATR Nusron Wahid Singgung Swasembada Pangan Butuh Perluasan Lahan</i>	"Banyak lahan pemerintah yang masih kosong. Jika yang dibuka hutan perawan untuk padi atau sawit, apakah itu bijak?"	Kognitif
2	<i>PSN Papua, Menteri ATR Nusron Wahid Singgung Swasembada Pangan Butuh Perluasan Lahan</i>	"Intensifikasi."	Kognitif
3	<i>Zulhas Ajak Pemanfaatan Lahan untuk Pertanian: Bantuan Pangan Sehari Perlu 82,9 Juta Porsi</i>	"Pemerintah jangan sampai sawah produktif digunakan untuk perumahan. Ciptakan regulasi lahan sawah abadi."	Konatif
4	<i>Zulhas Ajak Pemanfaatan Lahan untuk Pertanian: Bantuan Pangan Sehari Perlu 82,9 Juta Porsi</i>	"Kenapa petani kedelai diganti dengan impor kedelai dan gandum dari Amerika?"	Kognitif

e. Kelembagaan

Pada periode 100 Hari Swasembada Pangan, tidak ditemukan komentar pembaca pada pemberitaan yang termasuk dalam topik kelembagaan pertanian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu kelembagaan belum memperoleh perhatian publik sebesar isu kebijakan pemerintah, harga pangan, produksi pertanian, maupun infrastruktur pertanian. Dari perspektif McQuail (2010), tidak munculnya respon menunjukkan bahwa proses penerimaan pesan media belum berkembang menjadi perhatian kognitif, afektif, ataupun konatif terhadap isu

kelembagaan. Penelitian ini memperkuat hasil framing bahwa pemberitaan Kompas.com lebih banyak menonjolkan kebijakan pemerintah sebagai fokus utama dibandingkan aspek kelembagaan pertanian. Berdasarkan hasil analisis terhadap 108 komentar pembaca, diperoleh tiga kategori respon, yaitu positif, netral, dan negatif. Distribusi masing-masing kategori tersebut menunjukkan kecenderungan sikap pembaca terhadap pemberitaan mengenai 100 hari swasembada pangan. Adapun persentase dan jumlah komentar pada setiap kategori respon disajikan pada tabel 26 berikut.

Tabel 26. Persentase Jumlah Komentar 100 Hari Swasembada Pangan

Topik	Jumlah komentar	Persentase
Kebijakan pemerintah	94	87,04%
Harga pangan	6	5,56%
Produksi pertanian	4	3,70%
Infrastruktur	4	3,70%
Kelembagaan	0	0,00%
Total	108	100%

Berdasarkan analisis terhadap 108 komentar pembaca, respon negatif mendominasi dengan 82 komentar (75,93%), diikuti respon netral sebanyak 18 komentar (16,67%) dan respon positif sebanyak 8 komentar (7,41%). Dominasi respon negatif menunjukkan bahwa pembaca cenderung memberikan evaluasi kritis terhadap pemberitaan swasembada pangan, terutama terkait klaim keberhasilan pemerintah, harga dan ketersediaan pangan, impor, serta kesejahteraan petani. Penelitian ini menunjukkan bahwa audiens tidak semata-mata menerima konstruksi keberhasilan swasembada pangan dalam pemberitaan, tetapi membandingkannya dengan kondisi yang mereka persepsikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, respon negatif merepresentasikan adanya jarak antara klaim keberhasilan kebijakan dengan ekspektasi dan pengalaman pembaca.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Arintowati dan Wahyudi (2022) yang menunjukkan bahwa komentar netizen merupakan bentuk tanggapan yang merepresentasikan sikap terhadap objek yang diberitakan, baik melalui ekspresi perasaan (*affect*), penilaian terhadap aktor (*judgement*), maupun evaluasi terhadap suatu kondisi (*appreciation*). Dalam penelitian ini, respon negatif dapat dipahami sebagai ekspresi ketidakpuasan sekaligus *judgement* terhadap kapasitas dan kredibilitas pemerintah dalam merealisasikan swasembada pangan, sedangkan

respon positif mencerminkan penerimaan dan apresiasi terhadap capaian kebijakan. Sementara itu, respon netral menunjukkan adanya komentar berupa opini, pertanyaan, atau saran tanpa evaluasi yang secara tegas bersifat positif maupun negatif. Sehingga, ruang komentar Kompas.com dapat dipandang sebagai arena evaluasi publik, tempat pembaca menerima, mempertanyakan, dan menegosiasikan makna swasembada pangan yang dikonstruksikan dalam pemberitaan. Temuan tersebut dapat dibandingkan dengan penelitian Apriliana (2026), yang menyoroti aspek berbeda dalam konteks pemberitaan Kompas.com.

Berdasarkan hasil penelitian Apriliana (2026), penelitian tersebut menunjukkan bahwa kecepatan publikasi berita Kompas.com berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan pembaca. Kecepatan penyajian informasi dipersepsikan sebagai indikator profesionalisme media sehingga meningkatkan kredibilitas Kompas.com sebagai sumber informasi. Fokus penelitian Apriliana (2026) berada pada hubungan antara karakteristik media dan tingkat kepercayaan pembaca terhadap institusi media.

Penelitian ini tidak menganalisis kepercayaan terhadap media, tetapi mengkaji respon pembaca terhadap substansi pemberitaan swasembada pangan selama satu tahun awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan pola respon. Pada periode 100 hari kerja pemerintahan, komentar pembaca masih didominasi oleh harapan dan dukungan terhadap program swasembada pangan. Pada periode 100 hari swasembada pangan, respon bergeser menjadi lebih evaluatif. Pembaca menilai keberhasilan kebijakan berdasarkan kondisi yang mereka alami secara langsung, terutama stabilitas harga pangan, ketersediaan beras, distribusi, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dipengaruhi oleh karakteristik data yang digunakan. Apriliana (2026) menggunakan data survei untuk mengukur persepsi responden terhadap kredibilitas Kompas.com sebagai institusi media. Penelitian ini menggunakan komentar pembaca pada ruang diskusi berita sehingga menangkap respon yang muncul secara spontan terhadap kebijakan yang diberitakan. Perbedaan sumber data menghasilkan fokus analisis yang berbeda. Penelitian Apriliana (2026) menjelaskan hubungan antara kecepatan publikasi dan

kepercayaan terhadap media, sedangkan penelitian ini menjelaskan hubungan antara framing pemberitaan, implementasi kebijakan pemerintah, dan respon publik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kredibilitas media tidak secara otomatis menghasilkan penerimaan terhadap isi pemberitaan. Pembaca dapat mempercayai Kompas.com sebagai media yang kredibel, tetapi tetap mengkritisi kebijakan pemerintah yang dikonstruksikan dalam pemberitaan. Pergeseran respon dari dukungan menuju evaluasi menunjukkan bahwa khalayak berperan sebagai aktor aktif yang menafsirkan, menguji, dan mengevaluasi pesan media berdasarkan realitas yang mereka alami. Sehingga, ruang komentar tidak hanya menjadi wadah interaksi, tetapi juga berfungsi sebagai arena kontrol sosial terhadap implementasi kebijakan publik.

D. Perbandingan Framing dan Respon Pembaca antar Periode

1. Perbandingan Hasil Framing

Berikut merupakan tabel perbandingan hasil penelitian antara periode 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan periode 100 hari swasembada pangan. Perbandingan ini dilakukan untuk melihat perbedaan kecenderungan framing media serta respon pembaca terhadap isu swasembada pangan pada dua momentum kebijakan yang berbeda. Melalui perbandingan tersebut dapat diketahui bagaimana Kompas.com membangun konstruksi pemberitaan dan bagaimana masyarakat merespon kebijakan pemerintah di bidang pangan selama satu tahun awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Disajikan pada tabel 27 berikut.

Tabel 27. Perbandingan Hasil Framing Dua Periode

Aspek Perbandingan	100 Hari Kerja Pemerintahan Presiden Prabowo	100 Hari Swasembada Pangan
Fokus utama pemberitaan	Penekanan pada program awal pemerintahan, percepatan kebijakan, reformasi birokrasi, dan optimisme swasembada pangan	Penekanan pada evaluasi implementasi program, capaian produksi, stabilitas pangan, dan keberlanjutan program
Arah framing dominan	Positif dan optimistis terhadap pemerintahan baru	Lebih realistis dan evaluatif terhadap pelaksanaan program
Aktor dominan	Presiden Prabowo, menteri, TNI/Polri, dan lembaga pemerintah pusat	Kementerian teknis, petani, daerah, dan lembaga pelaksana program

Aspek Perbandingan	100 Hari Kerja Pemerintahan Presiden Prabowo	100 Hari Swasembada Pangan
<i>Define problems</i>	Ketergantungan impor, lemahnya birokrasi, rendahnya produktivitas pangan	Tantangan distribusi, stabilitas harga, keberlanjutan produksi, dan efektivitas program
<i>Diagnose causes</i>	Regulasi belum optimal, koordinasi lemah, keterbatasan lahan dan SDM	Hambatan implementasi, cuaca, distribusi pangan, dan persoalan teknis lapangan
<i>Make moral judgement</i>	Pemerintah diposisikan sebagai penyelamat dan reformator nasional	Pemerintah diposisikan sebagai pengelola program yang perlu menjaga konsistensi dan hasil nyata
<i>Treatment recommendation</i>	Reformasi kebijakan, percepatan swasembada, modernisasi pertanian, keterlibatan aparat negara	Penguatan distribusi pangan, evaluasi program, peningkatan produktivitas, dan pengawasan pelaksanaan
Diksi dominan	“swasembada”, “percepatan”, “ketahanan pangan”, “Indonesia Emas 2045”, “kolaborasi”, “setop impor”	“stabilitas pangan”, “evaluasi”, “produksi”, “harga pangan”, “keberlanjutan”, “realisasi program”
Kecenderungan framing	Pemerintah sebagai aktor progresif dan visioner	Pemerintah sebagai aktor administratif dan pelaksana kebijakan
Karakter pemberitaan	Simbolik, politis, dan penuh optimisme	Teknis, implementatif, dan lebih pragmatis

Berdasarkan hasil perbandingan framing, pada periode 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo, Kompas.com lebih banyak membingkai swasembada pangan sebagai agenda besar nasional yang sarat optimisme dan simbol politik pemerintahan baru. Media menonjolkan citra Presiden Prabowo sebagai pemimpin tegas, progresif, dan visioner dalam membangun ketahanan pangan nasional. Framing yang muncul cenderung berorientasi pada pembangunan citra pemerintah melalui narasi percepatan swasembada, penghentian impor, modernisasi pertanian, dan mobilisasi seluruh elemen negara.

Sementara itu, pada periode 100 hari swasembada pangan framing pemberitaan mulai bergeser dari narasi simbolik menuju pendekatan yang lebih realistis dan implementatif. Media tidak hanya menyoroti target pemerintah, tetapi juga mulai memperlihatkan tantangan pelaksanaan program di lapangan seperti distribusi pangan, stabilitas harga, keberlanjutan produksi, hingga efektivitas kebijakan. Framing media pada periode kedua menunjukkan adanya pergeseran dari tahap legitimasi kebijakan menuju tahap evaluasi kebijakan.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa dalam satu tahun awal pemerintahan Presiden Prabowo, pemberitaan mengenai swasembada pangan berkembang dari framing optimisme politik menuju framing implementasi program. Hal tersebut menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi membangun legitimasi pemerintah pada awal kekuasaan, tetapi juga mulai menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang lebih evaluatif terhadap pelaksanaan kebijakan pangan nasional.

2. Perbandingan Hasil Respon Pembaca

Penelitian ini juga membandingkan respon pembaca terhadap pemberitaan swasembada pangan pada dua periode penelitian. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat perubahan perhatian, dukungan, maupun kritik masyarakat terhadap isu swasembada pangan selama satu tahun awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil perbandingan disajikan pada tabel 28 berikut.

Tabel 28. Perbandingan Hasil Respon Pembaca Dua Periode

Aspek Perbandingan	100 Hari Kerja Pemerintahan Presiden Prabowo	100 Hari Swasembada Pangan
Jumlah komentar	180 komentar	108 komentar
Topik paling banyak dikomentari	Produksi pertanian	Kebijakan pemerintah
Karakter respon pembaca	Antusias, penuh harapan, dan responif terhadap program baru pemerintah	Lebih kritis, selektif, dan evaluatif terhadap hasil program
Fokus perhatian pembaca	Produksi pangan, modernisasi pertanian, dan swasembada	Efektivitas kebijakan, harga pangan, dan realisasi program
Nada komentar dominan	Optimistis dan mendukung pemerintah	Campuran antara dukungan dan kritik
Bentuk dukungan	Harapan terhadap perubahan dan keberhasilan program	Dukungan terhadap keberlanjutan program yang dianggap berhasil
Bentuk kritik	Keraguan terhadap target percepatan swasembada	Kritik terhadap implementasi dan dampak nyata kebijakan
Isu yang paling menarik perhatian	Brigade pangan, cetak sawah, petani milenial, setop impor	Stabilitas harga pangan, distribusi, dan keberhasilan swasembada
Intensitas partisipasi publik	Tinggi karena efek awal pemerintahan baru	Menurun karena isu mulai memasuki tahap implementasi
Kecenderungan umum respon	Respon emosional dan politis	Respon rasional dan evaluatif

Hasil perbandingan respon pembaca menunjukkan adanya perubahan pola perhatian masyarakat terhadap isu swasembada pangan selama satu tahun awal pemerintahan Presiden Prabowo. Pada periode 100 hari kerja pemerintahan, jumlah komentar pembaca lebih tinggi karena masyarakat masih memiliki rasa antusias dan harapan besar terhadap program-program pemerintah yang baru diluncurkan. Komentar pembaca banyak berfokus pada isu produksi pertanian, modernisasi pertanian, dan target percepatan swasembada pangan.

Pada periode 100 hari swasembada pangan, jumlah komentar mengalami penurunan dan karakter respon masyarakat menjadi lebih evaluatif. Pembaca mulai menilai implementasi program berdasarkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat, seperti stabilitas harga pangan, distribusi pangan, dan keberhasilan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian publik mulai bergeser dari sekadar dukungan terhadap visi pemerintah menuju penilaian terhadap efektivitas kebijakan yang dijalankan.

Perubahan respon pembaca menunjukkan bahwa pada awal pemerintahan masyarakat cenderung memberikan dukungan simbolik terhadap program pemerintah. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menunjukkan sikap yang lebih kritis dan rasional dalam menilai keberhasilan kebijakan swasembada pangan. Dinamika komentar pembaca mengindikasikan adanya pergeseran persepsi publik dari optimisme awal menuju evaluasi yang lebih substantif terhadap capaian dan pelaksanaan program pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan antara periode 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo dan periode 100 hari swasembada pangan memperlihatkan perkembangan pola framing media dan respon publik selama satu tahun awal pemerintahan. Pada tahap awal, pemberitaan Kompas.com cenderung membangun legitimasi pemerintah melalui framing yang positif, optimistis, dan menonjolkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan sektor pangan nasional. Pemerintah diposisikan sebagai aktor utama yang mampu mendorong perubahan melalui reformasi birokrasi, modernisasi pertanian, serta pencapaian swasembada pangan. Pada periode berikutnya, framing media berkembang menjadi lebih realistis dan evaluatif dengan menampilkan berbagai tantangan implementasi program di lapangan. Perubahan tersebut menunjukkan

bahwa pemberitaan media bergerak dari orientasi legitimasi politik menuju fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

Penelitian ini sejalan dengan pandangan Quedral (2012, dalam Lubis, 2025, hlm.2) yang menekankan bahwa komunikasi pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pencapaian target pembangunan, tetapi juga pada terwujudnya keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan individu sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam penelitian ini, framing yang dibangun media tidak hanya membentuk pemahaman masyarakat mengenai keberhasilan program swasembada pangan, tetapi juga membuka ruang bagi publik untuk menilai sejauh mana manfaat program tersebut dirasakan oleh kelompok sasaran. Perubahan respon pembaca dari dukungan menuju evaluasi kritis menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menerima narasi pembangunan yang disampaikan pemerintah, melainkan mulai mempertimbangkan dampak nyata kebijakan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian.

Posisi media dalam proses tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan bahwa pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dalam pembangunan pangan, fungsi tersebut menempatkan media tidak hanya sebagai penyampai informasi mengenai kebijakan dan capaian pemerintah, tetapi juga sebagai ruang publik untuk menyampaikan persoalan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, dan membentuk penilaian masyarakat terhadap dampaknya. Dengan demikian, pemberitaan mengenai swasembada pangan memiliki peran dalam menghubungkan kebijakan pembangunan dengan pengalaman dan kepentingan masyarakat sebagai kelompok yang terdampak.

Oleh karena itu, keberhasilan program swasembada pangan tidak dapat dilepaskan dari peran penyuluh pertanian sebagai agen komunikasi pembangunan di tingkat lapangan. Penyuluh pertanian berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dengan petani melalui proses penyebaran informasi, pendampingan, edukasi, serta penguatan kapasitas petani dalam menerapkan inovasi pertanian. Keberadaan penyuluh menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa program yang dirancang pemerintah dapat dipahami dan dilaksanakan

secara efektif oleh masyarakat sasaran. Capaian swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan pemberitaan media, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi pembangunan yang berlangsung melalui peran penyuluh pertanian dalam memberdayakan petani serta mendorong partisipasi mereka dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

